

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Model Rumah Singgah Bagi Anak Jalanan, Cocokkah?  
(Studi Kasus Pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

Disusun oleh : Desi Uli Pasaribu

NIM : 0310310028 – 31

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Malang, 24 September 2007

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

**Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A. Ph.D**  
NIP. 130 704 332

**Drs. Sarwono, M.Si**  
NIP. 131 410 386

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 25 September 2007

Mahasiswa

Nama : Desi Uli Pasaribu

NIM : 0310310028-31

## RINGKASAN

Desi Uli Pasaribu, 2007, **Model Rumah Singgah Bagi Anak Jalanan, Cocokkah? (Studi Kasus pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)**, Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A. Ph.D, Drs. Sarwono, M.Si, 103 Hal + xi

Dalam menangani masalah anak jalanan yang semakin pelik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah, yang memberikan berbagai alternatif pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif. Melalui rumah singgah, anak jalanan diharapkan dapat mengalami kemajuan baik dalam aspek moral dan spiritualnya serta kondisi perekonomian keluarganya. Di Kota Malang, kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah telah berlangsung sejak tahun 1999 dengan menjadikan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang sebagai *pilot project* kebijakan. Untuk itulah selama delapan tahun masa implementasinya penting sekali untuk menjawab pertanyaan apakah selama ini model rumah singgah cocok atau tidak bagi anak jalanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, model rumah singgah cocok bagi mereka. Hal ini dikarenakan oleh adanya kegiatan-kegiatan positif yang meliputi kegiatan keagamaan, diskusi tentang berbagai masalah yang dihadapi anak jalanan, penyuluhan-penyuluhan tentang narkoba, HIV AIDS, dll, rekreasi ke tempat-tempat hiburan anak dan pelatihan keterampilan hidup bagi anak jalanan yang sudah tidak bersekolah lagi (seperti menjahit, menyablon, perbengkelan, dan membuat kerajinan tangan). Selain itu, sebagai salah satu bentuk pemberdayaan sumber daya manusia anak jalanan, pihak rumah singgah menyediakan beasiswa bagi anak jalanan yang masih bersekolah dan ingin melanjutkan sekolah. Pembinaan ala rumah singgah ini juga akan lebih cocok lagi bagi anak jalanan binaan apabila pihak rumah singgah memberikan uang saku tiap kali ada kegiatan dan tersedianya pekerjaan formal setelah masa pembinaan berakhir. Tidak hanya anak jalanan saja yang diberdayakan, orang tua anak jalanan binaan pun turut diberdayakan melalui pemberian modal usaha ekonomi produktif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian keluarga sehingga anak-anak tidak lagi harus turun ke jalan untuk mencari uang.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perubahan sikap, moral, mental dan spiritual anak jalanan binaan menjadi lebih baik, tidak terdapatnya anak jalanan yang memiliki masalah kriminal, tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam diri anak. Namun, keberhasilan pembinaan ala rumah singgah ini akan lebih terasa apabila pihak rumah singgah mampu memberikan jaminan pekerjaan formal bagi anak jalanan yang berusia mandiri. Selama stigma negatif masih melekat dalam diri anak jalanan, maka apapun upaya yang dilakukan untuk mengentaskan anak jalanan akan menjadi sia-sia. Dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah, orang tua anak jalanan, masyarakat, kalangan pengusaha, pers, LSM/LSK sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan kebijakan.

## SUMMARY

Desi Uli Pasaribu, 2007, **Homestay Model, Is It Appropriate for Street Children? (Case Study at Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)**, Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A. Ph.D, Drs. Sarwono, M.Si, 103 pages + xi

In handling problems of street children in urban areas, government has released the policy of street children orientation through homestay model, which is giving various alternatives of services to fulfill the basic needs and rights of street children and prepares their future to become productive citizens. Homestay model aims a progress of moral, mental and spiritual of the street children and also a better economic circumstances for their family. The policy has been implemented since 1999 in Malang by making Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang as a pilot project. So, by eight years implementation, it is important to answer the question about the appropriate of the service model for the street children as the policy target.

Result of the research indicates that according to street children of Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, the model of homestay is appropriate enough for them. It is caused by the existence of positive activities done during the orientation such as religious activity, discussion of the street children problems, consul about narcotics, HIV and AIDS, etc, recreation, life skills training for street children whom not had a formal education (such as sewing, screen printing, automotive workshop, and handicrafting). Besides, as one of empowerment forms of human resource, Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang provides scholarship for street children who is still studying and wish to continue their level of formal education. The orientation of homestay also would more appropriate to street children if Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang gives extra money and supply formal job after period of orientation come to an ends. The homestay model also empowers parents of the street children by giving small scale business capital. This is in order to increase the family income so that the kids don't have to work at street anymore.

The conclusion shows that the implementation of street children orientation through homestay at Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang has been going quiet well. It is proved by the changes of attitude, moral, mental and spiritual condition of street children becomes better, there is no criminal cases related to the street children, and also sense of responsibility arises among the individual. However, any kind of efforts in order to decrease the street children would be useless if negative stigma still exist among the mind of the people. Without any support from all of people (government, street children parents, society, entrepreneur, press media, non-governmental organization), the policy will be hard to get success.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh karena kasih setia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Model Rumah Singgah Bagi Anak Jalanan, Cocokkah? (Studi Kasus pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Isinya membahas tentang implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang selama ini diterapkan sebagai solusi penanganan anak jalanan di Kota Malang. Selama delapan tahun masa implementasinya, maka dalam skripsi ini juga membahas mengenai cocok tidaknya pembinaan ala rumah singgah diterapkan bagi anak jalanan binaanya, sehingga mampu mensejahterakan anak jalanan dan keluarganya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A, Ph. D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik dan Ketua Komisi Pembimbing Skripsi atas motivasi dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi juga telah mengingatkan penulis untuk menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
3. Drs. Sarwono, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing skripsi atas masukan dan kemampuan yang luar biasa dan senantiasa panjang sabar dalam bimbingan skripsi penulis.
4. Pimpinan dan pekerja sosial Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang
5. Pimpinan dan staf bidang Sosial dan Ekonomi Bappeko Malang
6. Kedua orang tua, saudara dan sahabat penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas doa dan motivasi yang tak ternilai.

“Berikan yang terbaik” adalah prinsip penulis dalam menjalani hidup juga termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, upaya menuju yang terbaik tidak bisa lepas dari kesalahan-kesalahan yang penulis lakukan. Karena melalui kesalahan itu, penulis dapat belajar menerima kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat.

Malang, 24 September 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIK.....</b>	<b>15</b>
2.1 Isu Anak Jalanan sebagai Masalah Administrasi Publik Modern.....	15
2.2 Teori Kritis dan Evaluasi Kritis .....	24
2.2.1 Teori Kritis.....	24
2.2.2 Evaluasi Kritis.....	27
2.3 Isu Anak Jalanan dan Kemiskinan Struktural.....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian .....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	35

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Instrumen Penelitian .....	37
3.7 Analisis Data .....	37
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	39
4.1.1 Deskripsi dan Potret Kehidupan Anak Jalanan Kota Malang.....	39
4.1.2 Lokasi Kegiatan dan Basis Tempat Tinggal Anak Jalanan.....	40
4.1.2.1 Kawasan Alun-Alun dan Pusat Pertokoan Kota Malang sebagai Lokasi Pertama Anak Jalanan di Kota Malang .....	40
4.1.2.2 Kawasan Pertokoan Pasar Besar (PBM) Kota Malang.....	43
4.1.2.3 Kawasan Perempatan Rampal.....	44
4.1.3 Deskripsi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang.....	46
4.1.3.1 Sejarah.....	46
4.1.3.2 Status Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang .....	51
4.1.3.3 Gedung.....	51
4.1.3.4 Struktur Organisasi .....	51
4.1.3.5 Fungsi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang .....	52
4.1.3.6 Visi dan Misi.....	53
4.1.3.7 Tujuan .....	54
4.1.3.8 Sistem Pendanaan.....	54
4.1.4 Deskripsi Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang .....	55
4.1.4.1 Jumlah Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang.....	55
4.1.4.2 Wilayah/Lokasi/Kantong Anak Jalanan.....	56
4.1.4.3 Usia Anak Jalanan.....	58
4.1.4.4 Jenis Pekerjaan.....	59
4.1.4.5 Pendidikan Anak Jalanan .....	60
4.1.4.6 Jam Kerja Anak (Lama Bekerja).....	61
4.1.4.7 Jenis Kelamin Anak Jalanan .....	62

4.1.4.8 Penyebab Utama dan Penyebab Lain Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang .....	63
4.1.4.9 Sikap (Karakter) Kelompok Anak Jalanan .....	64
4.1.4.10 Masalah yang Mereka Hadapi .....	66
4.1.4.11 Akibat yang Timbul Bila Mereka Tidak Ditangani .....	66
4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian .....	67
4.2.1 Implementasi Pembinaan Anak Jalanan ala Rumah Singgah pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang .....	67
4.2.1.1 Bentuk Pembinaan yang Selama ini Dilakukan oleh Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang .....	67
4.2.1.2 Kendala yang Selama ini Dihadapi oleh Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang .....	73
4.2.2 Evaluasi Kritis Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang Terhadap Pembinaan ala Rumah Singgah yang Cocok Diterapkan Bagi Mereka (Anak Jalanan) .....	78
4.3 Pembahasan .....	85
4.3.1 Analisis Data .....	85
4.3.1.1 Model Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan ala Rumah Singgah .....	85
4.3.1.2 Dampak Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan ala Rumah Singgah .....	92
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>95</b>
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran .....	97

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Perkembangan Jumlah Anak Jalanan di Yogyakarta	8
2	Data Anak Jalanan Kota Malang Tahun 2006	9
3	Jumlah Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang	56
4	Wilayah/Lokasi/Kantong Anak Jalanan	57
5	Usia Anak Jalanan	58
6	Jenis Pekerjaan	59
7	Pendidikan Anak Jalanan	60
8	Jam Kerja Anak (Lama Bekerja)	61
9	Jenis Kelamin Anak Jalanan	62

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Kelompok Pengamen Anak Jalanan di Alun-Alun Kota Malang	41
2	Anak jalanan yang mengemis di sekitar Alun-Alun mall (Ramayana)	42
3	Kegiatan bagi hasil mengemis anak jalanan dengan orang tuanya yang juga berprofesi sebagai pengemis di kawasan Pasar Besar Malang	43
4	Anak-anak jalanan yang mengamen di perempatan lampu merah depan Lapangan Rempal	45
5	Denah Lokasi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang	48



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1	Sarana Dan Prasarana Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang	100



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Apakah yang membahagiakan manusia, seorang warga negara, di dalam republik demokratis? Tentu hidup yang berpedoman pada nilai-nilai utama: kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, kerakyatan, kesejahteraan, dan solidaritas. Nilai-nilai inilah sumber motivasi suatu republik dan individu yang menjadi warga negara karena dijamin hak-hak individual dan sosialnya berupa hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prasyarat emansipasi individual dan sosial. Musuh utamanya adalah totaliterisme dan dogmatisme, termasuk totaliterisme pasar (neoliberalisme), juga fundamentalisme agama dan etnokultur. Semua jenis totaliterisme tersebut memusuhi dan meluluhlantakkan nilai-nilai dan hak-hak warga negara. Cara melawannya adalah dengan kritisisme. Menciptakan budaya kritis dalam kehidupan individual-sosial: menanamkan kritisisme di jantung republik.

Popper menunjukkan hubungan erat kritisisme dengan perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan kemanusiaan dalam metodologi pemecahan masalah (*problem-solving methodology*). Metodologi ini selalu dirumuskan dari problem empiris dan dapat disangkal secara empiris pula.

Horkheimer telah menyodorkan teori kritisnya yang pada hematnya bisa memberi pengertian rasional secara baru dan tepat tentang diri manusia dalam alam lingkungannya. Sebagai usaha rasional manusia yang baru, teori kritis nampaknya dapat memberi kesadaran untuk membebaskan masyarakat dari keadaannya yang irasional.

Sementara itu, evaluasi kritis diperlukan untuk mengevaluasi baik hasil dari implementasi kebijakan maupun kebijakan publik itu sendiri apakah telah mewujudkan keadilan sosial dalam penerapannya. Suatu pemikiran yang kritis dibutuhkan dalam melakukan evaluasi yang mendalam.

Penelitian kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan untuk menguak tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, mengapa tindakan-tindakan itu dilakukan dengan cara dan melalui mekanisme tertentu, untuk kepentingan siapa hal itu dilakukan dan bagaimana hasil-hasil atau akibat-akibat konkretnya. Di

samping itu, yang tak kalah penting, penelitian kebijakan akan berusaha secara kritis menyingkap pilihan-pilihan strategis apa yang luput dari perhatian pembuat kebijakan beserta dimensi-dimensi tersembunyi (*hidden dimensions*) dari implementasi kebijakan, seperti ongkos sosial dan politik yang harus dipikul oleh mereka yang dikenai oleh kebijakan.

Jika dilihat dari substansi yang demikian, maka jelas sekali bahwa penelitian evaluasi amat membutuhkan udara politik yang relatif bebas dan transparan dimana hak-hak individu dan warga negara pada umumnya untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber (termasuk dari pembuat kebijakan), serta menyebarkannya dipandang sebagai suatu nilai yang asasi bagi tegaknya kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang keberadaannya dijamin sepenuhnya oleh undang-undang. Tanpa itu, penelitian kebijakan yang baik otomatis sulit berkembang secara wajar.

Oleh karena hal inilah maka diperlukan evaluasi terhadap berbagai bentuk implementasi kebijakan publik. Memang ada banyak kebijakan ataupun keputusan-keputusan kebijakan yang telah dibuat pemerintah Indonesia (seperti kebijakan bidang pertanian, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sebagainya), namun itu semua bisa jadi masih sekedar kontekstual saja dan belum semuanya membawa implikasi mendasar pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.

Dalam jurnal evaluasi kritis yang berjudul *Critical Evaluation for Education Reform*, Waters (1998, h.1-36) berpendapat bahwa sebagai sebuah praktek sosial, evaluasi memerlukan sebuah etika publik atas tanggung jawab sosial yang tak dapat dielakkan lagi meluas dan memfokuskan diri pada tujuan demokratis dari suatu kebijakan publik. Suatu evaluasi kritis harus didukung oleh fakta-fakta yang konkret dan memiliki landasan teoritik yang kuat. Dan dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memulai latar belakang dengan menguraikan hal-hal yang menjadi faktor pendorong timbulnya anak jalanan di Indonesia terutama di Kota Malang.

Perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, teknologi, serta pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, langsung atau tidak langsung, telah mempengaruhi tatanan nilai dan budaya suatu bangsa. Secara material arus pertumbuhan dan perkembangan tersebut seolah-olah berjalan dengan mulus dan menjadi kebanggaan suatu bangsa. Kenyataan sebenarnya telah terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. Di satu pihak telah terwujud bangunan-bangunan mewah yang dapat dibanggakan dan menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari area tersebut, tumbuh perkampungan kumuh yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian khusus. Di perkampungan kumuh hampir 2/3 dari jumlah penduduknya adalah anak-anak, mereka umumnya tergolong anak-anak yang rentan permasalahan sosial, dan perlu mendapat perlindungan khusus untuk menyelamatkannya.

Mempersoalkan kehidupan anak merupakan salah satu persoalan yang selalu menarik dan tidak pernah ada habisnya dibicarakan. Kompleksitas permasalahan anak berjalan paralel dengan kemajuan pembangunan suatu negara. Persoalan anak pada hakekatnya tidak sekedar mencakup persoalan hak untuk memperoleh jaminan kelangsungan hidup, tetapi juga berkaitan dengan hak untuk tumbuh berkembang anak, hak untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kapasitasnya, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan, pengabaian dan eksploitasi.

Semakin maraknya fenomena perdagangan anak ataupun munculnya anak jalanan merupakan beberapa persoalan yang melingkupi kehidupan anak. Data menunjukkan bahwa sekitar 8,4 juta anak di seluruh dunia terjebak dalam pembunuhan, perdagangan, pelacuran, pornografi serta pekerjaan terlarang dan 1,2 juta anak-anak ini telah diperdagangkan. Berdasarkan statistik ILO tahun 2002, tercatat 268 juta anak yang terpaksa bekerja, 7,3 juta diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Tidak ada satu negara pun yang terlepas dari permasalahan tersebut. Selain itu, terdapat sekitar 2,5 juta pekerja anak di negara-negara maju dan 2,5 juta di negara yang ekonominya dalam masa transisi, seperti bekas Negara Uni Soviet.

Hampir setiap tahun, sekitar 22.000 anak meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Angka terbesar, sebanyak 127 anak yang belum berusia 14 tahun yang terpaksa bekerja di kawasan Asia Pasifik. Jumlah tertinggi pekerja anak terdapat di Sub-Sahara Afrika, hampir 3/4 anak-anak berusia 14 tahun ke bawah, sekitar 48 juta anak berada di dunia kerja. Pekerja anak umumnya bekerja di sektor informal dan tidak memiliki perlindungan wajib. Bahkan, hampir 70% diantara mereka bekerja di sektor pertanian, perburuhan komersial, perikanan serta kehutanan (Suyatna, dalam Jurnal PKS Vol. V No. 16, Juni 2006, h. 30-31).

Salah satu sektor pekerjaan informal yang digeluti oleh anak-anak yang saat ini marak berkembang adalah anak jalanan. Perkembangan anak jalanan yang cukup marak seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Dilihat dari perspektif ekonomi, dalam perkembangan kehidupan anak perkotaan, keberadaan anak jalanan sangat identik dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan di beberapa wilayah perkotaan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan perlu sumber penghasilan lain. Anak sebagai salah satu sumber daya dalam keluarga mau tidak mau harus ikut bekerja demi tercukupinya kebutuhan hidup tersebut.

Dalam studinya, UNICEF (2001) menuliskan bahwa alasan anak turun ke jalan adalah untuk mencari uang, karena yatim piatu, diperlakukan kejam oleh ayah maupun ibu tiri/beberapa saudaranya, kurangnya perhatian atau perlindungan dan dukungan dari orang tua serta tekanan dari teman sebayanya. Selanjutnya, dalam penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi penyebab utama dari bertambahnya jumlah anak jalanan di Zimbabwe adalah makin meningkatnya jumlah keluarga miskin, banyaknya pengangguran, mobilitas sosial yang berjalan lambat dan hubungan keluarga yang renggang (Bourdillon, 1991, dalam UNICEF, 2001).

Kemiskinan dikenal sangat memperlemah kemampuan para orang tua untuk mengatasi hidup sehari-hari sebuah rumah tangga, sehingga ketika anak harus turun ke jalan untuk membantu orang tua, maka mereka kurang mendapat perhatian dalam masa tumbuh kembang mereka. Oleh karenanya, memungkinkan terjadinya degradasi moral dan perilaku yang berbeda dari kebanyakan anak-anak yang tidak hidup di jalanan. Dalam hasil penelitiannya di Zimbabwe, UNICEF

(2001) menuliskan bahwa di berbagai media cetak maupun elektronik menggambarkan anak jalanan sebagai pencuri kecil atau seorang kriminal.

Hal senada juga diungkapkan oleh Scanlon et. al (1998) bahwa separuh anak jalanan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Pengadilan São Paolo menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di penjara makin bertambah. Di samping itu, citra anak jalanan di Amerika Latin akrab dengan tindakan pencurian. Para praktisi hukum, kepolisian, media, kalangan bisnis dan masyarakat awam di Amerika Latin yakin bahwa anak jalanan tak diragukan lagi adalah sekelompok penjahat yang dapat mengancam kehidupan masyarakat dan harus disingkirkan.

Selain itu, anak jalanan di Amerika Latin juga rutin menggunakan narkoba. Kebiasaan ini telah melekat dalam diri mereka dan menjadi cara termudah untuk membantu menahan rasa lapar, ketakutan, dan kesedihan yang mereka alami. Narkoba menjadi pemersatu anak jalanan, sehingga memungkinkan terjadinya tindak kriminal akibat perubahan pola hidup mereka di jalanan, yang selalau berinteraksi dengan sesama anak jalanan atau dengan berbagai komunitas. Sedangkan bagi anak jalanan perempuan tidak jarang melakukan praktek prostitusi. Suatu cara yang cepat untuk mendapatkan uang (Scanlon et. al., 1998).

Di Indonesia, fenomena anak jalanan tersebut tidak hanya menjadi perhatian baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga swasta, tetapi telah menjadi perhatian badan-badan dunia seperti UNICEF, UNDP, ADB dan lain-lain. Kepedulian tersebut tidak hanya didorong oleh “belas kasih” atau rasa kemanusiaan, tetapi yang lebih mendasar adalah anak jalanan juga mempunyai hak seperti anak-anak yang lain. Manifestasi dari kepedulian tersebut tercermin di dalam Konvensi Hak Anak yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 1989, yang intinya adalah setiap anak mempunyai:

1. Hak untuk kelangsungan hidup;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan; dan
4. Hak untuk berpartisipasi.

Secara hukum, hak anak di Indonesia telah diawali 10 tahun sebelum Konvensi PBB, yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Anak jalanan di Indonesia, sudah ada sejak tahun 1980-an. Berdasarkan hasil survey sosial yang dilakukan Unika Atma Jaya dengan pendanaan dari Asia Development Bank (ADB) pada tahun 1997, jumlah anak jalanan di 12 kota besar Indonesia ada 39.861 orang, terdiri 32.678 laki-laki dan 7.183 perempuan. Ke-12 kota tersebut antara lain Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Makasar dan Mataram. Sementara laporan dari UNICEF pada tahun 1998 menyebutkan jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia mencapai 50.000 orang (Media Indonesia, 21 Juli 2001, dalam Suyatna, 2006, h. 31)

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin dan terlebih lagi bagi anak-anak yang terkategori rawan, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Terlebih-lebih pada ketersediaan sumber daya manusia, dari dampak krisis yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana telah menyebabkan banyak orang tua mengalami keterpurukan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja, menurunnya daya beli dan harga barang-barang yang melambung, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak. Akibat lebih jauh, banyak anak yang mencari kegiatan agar dapat menghasilkan uang untuk membantu ekonomi orang tuanya dengan turun ke jalan dan banyak di antara mereka terpaksa meninggalkan sekolah guna mencari nafkah di jalan. Sehingga jumlah anak jalanan di perkotaan menunjukkan peningkatan yang cukup tajam.

Di Indonesia, menurut data yang ada, saat ini paling tidak jumlah anak yang putus sekolah mencapai 11,7 juta, sementara itu sekitar 10,6 juta anak mengalami kecacatan, 70.000 anak perempuan terpuruk dan menjadi korban eksploitasi seksual komersial, 400 ribu anak terpaksa menjadi pengungsi karena kerusuhan berdarah yang meletup di berbagai wilayah, puluhan ribu anak terpaksa

hidup di jalanan, jutaan anak kekurangan gizi dan bahkan ribuan diantaranya tewas karena menderita marasmus dan kwashiorkor (Suyanto, 2003, h. 3).

Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan/anak jalanan, tetapi bagaimana pun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian dan kehidupan anak-anak menjadi makin marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan.

Selanjutnya Sanituti (1999, h. 5) membagi penyebab pokok anak jalanan menjadi empat kelompok, yakni:

1. Kesulitan ekonomi keluarga yang menempatkan seorang anak harus membantu keluarganya mencari uang dengan kegiatan-kegiatan di jalan.
2. Ketidakharmonisan rumah tangga atau keluarga, baik hubungan antara bapak dan ibu, maupun orang tua dengan anak.
3. Suasana lingkungan yang kurang mendukung untuk anak-anak menikmati kehidupan masa kanak-kanaknya termasuk suasana perselingkuhan yang kadang-kadang dianggap mereka sangat monoton dan membelenggu hidupnya.
4. Rayuan kenikmatan kebebasan mengatur hidup sendiri dan menikmati kehidupan lainnya yang diharapkan diperoleh sebagai anak jalanan.

Selain faktor ekonomi, juga banyak penyebab yang saling mempengaruhi turunnya anak ke jalan: meningkatnya "gejala" masalah keluarga seperti: kemiskinan, pengangguran, perceraian, kawin muda serta kekerasan dalam keluarga sebagai akibat dari memburuknya kondisi ekonomi dan kondisi politik di Indonesia membuat keluarga tidak lagi memiliki keberdayaan dalam melindungi anggota keluarganya. Hal ini diperkuat lagi dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang kurang mendukung terhadap masyarakat marginal, semakin menyudutkan ketidakberdayaan masyarakat, kasus-kasus penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah atau rumah mereka dengan alasan "demi pembangunan".

Akhirnya jika mereka turun ke jalan kekerasanlah yang selalu mereka hadapi, pengeroyokan, perampasan barang, pelecehan seksual dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa di jalan rawan terhadap gangguan kesehatan baik fisik

maupun mental yakni merubah karakter (sikap) menjadi anak yang beringas, sangat agresif, suka baku hantam, sering usil, berani memprotes, suka berbicara seenaknya yang disertai kata-kata kotor. Perilaku atau kebiasaan lain yang muncul pada anak-anak jalanan ialah berusaha mencari uang dengan cara apa saja sehingga sering berganti pekerjaan (termasuk pekerjaan yang tidak terpuji misalnya: mencopet, merampas, menodong), rawan terhadap obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan zat-zat adiktif lainnya, serta mobilitasnya sangat tinggi (nomaden).

Jadi dapat dikatakan, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai komunitas, anak-anak seringkali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak.

Menurut data resmi dari UNESCO, pada tahun 2004 sudah terdapat 30.000 anak jalanan di Jakarta. Jumlah tersebut belum termasuk di Surabaya, Semarang, Medan dan Yogyakarta dan kota-kota lainnya. Namun yang pasti, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Yogyakarta, persoalan anak jalanan dari tahun ke tahun semakin marak. Menurut data dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dalam Suyatna (2006, h. 32), jumlah anak jalanan di Yogyakarta semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Perkembangan Jumlah Anak Jalanan di Yogyakarta**

No.	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1	2001	199
2	2002	199
3	2003	213
4	2004	330
5	2005	256*

**Keterangan:** \* = sampai dengan Bulan Mei 2005

Berkaitan dengan gambaran secara makro tentang anak jalanan di atas, keadaan anak jalanan di Kota Malang tidak jauh berbeda dengan anak jalanan di kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Kemiskinan menjadi penyebab utama anak jalanan di Kota Malang, dimana sebelum terjadinya krisis ekonomi 1997 jumlah anak jalanan berkisar antara 100-150 anak (Dinas Sosial, 2000). Tetapi begitu krisis ekonomi melanda Indonesia, maka jumlah anak jalanan khususnya di Kota Malang menurut survei yang dilakukan oleh Departemen Sosial bekerja sama dengan Pusat Kajian Dan Pembangunan Masyarakat UNIKA Atmajaya Jakarta (1999) menyebutkan jumlah anak jalanan di Malang meningkat menjadi 1058 anak jalanan, dan pada tahun 2000 diperkirakan telah mencapai 1400 anak dengan perincian 600 anak telah terdaftar di Dinas Sosial dan sisanya (800) belum terdaftar di Dinas Sosial.

Berdasarkan data terbaru dari Kantor Bagian Sosial Kota Malang, pada tahun 2006 jumlah anak jalanan mencapai 641 anak yang tersebar di lima Kecamatan di Kota Malang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Data Anak Jalanan Kota Malang Tahun 2006**

Kecamatan	Anak Jalanan		Total
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
Lowokwaru	91	12	103
Kedungkandang	175	31	206
Klojen	105	14	119
Blimbing	87	19	106
Sukun	83	24	107
<b>Jumlah</b>	<b>541</b>	<b>100</b>	<b>641</b>

**Sumber: Kantor Bagian Sosial Kota Malang**

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa sebab utama terjadinya anak jalanan adalah karena faktor kemiskinan, ternyata faktor kemiskinan tersebut selalu berdampingan dengan faktor lain antara lain faktor lingkungan, baik lingkungan dalam rumah yang tidak kondusif ataupun lingkungan di luar rumah misalnya

melihat teman yang menjadi anak jalanan bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, menyebabkan anak tertarik untuk ikut menjadi anak jalanan.

Berdasarkan hasil *mapping* Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang (2005, h. 51) kantong-kantong anak jalanan di Kota Malang, ditemukan sejumlah tempat atau lokasi yang diduga menjadi tempat dimana anak-anak jalanan melakukan kegiatannya. Lokasi yang menjadi sasaran anak jalanan merupakan pusat keramaian, seperti terminal, pertokoan, dan perempatan jalan, bahkan di rumah-rumah makan. Kegiatan yang dilakukan di perempatan jalan kebanyakan yang ada lampu lalu lintasnya, karena di situ para pengendara kendaraan berhenti sehingga memungkinkan anak jalanan melakukan pekerjaannya.

Dari uraian mengenai kondisi anak jalanan di atas, mereka tidak dapat lepas dari stigma negatif masyarakat terhadap kehidupan dan budaya mereka di jalanan. Dalam tulisan “Situasi anak Jalanan perempuan di Semarang” oleh Yayasan Setara Semarang (15 Desember 2000) menjelaskan bahwa: “Susahnya masyarakat sendiri cenderung memberikan stigma negatif terhadap keberadaan anak jalanan”. Stigma tersebut tidak terlepas dari berbagai tindak kriminal yang dilakukan oleh anak jalanan.

Bagi masyarakat, anak jalanan mempunyai keberadaan yang *unstructured* atau tidak jelas klasifikasinya. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka menciptakan *sub-culture* mereka sendiri, yaitu struktur normatif yang mengatur pola hubungan di dalam komunitas mereka dan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Komunitas anak jalanan tersebut memiliki nilai dan norma sendiri yang berbeda dengan masyarakat umum. Pola tingkah laku anak jalanan ini dirasakan sebagai cara-cara yang kasar dan tidak berpedoman kepada norma-norma masyarakat khususnya norma kesusilaan dan norma kesopanan. Dengan demikian tidak berlebihan ketika stigma yang melekat pada anak jalanan ini identik dengan kelompok masyarakat yang bersifat sangar, kasar, dan brutal dikarenakan cara-cara mereka berinteraksi menyimpang dari norma masyarakat umum setempat.

Namun, kesan ini jelas tidak mendukung tumbuh kembangnya anak. Identitas mereka yang dianggap informal seakan-akan dijadikan legitimasi untuk merazia mereka seperti pesakitan. Yang menyedihkan, tindakan-tindakan tersebut diperkuat dengan peraturan-peraturan tata kota (seperti GDN, Trantib, penggarukan) dan beberapa tindakan kekerasan serta intimidasi terhadap mereka. Namun bila anak jalanan tidak ditangani dengan serius, maka generasi tersebut menjadi generasi yang tidak kompetitif, generasi yang rentan terhadap tindakan kriminal, generasi yang rendah kualitas sumber daya manusianya yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas generasi muda pada umumnya. Alasan dominan itulah yang menyebabkan anak jalanan memang harus segera ditangani agar tidak menjurus ke perbuatan yang melanggar hukum.

Di sisi lain secara runtut sebagai dasar atas upaya pemenuhan hak anak telah dilakukan oleh pemerintah melalui:

1. Pasal 34 UUD 1945
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
4. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
7. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182
8. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Implementasi Program melalui penanganan permasalahan anak jalanan, upaya pemerintah sejak tahun 1995 hingga bulan Maret 2000 Departemen Sosial menjalin kerjasama dengan UNDP melalui proyek INS/94/007 yang kemudian berkembang menjadi proyek INS/97/001 dari proyek ini telah dikembangkan model-model penanganan anak jalanan berupa Rumah Singgah, Mobil Sahabat Anak, dan Pondokan (*Boarding House*). Proyek ini dilaksanakan di tujuh propinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan (BKSN, 2000, h. 9). Kemudian melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial (JPS-BS) sasaran wilayah diperluas

menjadi 11 propinsi yang mencakup 12 kota tempat pelaksanaan program (DINSOS Prop. Jawa Timur, 2003: 1)

Rumah Singgah merupakan model penanganan anak jalanan yang diterapkan dan menjadi perhatian utama dalam membina anak jalanan di Kota Malang. Namun, meskipun rumah singgah dijadikan salah satu solusi dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang, permasalahan anak jalanan ini tidak henti-hentinya disoroti sebagai permasalahan yang tak ada ujung pangkalnya bagaikan lingkaran setan yang tidak habis-habis. Ada apa dan kenapa – apakah model pembinaan yang selama ini diterapkan tidak cocok atau karena hal lain? Faktor inilah yang membuat peneliti tertarik dan ingin turut memberikan sumbangan pemikiran dalam pengentasan anak jalanan melalui pembuatan skripsi yang terfokus pada masalah deskriptif model pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang diterapkan selama ini.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan studi kasus pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang. Titik persoalan ini diperlukan adanya penelitian terhadap implementasi model pembinaan melalui rumah singgah sebagai penanganan anak jalanan di Kota Malang. Selanjutnya melalui proses analisis yang mendalam diharapkan dapat ditemukan solusi pembinaan anak jalanan yang tepat khususnya di Rumah Singgah Flamboyan dan Kota Malang pada umumnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Karena permasalahan anak jalanan yang sangat kompleks sehingga menuntut penanganan yang cermat, serius, terfokus dan berkelanjutan serta model pembinaan anak jalanan yang tepat sasaran, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang selama ini diterapkan pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang?
2. Apakah model pembinaan anak jalanan ala rumah singgah pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang cocok bagi mereka (anak jalanan)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi ragam masalah yang dihadapi oleh anak jalanan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis problema implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang selama ini diterapkan pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang.
3. Untuk mengevaluasi aspirasi anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang tentang model pembinaan yang ada cocok bagi mereka.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa keperluan diantaranya:

#### 1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk mengembangkan model pembinaan yang cocok bagi anak jalanan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi anak jalanan.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan model pembinaan terhadap anak jalanan melalui Rumah Singgah sebagai model pembinaan yang diterapkan selama ini khususnya pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang.

Dengan demikian hasil penelitian ini sangat bermanfaat sebagai masukan kepada Bagian Sosial Kota Malang maupun LSM-LSM yang menangani pembinaan anak jalanan, yang lebih penting lagi adalah bahwa penelitian ini dapat berfungsi bagi sasaran atau anak jalanan itu sendiri dalam upaya menuju masa depan yang lebih baik dengan penuh percaya diri serta memiliki kemandirian yang utuh sebagai generasi penerus bangsa.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

- Bab I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan
- Bab II. Kajian Teoritik, mengemukakan tentang Isu Anak Jalanan sebagai Masalah Administrasi Publik, Teori Kritis dan Evaluasi Kritis, Isu Anak Jalanan dan Kemiskinan Struktural
- Bab III. Metode Penelitian, membahas tentang Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Analisis yang digunakan
- Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan
- Bab V. Penutup, menyajikan beberapa kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-saran dari penulis



## BAB II KAJIAN TEORITIK

Pembangunan teori menyandarkan pada sejumlah konsep umum yang tersusun dari gugusan fakta-fakta yang berisikan peristiwa dan perilaku yang khas yang dapat diketahui hubungan atau pun keterikatannya. Kerangka konseptual harus berlandaskan teori atau pikiran sehat, deskriptif atau hubungan sebab akibat. Seluruh konsep yang ada digambarkan supaya dapat menggiring peneliti untuk menemukan bingkai-bingkai yang merangkum fenomena yang jelas, memetakan hubungan-hubungan, dan membagi variabel-variabel yang berbeda secara konseptual dan fungsional.

Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai pembinaan anak jalanan ala rumah singgah maka peneliti menyajikan konsep yang diawali dengan kajian Isu Anak Jalanan sebagai Masalah Administrasi Publik, Teori Kritis dan Evaluasi Kritis, dan diakhiri dengan Isu Anak Jalanan dan Kemiskinan Struktural

### 2.1 Isu Anak Jalanan sebagai Masalah Administrasi Publik Modern

Sebelum memfokuskan diri pada konsep isu anak jalanan dalam kaitannya dengan administrasi publik modern, maka hendaknya dikaji terlebih dahulu konsep publik dalam administrasi publik modern itu sendiri.

Di dalam diri birokrasi terdapat dua hal yang seharusnya berjalan seiring, namun kemudian menjadi masalah; khususnya untuk kasus birokrasi di Indonesia. Hal pertama birokrasi selaku abdi negara, yang artinya setiap birokrat bersedia dan siap untuk mengabdikan segenap kemampuan, keahlian, keterampilan, bahkan dirinya guna keberlangsungan tata laksana pemerintahan dan negara. Serta hal yang kedua, birokrasi sebagai abdi masyarakat, yang punya maksud menjadikan publik sebagai subyek yang mesti dilayani dan dimengerti tuntutan dan dukungannya. Namun sayangnya, kondisi perimbangan antara abdi negara dan abdi masyarakat tidak pernah berwujud. Kecenderungan menjadi abdi negara daripada sebagai abdi masyarakat terasa lebih kental dalam birokrasi di Indonesia. Pertanyaannya sekarang ialah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal selaku birokrat yang pernah ditatar dalam penataran, disuluh dalam penyuluhan, dan dididik dalam pendidikan, masih saja bertindak berat sebelah. Bahkan kalau mau

berpikir logis, dilihat dari pendapatan, sebenarnya pendapatan yang mereka peroleh merupakan transformasi pajak yang dibayar masyarakat pada negara. Sehingga seharusnya birokrat lebih berorientasi sebagai abdi masyarakat ketimbang sebagai abdi negara.

Untuk memahami perilaku birokrasi tersebut, arti publik sebagai warga masyarakat, kiranya perlu diderivat. Penurunan arti publik ini diupayakan agar kita dapat memahami kenapa ada sedikit orang yang lebih cenderung untuk mengabdikan dirinya sebagai abdi negara; ada sedikit orang yang berkecenderungan untuk mengabdikan dirinya sebagai abdi masyarakat, dan hanya segelintir orang yang berhasil menjalankan fungsinya baik sebagai abdi negara maupun sebagai abdi masyarakat. Dalam ilmu administrasi publik, perilaku birokrasi yang bergerak dalam sebuah spektrum, antara abdi negara dan abdi masyarakat, dijelaskan dalam model formal mengenai perspektif-publik yang juga umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, seperti yang dikemukakan oleh Frederickson dalam bukunya yang berjudul *The Spirit of Public Administration* (1997).

**Pertama**, publik dilihat dari perspektif pluralis, *the pluralist perspective*. Perspektif ini memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan (*interest groups*). Menurut pendukung-pendukungnya, setiap orang yang punya kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lain dan membentuk suatu kelompok. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok kepentingan ini kemudian berinteraksi dan berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan individu-individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks birokrasi dan pemerintahan.

Pandangan di atas bukan tanpa kelemahan. Ada berbagai kritik yang dilontarkan pada kaum pluralis. Paling tidak ada tiga persoalan yang sering dilontarkan. Pertama, sistem *checks and balances* dalam sistem demokrasi, yang merupakan model ideal kaum pluralis, sering memperlambat kinerja birokrasi. Hal tersebut terjadi karena setiap keputusan yang akan diambil membutuhkan konsensus dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan yang diwakili oleh pemimpin mereka. Kritik kedua, kaum pluralis mengandalkan sistem perwakilan. Mereka mengasumsikan bahwa setiap kepentingan individu dapat diwakili oleh

kelompok yang biasanya berarti diwakili oleh pimpinan kelompok yang bertindak untuk dan atas nama publik. Prinsip perwakilan yang demikian mengundang persoalan, sejauh mana konsep publik, yakni berbagai kepentingan individu yang beragam, dapat dimunculkan dari suatu sistem perwakilan. Kritik ketiga, berkaitan dengan masalah efisiensi dan prinsip ekonomi yang merupakan esensi dari birokrasi ideal, yang pernah digagas oleh Weber.

Pandangan kaum pluralis tersebut di atas sering dipandang tidak memadai untuk merepresentasikan arti (atau bahkan konsep) publik, karena dalam praktiknya, isu-isu yang diangkat untuk diperjuangkan seringkali bukanlah merupakan isu yang menjadi perhatian orang banyak, melainkan dipilih berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok yang dominan. Dengan demikian, arti publik melalui perspektif ini masih sangat sulit untuk digali.

**Kedua**, publik dilihat dari perspektif pilihan publik, *the public-choice perspective*. Secara umum dapat dikatakan bahwa perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran utilitarian yang sangat menekankan pada soal kebahagiaan dan kepentingan individu. Tradisi pemikiran ini tidak terlalu memperhatikan secara khusus nilai-nilai bersama dalam komunitas. Menurut salah satu pendukung perspektif pilihan publik, Bentham, kepentingan komunitas hanyalah merupakan penjumlahan dari kepentingan-kepentingan individu yang membentuknya. Dalam pemikirannya, masyarakat terdiri dari individu-individu yang bertindak secara rasional di mana setiap tindakannya didorong oleh tujuan-tujuan (*goal directed*) dan selalu memilih alternatif-alternatif yang paling menguntungkan bagi dirinya.

Pandangan utilitarian ini memandang publik seolah-olah sebagai konsumen dalam sebuah pasar. Dengan kata lain perspektif ini mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip pasar dalam sektor publik. Asumsi metodologis dari pandangan ini adalah bahwa tindakan publik harus dimengerti sebagai tindakan individual yang termotivasi oleh kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut mereka, tugas pemerintah dan masyarakat adalah menyediakan lingkungan yang stabil sehingga pilihan-pilihan dapat dilakukan dengan bebas.

Seperti juga pandangan pluralis, perspektif pilihan publik cenderung tidak memberikan ruang yang cukup terhadap mereka yang kurang memiliki hak khusus dalam masyarakat. Jika seseorang memiliki sarana yang dibutuhkan, termasuk penguasaan informasi, maka ia akan dengan mudah dapat mengarahkan *public choice*. Sebagai akibatnya, institusi-institusi pemerintahan yang demokratis akan sangat bergantung pada dukungan dari mereka yang diperintah. Namun dalam kenyataan, publik biasanya tidak akan bekerja sama dalam melaksanakan keputusan-keputusan sulit terutama yang membutuhkan pengorbanan, apalagi jika mereka tidak memiliki kepercayaan pada institusi pemerintahan dan pada pejabat birokrasi.

**Ketiga**, publik dilihat dari perspektif legislatif, *the legislative perspective*. Dalam banyak kasus pemerintahan yang demokratis menjalankan sistem perwakilan yang tidak langsung. Seperti juga dalam pandangan kaum pluralis, asumsi dasar yang dianut adalah bahwa setiap pejabat diangkat untuk mewakili kepentingan publik. Dengan adanya pengangkatan tersebut, mereka memiliki legitimasi untuk mewujudkan perspektif publik di dalam birokrasi. Dengan demikian pejabat yang diangkat tersebut dianggap sebagai manifestasi tunggal dari perspektif publik. Meskipun pandangan ini merupakan pandangan yang dianggap realistis dan logis dalam pelaksanaan demokrasi modern, namun pada akhirnya disadari, bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok warga negara seringkali merasa tidak diwakili secara efektif oleh orang-orang yang mereka pilih secara tidak langsung. Persoalan-persoalan yang merupakan keprihatinan dan keluhan mereka sering kali tertinggal di belakang pintu para pejabat publik dan membusuk di dalam laci-laci kerja mereka. Secara singkat representasi *perspective on the public* ini juga dianggap tidak mencukupi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik, baik dalam teori maupun praktiknya.

**Keempat**, publik dilihat dari perspektif penyedia layanan, *the service-providing perspective*. Perspektif lain yang berkembang dalam ilmu administrasi publik ialah yang memandang publik sebagai pelanggan (*customers*) yang harus dilayani. Menurut pandangan ini, *street level bureaucrats* (pejabat yang berada paling dekat dengan publik) punya tugas melayani publik yang terdiri dari

individu dan kelompok. Oleh karena itu, perspektif ini mengharapkan agar pejabat-pejabat yang berada paling dekat dengan publik diharapkan menjadi penyokong utama warga mereka. Para pejabat ini diharapkan menggunakan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Sampai derajat tertentu, penempatan status individu dan kelompok sebagai *customers* dapat menggambarkan arti publik, akan tetapi dalam kondisi di luar (batas) derajat tersebut, *street level bureaucrats* sebenarnya telah terorganisir menjadi kelompok kepentingan tersendiri. Sehingga pada akhirnya, seperti juga dalam model-model perspektif sebelumnya, kepentingan pejabatlah yang mengemuka dan bukannya kepentingan publik yang seharusnya menjadi titik pusat dari setiap aktivitas pelayanan publik. Maka konsep publik dalam perspektif ini pun mempunyai kelemahan yang substansial.

Dan terakhir, **kelima**, publik dilihat dari perspektif kewargaan (atau warga negara), *the citizen perspective*. Konsep kewargaan merupakan salah satu pusat perhatian administrasi publik modern (*new public administration* dan *new public management*). Hal ini belum muncul dalam pembicaraan administrasi publik pada dekade-dekade yang lalu. Reformasi administrasi publik di beberapa negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia, ditandai oleh dua tuntutan penting. Pertama, tuntutan akan munculnya pelayan-pelayan publik yang lebih terdidik. Kedua, tuntutan agar setiap warga negara diberi informasi agar secara umum mereka dapat aktif dalam berbagai kegiatan publik dan memahami konstitusi secara baik.

Dalam beberapa literatur, konsep publik dapat diidentikkan dengan konsep masyarakat-madani/masyarakat-warga yang merupakan padanan dari *civil society*. Sumber kekuatan arti pendekatan kewargaan ini terutama terletak pada potensinya untuk meningkatkan dan memuliakan publik yang termotivasi oleh adanya perhatian bersama bagi kebaikan bersama. Untuk itulah, dalam administrasi publik modern, para administrator publik harus bisa menerapkan keadilan sosial (*social equity*), disamping efisiensi dan ekonomi, dalam setiap pelayanannya bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Karena semuanya ditujukan untuk mencapai kebaikan bersama.

Konsep keadilan sosial (*social equity*) merupakan pilar penting dalam administrasi publik modern. Ketika pertanyaan dilontarkan tentang apa administrasi publik modern itu dan apakah sasaran dan dasar pemikirannya, maka seringkali yang menjadi jawabannya adalah: manajemen yang efisien, ekonomis dan terkoordinir atas instansi pelayanan. Fokusnya adalah pada manajemen tingkat tinggi atau pada pelayanan-pelayanan pokok oleh staf pembantu (penganggaran, organisasi dan manajemen, analisa sistem, perencanaan, personalia, pembelian). Dasar pemikiran untuk Administrasi publik hampir senantiasa berupa manajemen yang lebih baik (lebih efisien atau pun ekonomis). Jawaban ini merupakan dasar pemikiran dari administrasi publik yang konvensional. Sementara administrasi publik modern menambahkan keadilan sosial (*social equity*) pada sasaran-sasaran dan dasar pemikiran klasik. Hal ini dapat diketahui lewat pendapat Frederickson dalam bukunya yang berjudul *The Spirit of Public Administration* (1997, h. 113):

*“Social equity is the most frequently listed public administration value besides economy and efficiency... Embracing equity as the third normative pillar of public administration requires public servants to seek out and work toward more just allocations of public goods and services, to represent those who do not otherwise have access to public policy processes, to seek the public interest or greater good, and to respect the dignity of individuals (public employees as well as other citizens) and tirelessly safeguard their rights”*

Menyimak apa yang dikemukakan oleh Frederickson, berarti administrator publik yang adil mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengembangkan usahanya demi kepentingan mereka yang kurang beruntung dan setiap lembaga atau tindakan sosial harus meningkatkan kehormatan diri setiap orang serta melindungi hak individu dimana pun dia berada, karena kehormatan diri individu adalah fundamen untuk suatu masyarakat yang adil.

Lebih lanjut dalam buku yang sama, Frederickson (1997, h. 131) menambahkan “...*The point is that public administrators understand and practice social equity; like efficiency or economy, it is understood as a given in general public administration practice. We believe not in the duty to serve but in the duty to serve equitably*” bahwa pada intinya, para administrator yang menerapkan keadilan sosial dalam pelayanannya memahami bahwa bukan hanya sebuah

kewajiban untuk melayani publik melainkan kewajiban para administrator publik untuk melayani secara adil, karena perbuatan-perbuatan adil tidak hanya menciptakan kondisi optimal bagi kehidupan manusia, mereka juga merupakan suatu unsur utama dalam rasionalisasi diri.

Keadilan sosial adalah suatu ungkapan yang mencakup pengertian seperangkat pilihan nilai, pilihan kerangka organisasi, dan pilihan corak manajemen. Keadilan sosial menekankan persamaan hak dalam pelayanan pemerintahan, pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan dan pelaksanaan program untuk manajer-manajer publik, perubahan dalam manajemen publik, daya tanggap lebih terhadap kebutuhan warga negara daripada terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi publik.

Salah satu perhatian pokok administrasi publik modern adalah perlakuannya yang adil terhadap warga negara. Keadilan sosial berangkat dari patokan-patokan ini. Pemerintahan pluralistis secara sistematis melakukan diskriminasi dengan memihak pada birokrasi-birokrasi yang mapan dan stabil, dan pada minoritas klien yang istimewa dan menentang minoritas-minoritas lain yang miskin dalam sumber-sumber daya politik maupun ekonomi. Berlangsungnya pengangguran secara luas, kemiskinan, kebodohan, wabah penyakit dan keputusan merupakan hasil dalam era pertumbuhan ekonomi. Suatu Administrasi Publik yang gagal mengusahakan perubahan dengan mencoba memperbaiki deprivasi atas minoritas-minoritas mungkin pada akhirnya akan digunakan untuk menindas minoritas-minoritas itu sendiri. Maka keadilan sosial diupayakan untuk melawan diskriminasi sistematis dan ditujukan untuk meningkatkan kekuatan politik dan kesejahteraan ekonomi minoritas-minoritas ini.

Administrasi publik modern tidak hanya menyelenggarakan mandat legislatif seefisien dan seekonomis mungkin, melainkan juga untuk mempengaruhi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang secara lebih umum meningkatkan kualitas kehidupan bagi semuanya. Instansi-instansi administrasi merupakan medan-medan pertarungan kebijakan dasar. Administrasi publik modern mencoba memfokuskan kembali pada masalah dan untuk mempertimbangkan pendekatan-pendekatan institusional alternatif dalam

menghadapi masalah. Ciri tak terkendali dari masalah-masalah masyarakat seperti kemiskinan di kota dan pengangguran mendorong pada administrator publik untuk dengan serius memperoleh pemecahan-pemecahan yang lebih tepat dengan mengubah lembaga-lembaga itu maupun mengembangkan lembaga-lembaga yang baru dan lebih gampang diubah.

Perkembangan administrasi publik modern memandang sistem dan proses administrasi publik mengakomodasikan *keseluruhan struktur dan unsur* negara (masyarakat bangsa, pemerintahan, dan wilayah negara), serta meliputi *keseluruhan proses penyelenggaraan* negara yang kompleks dan dinamik, termasuk proses kebijakan (*policy process*) dalam berbagai dimensinya. Diakui bahwa pemerintahan dalam suatu negara dengan sistem *demokrasi* yang *konstitusional* (negara hukum yang demokratis) diselenggarakan melalui kebijakan publik dengan berbagai format perundangannya. Perkembangan juga menunjukkan semakin lekatnya *nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, demokrasi, partisipasi, dan hak asasi manusia* penyelenggaraan negara dan pembangunan, sebagai indikator kemajuan dan tingkatan modernitas sistem dan proses administrasi publik dan pembangunan suatu bangsa.

Dua masalah serius yang masih dihadapi Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia memberi pesan jelas bahwa praktek pembangunan nasional selama ini belum bisa meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, juga menunjukkan masih adanya problema ketidakadilan sosial yang cukup berbahaya. Pembangunan nasional yang masih saja bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan utang luar negeri, kurang memperhatikan strategi yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan. Kebijakan publik yang pro kesejahteraan (*welfare policy*), yang berfokus pada perlindungan sosial (*social protection*) yang melembaga dan berkelanjutan, belum masuk secara memadai ke dalam arus utama (*mainstream*) pembangunan nasional. Ketika keadilan sosial menjadi perhatian dalam administrasi publik modern, maka isu anak jalanan sebagai bagian dari isu kemiskinan, harus segera dicari solusinya. Apabila kebijakan publik yang baik itu adalah yang pro kesejahteraan dan berfokus pada perlindungan sosial, bagaimana bisa dikatakan adil apabila anak-anak jalanan

tersebut masih hidup dalam kemiskinan dan hak-hak dasar mereka kurang diperhatikan bahkan cenderung diabaikan oleh negara. Padahal perlindungan atas hak asasi manusia merupakan tugas dan kewajiban para administrator publik dalam sebuah administrasi publik modern.

Pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda bangsa ini sehingga jumlah pengangguran di perkotaan semakin bertambah. Hal ini berarti pula meningkatnya orang miskin di perkotaan. Para orang tua kehilangan pekerjaan mereka dan menyebabkan mereka tidak dapat lagi menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Lapangan pekerjaan yang tersedia pun sangat terbatas dan membutuhkan keahlian-keahlian tertentu untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan para orang tua yang sebelumnya hanya bekerja sebagai buruh atau pekerja kasar ataupun yang tidak pernah mengecap pendidikan formal? Pastilah sangat sulit untuk kembali mendapatkan pekerjaan. Bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya? Pada akhirnya, anaklah yang menjadi korban keterpurukan ekonomi keluarga mereka dan bangsa ini. Anak-anak itu terpaksa atau malah dipaksa orang tua mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Anak-anak, yang seharusnya menjalani masa kanak-kanak mereka yang menyenangkan seperti anak-anak yang lain, harus mencari uang di jalanan – tempat yang tidak mengajukan keahlian-keahlian khusus sebagai suatu prasyarat – dan melupakan impian mereka untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Yang ada dalam benak mereka hanya bagaimana caranya mendapatkan uang banyak untuk menyambung hidup mereka dan keluarga.

Untuk usia sebela ini, mereka harus berhadapan dengan kejamnya dunia jalanan, yang identik dengan masalah-masalah kenakalan remaja, premanisme, narkoba, minuman keras, seks bebas, dll. Bahkan nyawa mereka pun jadi taruhannya. Lalu, dimana lagi letak keadilan sosial di negeri ini? Kebijakan publik seperti apa yang mampu mengembalikan hak-hak mereka sebagai warga negara, yang seharusnya dilindungi haknya? Ini mengindikasikan bahwa administrasi publik di negara kita telah mengalami kegagalan dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka (anak jalanan) masih

merasakan ketidakadilan. Hal ini jelas sekali merupakan masalah administrasi publik modern. Ketika dalam administrasi publik modern memandang publik sebagai warga negara, maka anak jalanan juga termasuk didalamnya, dan hak dasarnya perlu mendapat perlindungan seperti hak asasi manusia yang lainnya dan harus membuahkan produk kebijakan publik yang berpihak pada rakyat dan memanusiakan rakyat.

## 2.2 Teori Kritis dan Evaluasi Kritis

### 2.2.1 Teori Kritis

Kritik merupakan kekuatan motif utama untuk setiap perkembangan intelektual, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Tanpa kritik tak ada motif rasional untuk mengubah teori dan untuk mentransformasi masyarakat. Jadi, metode pertumbuhan pengetahuan adalah metode kritis atau kritisisme. Sebuah pendekatan yang mengakui bahwa segala praktik sosial kita (politik, ekonomi, ideologi, dan teoritis) selalu bersifat sementara (*tentative*), tak pernah absolut, dan dapat salah (*fallible*). Semua teori atau praktik sosial memiliki kemungkinan untuk gugur dalam ujian empiris yang keras.

Kuhn mengatakan revolusi *scientific* dapat dijelaskan sebagai berikut: Keretakan paradigma (*paradigm rupture* atau *anomalies*) merupakan momen aktivitas kritisisme antara teori dan praktik. Momen ini menumbuhkan peluang pencerahan baru untuk membangun teori alternatif dalam ilmu pengetahuan maupun praktik sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dengan demikian, kritik bertujuan menemukan kesalahan kita, dan kita sadar sepenuhnya akan kemungkinan salah dari teori dan praktik. Karena itu, setiap saat kita harus bersedia mengkritik dan dikritik, menguji dan diuji secara empiris, dengan harapan akan menemukan kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Inilah dasar demokrasi, ruang publik yang berpedoman pada nilai-nilai, dan dilindungi negara hak-hak individual dan sosial warga negaranya.

Kritisisme dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat berarti kesediaan setiap individu untuk berani memakai akal budinya sendiri secara bebas, otonom dan mandiri. Melihat individu dan masyarakat dalam totalitas dialektis lengkap dengan sejarah kontradiksinya. Individu berfungsi optimum mewujudkan seluruh

potensi kemanusiaannya bila bebas memakai akal budi, membuat pilihan rasional, dan bertanggung jawab terhadap pilihan. Bila sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kebebasan, maka di bahu setiap individu yang dijamin hak individual dan hak sosialnya, pertumbuhan demokrasi, ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan kebudayaan memperoleh mesin penggerak utamanya.

Konsep Teori Kritis ini berkembang dari Sekolah Frankfurt dan Horkheimer patut disebut pendiri aliran tersebut. Para tokoh teori kritis memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai dan ideologi sebagai “bagian dari kerangka konseptual yang menjelaskan apa yang perlu dimiliki, contohnya pengetahuan ilmiah mengenai suatu fenomena” (Sabia & Wallulis, 1983 dalam Waters, 1998). Teori ini melihat posisi sebuah teori bukan hanya penting guna membandingkan pendapat dan memperluas cara pandang seseorang, melainkan juga penting untuk memungkinkan seseorang mencermati secara kritis pandangan orang lain. Jadi yang terpenting disini adalah terbentangnya medan peluang yang memungkinkan berlangsungnya perjumpaan asumsi. Inilah alasannya mengapa teori kritis umumnya amat menggandrungi perluasan proses partisipasi dimana orang-orang sengaja didorong atau dibangkitkan semangatnya untuk mengeksplorasi pengalaman-pengalaman dan pikiran-pikiran mereka sendiri.

Sependapat dengan Abdul Wahab (1999), bahwa salah satu prasyarat penting untuk memungkinkan hal ini adalah keterlibatan langsung dan kritis antara para peneliti dengan warga komunitas yang luas. Alasannya, penganut teori kritis memang cenderung bersikap curiga terhadap segala bentuk wacana dan pandangan-pandangan resmi (*official view*), dan karena itu berupaya menelanjangi pandangan-pandangan resmi itu lewat aktivitas kritik dan refleksi mereka.

Teori kritis juga memungkinkan para partisipan untuk terus menggumuli dan menguji preferensi-preferensi mereka sendiri, misalnya dari mana asal preferensi itu, dan bagaimana ia dapat berubah atau diubah. Perspektif teori kritis juga menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pentingnya kaitan fakta dan nilai-nilai, bukannya hanya pada nilai-nilai semata. Dari sudut teori kritis, semua himpunan fakta pada hakikatnya didasari oleh teori-teori dan asumsi-asumsi yang menjelaskan bahwa nilai-nilai tertentu lebih disukai daripada nilai-nilai yang lain.

Karena pemaknaan yang diberikan pada setiap fakta itu ditentukan oleh nilai-nilai, maka dengan sendirinya kesemuanya itu perlu dibahas secara terbuka. Lebih lanjut, bagi teori kritis, yang penting bukan hanya berlangsungnya pertukaran gagasan dan pandangan secara kritis, tetapi juga pengujian kritis atas fakta-fakta yang relevan. Dalam model teori kritis, rasionalitas bukan sekedar diperlakukan dan dipahami sebagai instrumen untuk menemukan cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan, melainkan justru dijadikan sebagai refleksi kritis dalam menetapkan asumsi-asumsi dan pilihan-pilihan. Sebagai teori yang kritis maka teori yang dikembangkan Horkheimer mau menciptakan kesadaran yang kritis. Teori Kritis Masyarakat pada hakekatnya mau menjadi *Aufklärung*, yakni mau membuat cerah, mau menyingkap segala tabir yang menutup kenyataan yang tak manusiawi terhadap kesadaran kita. Teori kritis dalam hubungan ini bicara tentang “*Verblendungszusammenhang*”, semacam selubung menyeluruh yang membutuhkan kita terhadap kenyataan yang sebenarnya, yang perlu disobek. Ciri khas Teori Kritik Masyarakat ialah bahwa yang dikritik itu bukan kekurangan di sana sini, melainkan keseluruhannya (Sindhunata, 1983).

Teori Kritis membuka irasionalitas dari pengandaian-pengandaian sistem yang ada. Membuka bahwa sebenarnya produksi tidak untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan kebutuhan manusia diciptakan, dimanipulasikan demi produksi. Dan Teori Kritis berharap bahwa apabila rasionalitas semu sistem itu sudah sobek, maka kontradiksi-kontradiksi yang sebenarnya tetap ada, dapat mematahkan belenggu dan membebaskan manusia pada kemanusiaan yang sebenarnya. Dengan demikian Teori Kritis sebenarnya mempertahankan suatu ruang kebebasan yang pernah dapat melahirkan suatu masyarakat baru.

Teori Kritis dalam konteks pembinaan anak jalanan ala rumah singgah mencoba mengevaluasi secara kritis apakah model pembinaan tersebut cocok atau tidak menurut anak jalanan itu sendiri. Ketika upaya pembinaan melalui rumah singgah dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak jalanan di perkotaan, namun bukan berarti model pembinaan ini menjadi suatu patokan dan dikatakan ideal bagi anak jalanan. Idealnya suatu pembinaan dapat diketahui apabila dalam implementasi maupun hasil akhir dari implementasi tersebut dapat memenuhi

aspirasi dari anak jalanan yang menjadi binaan dari rumah singgah yang bersangkutan.

Kita tidak boleh menerima begitu saja secara mentah bahwa kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah sudah pasti mampu mengurangi jumlah anak jalanan di perkotaan khususnya di Kota Malang dan mengatasi segenap permasalahan yang berkaitan dengan anak jalanan. Disinilah diperlukan suatu pemikiran kritis terhadap bagaimana kebijakan tersebut seharusnya diimplementasikan sehingga mampu memberikan solusi bagi masalah anak jalanan di perkotaan. Aspek keterkaitan instansi-instansi yang menangani anak jalanan ini juga perlu dikaji lebih dalam. Karena, persepsi mereka mengenai anak jalanan amat penting, yang dikaitkan ke dalam implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan. Peran-peran apa yang seharusnya dimiliki oleh mereka (para administrator publik) dan bagaimana mereka melaksanakan peran itu juga penting sekali untuk dibahas dan dikritisi, supaya dapat diketahui apakah upaya yang dilakukan telah maksimal atau tidak. Daya tanggap para administrator terhadap aspirasi anak jalanan juga perlu diberikan perhatian dalam mengkritisi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah ini. Sehingga dapat diketahui cocok tidaknya model pembinaan ala rumah singgah ini.

### 2.2.2 Evaluasi Kritis

Evaluasi kritis dalam reformasi pendidikan membutuhkan latihan dalam menyelesaikan pekerjaan sosial yang empiris, historis dengan memanfaatkan teori-teori eksplisit tentang keadilan sosial, seperti yang diungkapkan oleh House (1976, 1980) dalam Waters (1998) bahwa dalam mempelajari evaluasi kritis membutuhkan ketekunan dan komitmen yang serius, keberanian dan keyakinan diri. Lebih lanjut dikatakan oleh Giroux (1997) bahwa dalam evaluasi harus memperhatikan keadilan sosial pelayanan publik dan evaluasi kritis harus melayani tiap-tiap kepentingan bukan hanya kepentingan para *stakeholder* dan sponsor saja akan tetapi juga lingkup masyarakat yang lebih besar dan kelompok-kelompok sasaran dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh program yang sedang dievaluasi.

Chelimsky dan Shadish menulis tentang definisi dan karakteristik evaluasi dalam esainya yang berjudul Evaluasi untuk Abad 21 (*Evaluation for the 21*

*Century*) dan menyajikan tujuan-tujuan evaluasi, yakni: (a) untuk mengukur dan menghitung hasil kebijakan publik dan program, (b) untuk mempengaruhi proses efisiensi program beserta komponennya, (c) untuk memperoleh wawasan yang jelas akan masalah sosial dan masalah-masalah publik lainnya, (d) untuk memahami bagaimana suatu organisasi dijalankan, (e) untuk memperkuat institusi-institusi dan memperbaiki kinerja administrator, (f) untuk meningkatkan tanggung jawab para aktor-aktor kebijakan terhadap publik, (g) untuk mereformasi pemerintahan melalui informasi evaluasi yang bebas, dan (h) untuk memperluas hasil-hasil kebijakan atau ukuran efisiensi dari intervensi lokal maupun nasional hingga intervensi global seperti penanggulangan kemiskinan dan kelaparan atau membalikkan pola degradasi lingkungan. Tentu saja menggunakan metode evaluasi yang berbeda-beda dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan di atas, maka terdapat 3 perspektif umum yang diuraikan oleh Chelimsky dan Shadish, yaitu:

1. Evaluasi bagi akuntabilitas (contohnya, pengukuran hasil kebijakan atau efisiensi);
2. Evaluasi bagi pengetahuan (contohnya, kemahiran atau kepandaian dalam sebuah pemahaman yang amat besar di beberapa bidang yang spesifik); dan
3. Evaluasi bagi pembangunan (contohnya, ketentuan dari bantuan evaluatif untuk memperkuat institusi atau lembaga-lembaga pemerintahan).

Oleh karena hal inilah maka diperlukan evaluasi terhadap berbagai bentuk implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi sangat penting untuk dievaluasi. Mazmanian dan Sabatier dalam Abdul Wahab (2005, h. 81-82) berpendapat bahwa terdapat faktor penting dalam proses implementasi kebijakan, yakni: (1) Mudah/tidaknya masalah dikendalikan; (2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi; (3) Faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi; dan (4) Proses implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kegagalan ataupun keberhasilan suatu implementasi kebijakan dalam mencapai tujuannya. Ada banyak kebijakan ataupun keputusan-keputusan kebijakan yang telah dibuat pemerintah Indonesia Oleh karena itulah, penting sekali untuk mengkaji lebih dalam dan mengevaluasi secara kritis akan kebijakan-kebijakan yang ada selama

ini apakah telah membawa implikasi mendasar pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat atau tidak.

### **2.3 Isu Anak Jalanan dan Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Dan tingkat kemiskinan ini pula yang dijadikan standar untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu daerah dan negara tertentu. Standar dan pemahaman mengenai kemiskinan itu sendiri sebenarnya masih diperbincangkan oleh para ahli. Levitan (1980) misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan Schiller (1979) berpendapat bahwa, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Senada dengan pendapat ini, Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Ala, 1981, h. 1-3).

Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dari sinilah dapat diketahui bahwa kemiskinan merupakan problematika utama yang mendasari problem-problem kehidupan lainnya, seperti masalah urbanisasi, kriminalitas dan disintegrasi. Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar; kerentanan masyarakat menghadapi persaingan, konflik dan tindak kekerasan; lemahnya penanganan masalah kependudukan; ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender; dan kesenjangan pembangunan yang menyebabkan masih banyaknya wilayah yang dikategorikan tertinggal dan terisolasi. Masalah kemiskinan juga memiliki spesifikasi yang berbeda antarwilayah perdesaan, perkotaan, serta permasalahan khusus di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Hal ini senada dengan pendapat Mardimin (1996) dalam Suryono (2004) bahwa secara kualitatif, kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak bermartabat manusia. Atau dengan kata lain, hidup manusia itu tidak layak sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Jadi, menurut akar penyebab yang melatarbelakanginya, secara teoritis kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya atau akibat tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Kedua, kemiskinan buatan yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walau sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Diagnosis kemiskinan juga menunjukkan faktor utama penyebab kemiskinan yang bersifat struktural adalah pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang kurang mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Anak jalanan timbul akibat dari kemiskinan struktural, yakni tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Sementara ini banyak orang mengira bahwa faktor utama yang menyebabkan anak turun ke jalanan untuk bekerja dan hidup di jalan adalah karena faktor kemiskinan. Kompleksitas kemiskinan memaksa mereka berlaku sebagai orang dewasa kecil yang harus mencari uang untuk mempertahankan hidup dan mengatasi berbagai ancaman. Mereka juga harus berhadapan dengan para pesaing dan pemerasan oleh para preman, dan seringkali dijerumuskan ke dalam penyalahgunaan narkoba, seks bebas, menjadi korban perdagangan untuk prostitusi, diperkosa dan obyek pornografi. Penanganan kriminalitas anak jalanan seringkali lebih keras dari penanganan kriminalitas orang dewasa. Selain itu, ketiadaan identitas menyebabkan mereka dianggap masyarakat liar dan tidak berhak memperoleh layanan publik.

Isu anak jalanan sampai saat ini masih menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah, LSM maupun masyarakat. Apabila tidak segera diatasi maka akan terus berkembang menjadi besar. Konsekuensi logis dari perkembangan kota-kota metropolitan adalah lahirnya kantong-kantong urbanisasi atau migran yang menimbulkan kondisi wilayah penuh sebagai akibat kemiskinan yang dialami oleh warga di wilayah tersebut. Kondisi kemiskinan ini melahirkan

tuntutan untuk kontribusi pendapatan dari seluruh warga agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, tak terkecuali anak-anak di bawah umur.

Oleh karena itu, masalah kemiskinan di daerah perkotaan juga perlu mendapat perhatian. Krisis ekonomi tahun 1997 memperlihatkan masyarakat kota masih rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di perkotaan juga cenderung untuk terus meningkat. Pada umumnya masyarakat miskin perkotaan menjalani pengalaman kemiskinan yang berbeda dengan penduduk miskin pedesaan. Mereka lebih sering mengalami keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan ruang berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta rasa aman dari tindak kekerasan. Pada umumnya masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di pemukiman yang tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran.

Masyarakat miskin perkotaan umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha. Keterbatasan modal, kurangnya keterampilan, dan pengetahuan, menyebabkan masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan peluang yang sempit untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan para orang tua (yang merupakan bagian dari masyarakat miskin tersebut) terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya. Sehingga, ketika peran mereka sebagai motor penggerak perekonomian keluarga sudah tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka mau tidak mau anak harus membantu orang tua dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar mereka. Dan jalanan adalah lokasi yang mereka anggap lebih mudah untuk mendapatkan uang tanpa perlu adanya embel-embel keahlian khusus sebagai sebuah persyaratan, karena mereka memang masih anak-anak yang seharusnya melakukan aktivitas seperti anak-anak pada umumnya (belajar, bermain, dll).

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini sependapat dengan Kirk dan Miller dalam Moleong (2007, h. 4) yang berpendapat bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, juga memungkinkan berubah-ubah sesuai data yang ada di tengah lapangan. Penelitian ini bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif.

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai faktor. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2005, h. 2) bahwa kriteria data dalam penelitian deskriptif adalah data yang pasti, yang sebenarnya terjadi, sebagaimana adanya dan bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. Dalam penelitian ini, akan dijabarkan kondisi konkret dari obyek penelitian, menghubungkan satu faktor atau kondisi dengan faktor atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Dari uraian di atas, alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti akan berusaha menggambarkan bagaimana implementasi model pembinaan anak jalanan ala Rumah Singgah pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang serta memusatkan diri pada pencarian solusi atas kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembinaan melalui evaluasi kritis anak jalanan terhadap implementasi kebijakan.

### 3.2 Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi salah pengertian dan tidak terlalu jauh menyimpang dari tujuan penelitian, maka masalah yang diteliti perlu diberi batasan konseptual atau fokus penelitian secara jelas dan rinci. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan masalah yang ada. Dengan didukung oleh pendapat Moleong (2007, h. 94), yang mengungkapkan bahwa penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, maka tempat penelitian lainnya tidak akan dimanfaatkan lagi. Jadi, peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subyek penelitian, sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya.
2. Menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Jadi, peneliti dapat menentukan sendiri tentang data mana yang dikumpulkan, yang tidak perlu dijamah maupun yang akan dibuang.

Adapun fokus penelitian kerangka pikir peneliti meliputi:

1. Bagaimanakah implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang.
2. Evaluasi kritis anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang terhadap pembinaan ala rumah singgah yang cocok diterapkan bagi mereka (anak jalanan).

### 3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat atau letak dimana peneliti melakukan penelitian untuk mengungkap kebenaran dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Malang Propinsi Jawa Timur, karena disamping jumlah anak jalannya yang banyak, Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang masih menerapkan konsep rumah singgah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Sedangkan situs penelitian di sini adalah letak atau tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Sehubungan

dengan itu, maka yang menjadi situs penelitian ini adalah Rumah Singgah Flamboyan Lembaga Paramitra Jawa Timur. Adapun alasan pemilihan situs penelitian dikarenakan Rumah Singgah Flamboyan merupakan Rumah Singgah di Kota Malang yang masih *survive* dari awal pelayanannya (tahun 1999) hingga saat ini dan berlokasi di Jalan Muharto Gang V Graha Kota Asri Blok H-9 Kotalama Malang, yang merupakan daerah yang paling banyak jumlah anak jalannya dan berpotensi menghasilkan anak-anak jalanan yang lain oleh karena kondisi ekonomi masyarakat yang lemah.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan pendapat Bungin (2001, h. 285-286) bahwa pada penelitian kualitatif ini ada dua jenis data:

1. *Data Kasus*, yakni data yang hanya menjelaskan kasus-kasus tertentu, dalam arti bahwa data kasus berlaku untuk kasus tersebut serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan dengan kasus lain dengan radius yang lebih luas. Data kasus lebih luas dan komprehensif dalam mengekspresikan sebuah obyek penelitian. Data kasus memiliki wilayah yang luasnya tergantung pada seberapa besar penelitian kualitatif tertentu. Dan hal yang terpenting adalah data kasus memiliki batas-batas yang jelas satu dengan lainnya. Kalau penelitian tertentu membicarakan data kasus tertentu, maka kasus lain bukan termasuk wilayah data penelitian tersebut. Oleh karenanya pada penelitian ini dibatasi sebatas wilayah Kota Malang dengan fokus permasalahan penelitian pada "Evaluasi Kritis terhadap Implementasi Model Pembinaan Anak Jalanan ala Rumah Singgah pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang".
2. *Data Pengalaman Pribadi*, adalah sebagai bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu sebagai warga masyarakat tertentu yang menjadi obyek penelitian. Guna dari data semacam ini adalah akan diperoleh suatu pandangan dari dalam melalui reaksi, tanggapan, interpretasi dan penglihatan pada warga masyarakat obyek penelitian, serta dapat memperdalam pengertian secara kualitatif mengenai detail yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi semata.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer, adalah sumber data pertama di lapangan.  
Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, Drs. Mamiék Prasetyo selaku pimpinan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dan Heny selaku pekerja sosial Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang.
2. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diambil dari sumber kedua.  
Dalam penelitian ini data sekundernya adalah keluarga anak jalanan, masyarakat sekitar rumah singgah, instansi terkait seperti Bagian Sosial Kota Malang, LSM Paramitra Jawa Timur, BAPPEKO Malang.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tentu memerlukan adanya data-data, yakni sebagai bahan yang akan dikaji. Dan untuk perolehannya perlu adanya metode yang dipakai sebagai bahan pendekatan. Pada dasarnya, penelitian ini dalam perolehan datanya harus disesuaikan dengan permasalahan dan situasi serta kondisi sosial yang ada. Sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.

Oleh karena itu berdasarkan sifat penelitian yang dipakai, maka metode pengumpulan data yang diperlukan adalah:

1. Observasi atau pengamatan terlibat  
Penggunaan observasi atau pengamatan terlibat sebagai metode pengumpulan data sesuai dengan sifat penelitian ini. Sebab, peneliti harus mencari data sendiri dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan langsung pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dan lokasi-lokasi lainnya termasuk lokasi dimana anak jalanan binaan rumah singgah tersebut melakukan aktivitasnya.
2. Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung atau *face to face* antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara

lisan dengan tujuan memperoleh data yang dapat menjelaskan atau pun menjawab suatu permasalahan penelitian.

3. Sumber-sumber informasi non manusia, seperti dokumen dan rekaman/catatan (*records*) dipandang perlu karena cukup bermanfaat. Selain ia telah tersedia sehingga relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya, juga merupakan sumber yang stabil dan barangkali juga akurat sebagai cerminan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Pengumpulan data dari sumber-sumber non manusia ini digunakan terutama untuk kegunaan tahap eksplorasi menyeluruh. Dokumentasi diperoleh dari Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dan instansi terkait lainnya juga dari sasaran kebijakan yakni anak jalanan itu sendiri.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, instrumen satu-satunya adalah peneliti sendiri. Persoalan reliabilitas dan validitas lebih dimaksudkan pada kelayakan dan kredibilitas yang ada. Pengukuran dan alat ukur dalam instrumen penelitian kualitatif bersifat kualitatif pula, jadi lebih bersifat abstrak tetapi lengkap dan mendalam. Ada beberapa alasan kecenderungan penggunaan instrumen pada penelitian ini, yakni:

1. Instrumen dapat membantu memperoleh data atas dasar kondisi yang telah diketahui.
2. Instrumen berfungsi membatasi lingkungan atau ruang lingkup dengan cara tertentu, maka instrumen juga dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan dari berbagai situasi.
3. Instrumen dapat membuat informasi yang dapat direkam secara permanen untuk dianalisa di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kamera, *tape recorder*, begitu juga melalui hasil tulisan.

### 3.7 Analisis Data

Cara pengolahan dan analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian ini. Dikatakan demikian, pengolahan sekaligus analisis data adalah tahap berlangsungnya proses penentuan pengukuhan pendapat dalam

sebuah penelitian. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat di lapangan (bersamaan dengan proses pengumpulan data akibat prosesnya yang berbentuk siklus) dan juga setelah peneliti meninggalkan lapangan penelitian. Moleong (2007, h. 280) berpendapat bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian.

Beberapa tahap analisis yang digunakan, yaitu:

1. *Tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori*  
Pada tahap ini terdapat dua kegiatan utama yaitu kegiatan pencatatan (*coding*) dan kegiatan memberi komentar terhadap catatan tersebut. Kegiatan analisis dimulai dari mencatat setiap kejadian mengenai sebuah kategori sebanyak mungkin, mulai dari kategori itu muncul.
2. *Tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya*, yaitu tahap untuk membandingkan kejadian yang muncul dengan ciri-cirinya yang dihasilkan dari tahap pertama. Pada tahap pertama dilakukan perbandingan terhadap kejadian-kejadian, kemudian dari kejadian tersebut muncul kategori-kategori kejadian tersebut. Pada tahap ini akan menghubungkan setiap kategori itu dengan cirinya masing-masing.
3. *Tahap membatasi lingkup jenis kategorisasi*  
Pada saat munculnya kategorisasi tersebut terbentuk dari berbagai kategori dan ciri yang mengitarinya. Pada tahap ini, peneliti dapat membatasi kategorisasi tema yang telah terbentuk tersebut berdasarkan relevansi dan menggiringnya ke dalam suatu kategori dan ciri-ciri yang lebih besar.
4. *Tahap menulis dan memformulasikan tema-tema yang potensial* dari suatu kategori dan ciri-ciri yang paling besar menjadi kategorisasi yang mengarah pada tema paten. Dengan kata lain, dapat mengangkat tema sederhana yang telah terbentuk tadi ke tingkat yang lebih tinggi, baik secara terminologis maupun dilihat dari segi muatannya.

Jadi penggunaan analisis ini bertujuan untuk merepresentasikan secara konseptual yang tercermin dari data secara empiris.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 HASIL PENELITIAN

#### 4.1.1 Deskripsi dan Potret Kehidupan Anak Jalanan Kota Malang

Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, tidak luput menjadi sasaran kegiatan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan di Kota Malang sebagai akibat peningkatan arus urbanisasi dan akibat krisis ekonomi yang tak kunjung usai yang terjadi sejak tahun 1997 hingga sekarang, keadaan ini berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin di kota dan berimbas pula pada peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Malang.

Persoalan yang dihadapi oleh anak-anak jalanan di Kota Malang tidak jauh berbeda dengan dengan anak-anak jalanan lainnya di berbagai tempat. Berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan terasa menjadi bagian hidup sehari-hari. Membaca situasi dan kondisi anak jalanan di Kota Malang, kita jumpai berbagai macam persoalan yang melingkupinya. Mengacu pada hak-hak anak, dengan jelas dapat dilihat, bahwa anak jalanan di Kota Malang belum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya. Tidak semua anak yang dilahirkan dapat melalui masa kanak-kanaknya dengan menyenangkan dalam keluarga yang penuh cinta kasih dan berkesempatan mendapatkan pendidikan sebagai bekal masa depannya. Banyak diantara mereka yang tidak bisa bermain dengan teman sebayanya karena harus bekerja membantu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Bahkan diantara mereka rela meninggalkan bangku sekolah karena sudah terpengaruh oleh kebebasan di jalanan.

Perkembangan anak jalanan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan, mengenai jumlah anak jalanan di Kota Malang pada tahun 2003 yang dilansir oleh Dinas Sosial Kota Malang, kurang lebih ada 600-an anak. Tetapi ada yang memperkirakan jumlahnya melebihi angka tersebut, karena adanya kecenderungan munculnya anak jalanan baru terutama di *traffic light*. Adanya peningkatan jumlah anak diduga karena adanya krisis ekonomi yang belum pulih sampai saat ini, yang menyebabkan berbagai perubahan yang menyangkut karakteristik anak jalanan, serta dinamika anak jalanan. Hal tersebut di atas didukung oleh adanya fakta-fakta di lapangan yaitu: adanya peningkatan

jumlah anak jalanan di beberapa lokasi (alun-alun), lampu merah (*traffic light*), besarnya jumlah anak jalanan yang berusia sangat muda, lokasi kegiatan semakin meluas, dan kehadiran anak jalanan yang masih bersekolah semakin banyak. Kehadiran anak jalanan yang masih berusia sangat muda tampaknya lebih banyak dipengaruhi/didorong oleh keluarganya mereka untuk berkontribusi meringankan beban ekonomi keluarga/menambah pendapatan keluarga.

Masalah di dalam keluarga seringkali menyebabkan keberadaan anak dalam keluarga sangat terjepit, dimana anak sering menjadi korban kekerasan orang tua, tidak hanya kekerasan psikologis tetapi fisik pula. Hal ini menyebabkan anak tidak betah di rumah. Anak-anak mencari lingkungan baru (dunia jalanan) yang mereka anggap dapat memberikan rasa aman, memberikan hiburan bahkan dapat menghilangkan rasa tertekan dari kondisi keluarga/rumah.

#### **4.1.2 Lokasi Kegiatan dan Basis Tempat Tinggal Anak Jalanan**

Lokasi kegiatan anak jalanan di Kota Malang telah berkembang semakin meluas di berbagai ruang publik, sehingga saat berada di Kota Malang dimana pun kita bergerak akan dengan mudah kita jumpai keberadaan anak jalanan. Tampaknya kegiatan di jalanan merupakan pilihan yang termudah bagi mereka yang melihat kondisi ekonomi yang sulit sampai saat ini. Lokasi yang dipilih adalah:

##### **4.1.2.1 Kawasan Alun-Alun dan Pusat Pertokoan Kota Malang sebagai Lokasi Pertama Anak Jalanan di Kota Malang**

Seputar Alun-alun Kota Malang merupakan kawasan komersial atau sebagai pusat bisnis yang menjadi *land mark* bagi Kota Malang. Sebagai wilayah publik, Alun-alun Kota Malang, dapat dikatakan sebagai tempat yang bebas bagi siapapun untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk mencari uang atau pun bermalam di sekitar tempat tersebut. Pada masa ini, anak-anak jalanan menjadikan alun-alun sebagai basis kegiatan dan juga sebagai basis tempat tinggal biasanya adalah anak-anak yang bersama orang tua/keluarganya bekerja di jalanan, atau pun anak-anak yang berasal dari perkampungan miskin yang dipaksa oleh orang tuanya mencari uang, dari siang hingga malam hari yang mendapatkan pengawasan dari orang tua mereka. Berikut ini dapat dilihat aktivitas anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen di Alun-Alun Kota Malang.

**Gambar 1**  
**Kelompok Pengamen Anak Jalanan di Alun-Alun Kota Malang**



(Dari Gambar 1 dapat dilihat kelompok anak jalanan sedang mengamen menghibur pasangan pemuda dan pemudi yang sedang menikmati suasana Alun-Alun Kota Malang yang tak pernah sepi pengunjung terutama pada hari-hari libur)

Anak-anak jalanan ini sebagian besar berusia 4 – 17 tahun dengan kegiatan utama mengamen dan mengemis (bagi anak jalanan perempuan) dengan sasaran para pengunjung yang sedang menikmati suasana Kota Malang, dan juga sebagian dari penumpang mikrolet yang menunggu keberangkatan. Kehadiran anak jalanan dari berbagai lokasi biasanya dilakukan secara berkelompok. Kegiatan mencari uang dengan jalan mengamen secara berkelompok, biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makan atau untuk membeli minum-minuman keras dan membeli pil untuk mabuk dengan harga @ Rp. 400/butir pil. Kebiasaan ini sudah dilakukan oleh anak-anak yang umumnya pengamen dengan alasan karena ingin sekali untuk minum dan mencicipinya. Begitu juga dengan anak jalanan yang perempuan, sudah mulai mengarah pada kegiatan minum-minuman keras karena hanya sekedar ingin sekali merasakan bagaimana rasanya mabuk, tetapi tentunya tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Penghasilan dari mengamen yang dilakukan oleh anak jalanan setiap harinya bisa mencapai Rp. 25.000,00 yang terkadang dibagi 4 anak. Tidak hanya itu selain mengamen terkadang anak-anak juga melakukan “polisi cepek” istilah yang biasa disebut untuk anak jalanan yang bekerja dengan meminta uang kepada pengendara yang akan melintas di pertigaan

jalan. Kegiatan ini dilakukan apabila anak sudah mendapatkan penghasilan sedikit dari mengamen.

Interaksi antara anak jalanan yang berada di kawasan Alun-Alun terjalin dengan baik. Jarang terjadi keributan di antara mereka, walaupun itu terjadi disebabkan oleh persoalan salah paham antar mereka, perselisihan yang telah muncul sebelumnya ada pula yang berkaitan dengan rebutan pacar perempuan. Masalah pacaran antar sesama anak jalanan di Alun-Alun Malang sudah mulai nampak, dimana hal ini karena seringnya berkumpul dan “*pacok-pacok'an*” istilah dalam Bahasa Indonesia yang kurang lebih artinya “jodoh-jodohan”. Terkadang ada juga yang dilarang oleh orang tua karena tidak menginginkan anaknya terlibat pacaran dengan sesama anak jalanan. Jika sudah diketahui oleh orang tua, biasanya anak jika ingin bertemu maka mereka harus sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan orang tua).

Pada perkembangan selanjutnya, keberadaan anak jalanan mulai merambah lokasi pertokoan terutama plasa dan mall di sekitar Alun-Alun. Kegiatan yang dilakukan adalah menjadi penyemir sepatu, pengamen *icik-icik*, dan pengemis.

### Gambar 2

#### Anak jalanan yang mengemis di sekitar Alun-Alun mall (Ramayana)



(Pada gambar 2 dapat diketahui bahwa teriknya matahari tidak mengurungkan niat anak jalanan untuk tetap mengemis. Ini semua bisa jadi karena mereka diawasi orang tua di sekitar tempat kegiatan mereka)

Beberapa titik yang dijadikan lokasi tempat mangkal adalah Mc. Donald, Alun-alun Mall (Ramayana), Gajah Mada Plasa, Malang Plasa, Rumah Makan Dundee, dan Rumah Makan Siswa. Sebagaimana situasi umum di berbagai lokasi, diduga ada penyeleksian secara alamiah bagi anak-anak untuk bertahan hidup atau meninggalkan dunia jalanan. Anak jalanan yang masih dominan berada di kawasan ini adalah anak-anak yang berusia muda yang berada dalam pengawasan orang tua atau anggota keluarganya saat kegiatan mencari uang di jalan.

#### **4.1.2.2 Kawasan Pertokoan Pasar Besar Malang (PBM) Kota Malang**

Sebagai salah satu pasar induk yang masih aktif hingga saat ini, kegiatan ekonomi di pasar ini hampir tidak pernah berhenti selama 24 jam setiap harinya. Kegiatan untuk memperoleh uang yang dilakukan oleh anak jalanan di kawasan ini adalah pengamen, asongan, dan pengemis. Kegiatan mengemis pada mulanya dilakukan oleh anak-anak perempuan yang dilakukan secara berkelompok yang diawasi oleh anggota keluarganya.

#### **Gambar 3**

**Kegiatan bagi hasil mengemis anak jalanan dengan orang tuanya yang juga berprofesi sebagai pengemis di kawasan Pasar Besar Malang**



(Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa anak jalanan perempuan lebih banyak dieksploitasi oleh orang tua mereka dibandingkan anak jalanan laki-laki untuk mengemis di jalanan oleh karena perspektif gender yang masih melekat pada paradigma masyarakat, sehingga lebih mudah mendapat belas kasihan)

Bagi anak jalanan yang melakukan aktifitas mengamen di pertokoan kawasan Pasar Besar Kota Malang, saat ini tergabung dalam kelompok musisi jalanan (KMJ) Malang yang beranggotakan kurang lebih 60-an orang. Tujuan dari terbentuknya KMJ ini adalah sebagai sarana dan wadah komunikasi antar anak jalanan, karena selama ini, sering terjadi pemerasan dan ancaman kepada pemilik toko jika tidak memberikan uang waktu mengamen. Hal ini sempat merusak nama kelompok pengamen jalanan. Pernah terjadi razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (dinas ketertiban dan kebersihan kota selanjutnya disebut Satpol PP) karena adanya laporan dari pemilik toko yang mengalami pemerasan oleh anak jalanan.

KMJ dibentuk dengan tujuan agar anak jalanan yang mengamen di daerah Pasar Besar dapat diatur dengan baik mengingat semakin banyaknya anak yang mengamen di daerah tersebut. Selain itu tujuan dibentuk KMJ adalah untuk mengajak dan mempengaruhi anak jalanan yang mengamen di daerah Pasar Besar agar tidak berbuat hal-hal yang kurang baik atau merugikan pemilik toko/orang lain. Salah satu kegiatan KMJ adalah melakukan pertemuan rutin tiap 1 bulan sekali, membuat kartu anggota. Adanya KMJ bagi anak jalanan juga dapat dijadikan sebagai pelindung bagi anak jalanan yang mendapat perlakuan kurang baik terhadap dirinya.

#### **4.1.2.3 Kawasan Perempatan Rampal**

Perempatan rampal adalah lokasi pertama kegiatan di seputar *traffic light* dan pernah menjadi pusat berkumpul para anak jalanan dari berbagai lokasi di wilayah Kota Malang. Lokasi ini merupakan sebuah tempat yang cukup strategis di Kota Malang. Di sebelah Utara perempatan ini terdapat lapangan milik TNI yang cukup luas, yang biasa dijadikan salah satu ruang publik bagi warga Malang. Sebuah tugu yang berada di sudut pojok sebelah Barat merupakan salah satu monumen bersejarah yang ada di Kota Malang, yang merupakan simbol untuk mengenang peristiwa perjuangan rakyat melawan penjajah. Di kawasan perempatan tersebut dapat dikatakan sebagai lokasi yang pertama bagi anak jalanan di Kota Malang yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan uang dari kegiatan di jalan. Diperkirakan lebih dari 20-an anak-anak jalanan yang berasal dari kampung-kampung miskin menjadikan tempat itu sebagai basis kegiatannya.

Di sekitar perempatan tersebut dalam tahap selanjutnya berkembang menjadi tempat tinggal anak jalanan. Dimana anak-anak jalanan tidur di sembarangan tempat yang terlindung seperti di belakang patung perjuangan, di selokan, dan ada pula yang tidur di atas pohon dengan membuat tempat tidur dari kain spanduk yang mereka peroleh di sekitar lapangan. Semenjak perempatan jalan ini dijadikan sebagai lokasi kegiatan anak jalanan, maka keberadaan mereka menjadi mudah dilihat oleh publik. Terlebih lagi jika mereka berada disuatu lokasi terbuka yang sangat strategis di Kota Malang. Sehingga keberadaan anak jalanan di wilayah ini menjadi perhatian masyarakat luas dan memunculkan berbagai reaksi dan komentar yang cenderung negatif.

**Gambar 4**  
**Anak-anak jalanan yang mengamen di perempatan lampu merah depan Lapangan Rampal**



(Pada gambar 4 dapat diketahui bahwa perempatan lampu merah banyak dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengais rejeki ketika kendaraan sedang berhenti)

Sepanjang perjalanan kehidupan anak jalanan di Kota Malang, anak-anak yang berada di lokasi tersebut paling banyak mendapatkan sorotan dari publik, dengan berbagai pokok persoalan seperti mengganggu ketertiban umum, perilaku seksual bebas, dan sebagainya. Melihat fenomena tersebut, pihak kepolisian dan Satpol PP kerap kali melakukan razia dengan cara kekerasan yaitu berupa penangkapan secara kasar, penyitaan, perampasan, dan perusakan alat-alat yang digunakan anak jalanan. Pengalaman anak jalanan di kawasan ini yang melakukan hubungan seksual aktif sudah bisa dideteksi semenjak tahun 1999. Rata-rata anak yang melakukannya berumur 15 tahun ke atas dan terkadang anak yang berusia di

bawah 15 tahun. Biasanya mereka melakukannya dengan Wanita Tuna Susila (WTS) yang berada di sekitar Stasiun Kota Baru Malang dan terkadang dengan sesama anak jalanan yang kebetulan juga bertempat tinggal dengan mereka. Tempat yang biasa digunakan untuk berhubungan seksual adalah di bawah jembatan di sebelah Utara stasiun.

Selain itu kebiasaan berperilaku bebas dengan berhubungan seks antarsesama anak jalanan atau WTS, biasanya setiap harinya anak jalanan juga menggunakan penghasilan yang diperolehnya untuk bermain PS (*Play Station*) yang juga kebetulan satu tempat dengan permainan Bilyard yang biasanya digunakan oleh orang dewasa untuk nongkrong pada malam harinya.

### **4.1.3 Deskripsi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**

#### **4.1.3.1 Sejarah**

Kampung Monas-Muharto Malang merupakan salah satu perkampungan yang menjadi basis tempat tinggal anak jalanan. Kampung yang terletak di sebelah Timur Kota Bedah yang diapit oleh dua aliran sungai besar di Kota Malang, yaitu sungai Brantas dan Bango, ini awalnya adalah sebuah perbukitan kawasan makam/kuburan cina, dimana di kawasan ini pernah menjadi angker karena sebagai tempat persembunyian para penjahat dan sekaligus sebagai tempat prostitusi bagi WTS yang menjajakan dirinya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seorang penduduk yang telah menetap di kampung sejak tahun 1960-an, ketika pertama kali datang di kampung ini, 1/3 lahan di wilayah tersebut masih banyak yang berupa semak belukar. Sedangkan sisanya digunakan untuk pemakaman dan permukiman bagi penduduk yang terutama tinggal di pinggir-pinggir sungai. Menurutnya, ada sekitar 100 rumah yang sudah dibangun dan ditempati warga pada saat itu. Informasi dari penduduk yang lain, rumah-rumah yang berdiri dari tahap awal, banyak dibangun di bekas makam yang telah diratakan terlebih dahulu. Pada perkembangannya, di atas lahan tersebut sudah berdiri bangunan-bangunan yang dihuni oleh para pendatang yang umumnya bekerja di sektor informal, ada sebagian yang sudah memiliki sertifikat tanah dan sebagian hanya mendapatkan hak guna bangunan saja.

Kegiatan anak-anak yang berasal dari Kampung Monas Muharto di jalanan mulai terlihat sejak tahun 1990-an. Yang diawali oleh beberapa orang anak laki-laki yang menjadi seorang penyemir di Balai Kota dan di Kantor Bupati Malang. Beberapa anak kemudian mulai turun ke jalan sebagai penyemir dimana untuk lokasinya di beberapa rumah makan. Pada awal tahun 1997, jumlah anak kampung monas yang menjadi anak jalanan mengalami peningkatan. Berdasarkan dari hasil pendataan dari Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang yang dilakukan pada pertengahan tahun 1999 yang berada di RW. 08 dan meliputi beberapa RT, tercatat kurang lebih ada 60 anak yang berumur di bawah 18 tahun. Dari hasil pengamatan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan jumlah anak-anak yang turun ke jalan terus mengalami peningkatan dan adanya regenerasi anak jalanan. Dimana hal ini biasanya terjadi mengingat usia anak yang bertambah, dan rasa malu mulai ada pada dirinya pada saat anak sudah berada di bangku SLTP.

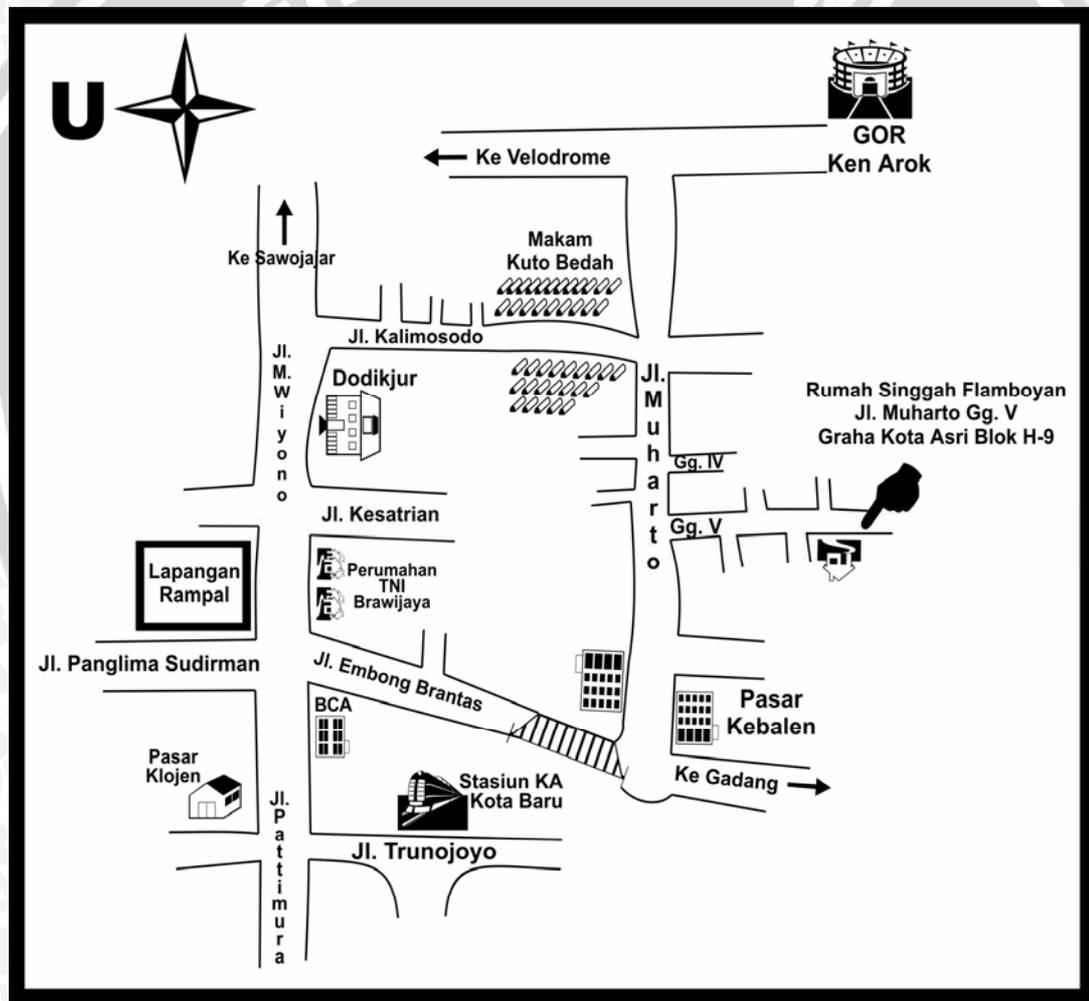
Pada saat seputar Alun-alun Kota Malang, Pusat Pertokoan, Pasar besar Malang, dan daerah strategis yang lainnya diantaranya juga Balai Kota telah menjadi lokasi kegiatan untuk mendapatkan uang, hampir semua anak jalanan yang berasal dari kampung Monas, berada di lokasi tersebut, yang berbaur dengan anak jalanan lainnya yang berasal dari berbagai daerah (masih masuk wilayah kota Malang) dan sebagian dari luar kota. Pada tahun awal 1999, Alun-alun Kota Malang mulai dijadikan basis kegiatan anak jalanan yang berasal dari kampung Monas Muharto, beberapa orang tua dan anak-anak, khususnya ibu-ibu juga terlihat melakukan kegiatan di jalanan bersama-sama dengan anak-anaknya yang berprofesi sebagai pengemis. Pada perkembangan selanjutnya, mulai berdatangan anak-anak atau keluarga-keluarga dari berbagai wilayah di Kota Malang melakukan kegiatan serupa di pusat kota.

Kampung Monas selain merupakan basis keberadaan anak jalanan, daerah tersebut dulu juga dikenal sebagai tempat kriminalitas bagi pencopet (penipuan). Penipuan biasanya dilakukan oleh kalangan anak jalanan secara berkelompok, dimana kegiatan ini biasanya disebut sebagai “Nya’dong”. Istilah ini biasanya dilakukan secara berkelompok dengan berbagai cara diantaranya penipuan dengan pura-pura menuduh si korban mencelakai adiknya atau si korban dituduh telah

menganiaya salah satu anggota keluarganya. Selain itu cara yang paling kasar yang sampai saat ini dilakukan oleh sebagian orang yang bertempat tinggal di Monas adalah pencopetan secara berkelompok, dimana masing-masing anak mempunyai tugas sendiri-sendiri yaitu ada yang sebagai pengawas daerah sekitar apabila ada aparat keamanan, sebagai pelempar hasil copetan dan ada yang sebagai tempat lemparan (estafet). Untuk sistem hasil curian biasanya dibagi rata.

Lokasi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dapat diketahui melalui denah lokasi yang tersedia di bawah ini:

**Gambar 5**  
**Denah Lokasi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**



(Gambar 5 menunjukkan lokasi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dekat dengan tempat dimana anak jalanan beraktifitas, sehingga memungkinkan pihak rumah singgah lebih mudah menjangkau dan melakukan pendampingan terhadap mereka (anak jalanan))

Mengacu dari hasil pendampingan anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang di wilayah kampung Monas, yang merupakan basis tempat tinggal anak jalanan terungkap bahwa pengaruh teman sebaya di sekitar tempat tinggal anak sangat berperan besar. Terlebih lagi jika dorongan tersebut didukung oleh pihak keluarga si anak. Hal inilah yang nampak terjadi di Kampung Monas-Muharto Kotalama Malang, sebagaimana didukung pula oleh sebagian besar pernyataan anak-anak jalanan di kampung tersebut, bahwa alasan mereka ke jalan untuk pertama kalinya diajak oleh teman yang terlebih dahulu berada di jalan.

Para orang tua dan masyarakat setempat yang awalnya memandang dan menyikapi anak jalanan merupakan sesuatu yang tidak baik, tetapi pada perkembangan lebih lanjut mengalami perubahan. Warga masyarakat pada akhirnya melihat bahwa anak-anak yang melakukan kegiatan di jalanan dan mampu menghasilkan uang untuk membiayai diri si anak maupun keluarganya. Perubahan pandangan ini disebabkan karena kondisi kehidupan yang sangat sulit yang harus mereka hadapi yaitu krisis ekonomi. Pada masa itu penghasilan yang mereka peroleh tidak cukup untuk menjangkau pemenuhan kebutuhan pokok, terutama sembako. Terlebih lagi bagi sebagian besar mereka yang bekerja di sektor informal. Sebagai contoh adalah para orang tua anak jalanan yang bekerja sebagai penarik becak, pemulung, asongan. Tidaklah mengherankan apabila kemudian mereka melakukan sikap membiarkan, memberikan dukungan, bahkan mendorong anak-anak mereka bekerja di jalanan.

Di sisi lain, keberadaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang yang memberikan program-programnya baik yang ditujukan pada anak-anak dan keluarganya yang salah satu bentuk kegiatannya adalah dengan memberikan bantuan modal usaha, turut mempengaruhi para orang tua untuk tidak mendorong anaknya ke jalanan. Pelibatan orang tua anak jalanan yang tergabung dalam perkumpulan orang tua anak jalanan, yang difasilitasi oleh Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, merupakan sebagai sarana untuk mempengaruhi orang tua anak jalanan, untuk melakukan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan anak agar keluar dari jalanan, dengan memberikan gambaran tentang situasi yang buruk jika anak-anak mereka bekerja di jalanan.

Kadangkala upaya yang dilakukan oleh rumah singgah yang berupaya mengentaskan anak-anak dari dunia jalanan, seringkali berhadapan dengan para orang tua yang tidak sepakat anak-anaknya harus berhenti mencari uang dari jalan. Perdebatan tersebut sering kali terjadi ketika para pekerja sosial melakukan kunjungan ke rumah para orang tua anak jalanan. Hanya saja pada perkembangan selanjutnya, sebagian dari orang tua anak jalanan juga tidak berdaya ketika anak-anak mereka terpengaruh oleh anak yang lainnya untuk turut melakukan kegiatan di jalanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarganya. Berikut curahan hati salah satu orang tua anak jalanan binaan ketika diwawancarai di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang pukul 09.15 WIB: “ya, mau bagaimana lagi, saya lebih senang kalau anak-anak itu tidak kerja di jalanan. Tapi kalau diberitahu, anaknya malah minggat (kabur) dari rumah”, yang merupakan ungkapan salah satu dari orang tua anak jalanan, dimana seluruh anggota keluarganya bekerja di jalanan.

Selain dikenal sebagai kampung basis anak jalanan, kampung Monas-Muharto sesungguhnya bisa juga dikatakan sebagai basis tempat tinggal para pengemis, yang oleh sebagian dari warga ada yang menyebutnya berprofesi sebagai “*penjual emas*” yang diambil dari kata yang sering mereka ucapkan waktu mengemis yaitu: “*mas minta mas, nyuwun mas, dll*”. Pada masa krisis, menurut salah seorang ketua RT ketika banyak warganya yang mengalami kesulitan pekerjaan akibat krisis, dan kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi, ada sebagian warga yang kembali menjadi pengemis. Pada saat ini, setidaknya ada sekitar 20-an orang, termasuk juga didalamnya kaum perempuan yang berumur di atas 40-an tahun bekerja sebagai pengemis. Berbeda dengan para pendahulunya yang mengemis dengan cara *ngampung*, pada masa krisis ini mulai merambah ke tempat-tempat strategis (perempatan jalan, alun-alun, pasar besar, dan di jalan-jalan poros di sekitar Alun-alun Kota Malang).

Pola baru yang muncul dari kegiatan ketika mereka mengemis adalah dengan mengajak anak-anak mereka. Awalnya yang dibawa adalah anak-anak usia balita, dengan alasan kalau ditinggal di rumah maka tidak ada yang akan menjaganya, mengasuh serta memberikan makan. Pada perkembangan selanjutnya mereka juga mengajak anak-anak mereka yang lebih besar yang masih

belajar di Sekolah Dasar. Sedikitnya ada sekitar 10-an anak-anak dari kampung Monas yang bekerja sebagai pengemis. Sejak tahun 1999, Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang aktif melakukan pendekatan terhadap komunitas mereka. Setelah melalui proses panjang, akhirnya mereka mulai menerima para pendamping. Hanya saja, sampai saat ini pun masih ada sebagian dari orang tua yang masih melarang anaknya ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh rumah singgah, dan bila diketahui mereka akan dimarahi. Pada proses ini pendekatan terhadap orang tua tetap ditingkatkan yang hingga akhirnya mereka benar-benar akan bersedia mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan yang dilangsungkan oleh Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang.

#### **4.1.3.2 Status Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**

Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang merupakan badan hukum berbentuk yayasan atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dimana rumah singgah berperan sebagai tim pelaksana program pembinaan bagi anak jalanan, berada dalam naungan Lembaga Paramitra Jawa Timur.

#### **4.1.3.3 Gedung**

Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang gedungnya menyewa/kontrak secara tahunan. Adapun operasional lapangan untuk program pendampingan. Kondisi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dilengkapi dengan satu unit sepeda motor.

#### **4.1.3.4 Struktur Organisasi**

Pengelola rumah singgah dipilih dan diangkat oleh ketua Lembaga Paramitra Jawa Timur dengan struktur organisasi berikut ini:

## STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SINGGAH FLAMBOYAN KOTA MALANG



### 4.1.3.5 Fungsi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang

- Sebagai tempat pertemuan (*meeting point*) pekerja sosial dan anak jalanan  
 Dalam hal ini sebagai tempat untuk terciptanya persahabatan dan keterbukaan antara anak jalanan dengan pekerja sosial dalam menentukan dan melakukan berbagai aktivitas pembinaan.
- Pusat diagnosa dan rujukan  
 Dalam hal ini rumah singgah berfungsi sebagai tempat melakukan diagnosa terhadap kebutuhan dan masalah anak jalanan serta melakukan rujukan pelayanan sosial bagi anak jalanan.

- Fasilitator atau sebagai perantara anak jalanan dengan keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
- Perlindungan
- Pusat informasi tentang anak jalanan.
- Kuratif dan rehabilitatif, yaitu fungsi mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak.
- Akses terhadap pelayanan, yaitu sebagai persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial.
- Resosialisasi

Rumah singgah dipandang sebagai tempat berlindung dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menimpa anak jalanan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Lokasi rumah singgah yang berada di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu upaya mengenalkan kembali norma, situasi dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan. Sehingga anak jalanan dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

#### 4.1.3.6 Visi dan Misi

- **Visi Pendampingan**

Terwujudnya keberadaan anak yang kurang beruntung mendapatkan hak-haknya secara wajar dan adil dengan perspektif *gender* dan lingkungan.

- **Misi Pendampingan**

1. Meningkatkan kapasitas anak-anak yang kurang beruntung (buruh anak/pekerja anak, anak jalanan, anak tereksplorasi, anak *marginal*, anak miskin dan terlantar) untuk mendapatkan hak-haknya.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pemberdayaan anak.

#### 4.1.3.7 Tujuan

- **Tujuan Umum**

Dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

- **Tujuan Khusus**

1. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Mengupayakan anak-anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
3. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif.

#### 4.1.3.8 Sistem Pendanaan

Berdasarkan hasil wawancara, pendanaan untuk program Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang diperoleh dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan bantuan dari para dermawan. Jika dikaitkan antara perolehan dana dengan layanan yang diberikan kepada sasaran, keterkaitannya dengan mencari format pembinaan yang tepat maka dapat disimpulkan bahwa besar kecil dana tidaklah begitu berarti tergantung dari kelihaihan dalam pemberian format layanan. Berikut cuplikan wawancara dengan pimpinan rumah singgah:

“Dana yang kami gunakan selama ini sebagian besar dibantu oleh dana dari pemerintah (Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur) dan sebagian kecil pada program-program tertentu dibantu oleh para dermawan. Itu pun jarang sekali mbak. Dana yang ada digunakan semaksimal mungkin pada program pembinaan anak jalanan. Meskipun rumah singgah kami masih kontrak dan hanya memiliki satu kendaraan berupa sepeda motor sebagai alat penunjang yang berlangsung, tapi menurut kami yang paling penting adalah bagaimana program kami dapat direalisasikan secara maksimal”. (Wawancara tanggal 5 Maret 2007, pukul 10.35 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

Mengenai sistem pendanaan, secara struktural organisasi karena rumah singgah ini ada yayasan/lembaga yang menaunginya, yakni Lembaga Paramitra Jawa Timur, maka sistem pendanaan melalui jalur yayasan. Perencanaan anggaran dilakukan oleh pimpinan rumah singgah dan selanjutnya diajukan kepemimpinan

yayasan untuk diperiksa dan disetujui. Untuk tindak lanjut setelah program dilaksanakan maka kewajiban pengelola rumah singgah untuk melaporkan segala kegiatan dan pendanaan kepada yayasan yang bersifatnya per tahun. Dan yang melakukan tindak pengawasan keuangan adalah pihak dari yayasan yang diberi tanggung jawab masalah keuangan.

Mengenai realisasi program berkaitan dengan pendanaan langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan rumah singgah yang dibantu oleh bendahara dan petugas-petugas tertentu yang menyangkut masalah keuangan seperti petugas yang membayarkan beasiswa ke sekolah-sekolah dimana anak jalanan bersekolah. Intinya keuangan keluar berdasarkan tugas masing-masing yang akhirnya dilaporkan kepada bendahara berdasarkan bukti yang ada yakni berupa bon/nota pembayaran.

#### **4.1.4 Deskripsi Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**

Secara umum, peneliti akan mendeskripsikan kondisi anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang berdasarkan jumlah, wilayah/kantong anak jalanan, usia, jenis pekerjaan, pendidikan, jam kerja (lama bekerja), dan jenis kelamin anak jalanan.

##### **4.1.4.1 Jumlah Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**

Keberadaan anak jalanan memang sudah sewajarnya memerlukan pengakuan dan memperoleh pembinaan yang sewajarnya. Pada hakikatnya pengakuan tersebut adalah proses interaksi dan sosialisasi untuk mencapai pemahaman timbal balik antarpihak yang saling membutuhkan kesempatan dan fasilitas untuk berusaha.

Pada tahun 2005 anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang berjumlah 105 anak, dimana mereka terbagi menjadi 3 kategori yakni yang hidup dan bekerja di jalanan sebanyak 6 anak, bekerja di jalanan berjumlah 88 anak, dan yang rentan hidup dan bekerja di jalanan berjumlah 11 anak. Namun, pada tahun 2006 jumlah anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang mengalami penurunan yakni sebanyak 70 anak jalanan saja. Untuk lebih

rinci jumlah anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**

No	Kondisi Anak Jalanan	Jumlah	Prosentase
1	Hidup dan bekerja di jalanan	6 anak	8,6 %
2	Bekerja di jalanan	46 anak	65,7 %
3	Rentan	18 anak	25,7 %
<b>Jumlah</b>		<b>70 anak</b>	<b>100 %</b>

**Sumber:** Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2006 jumlah anak jalanan yang rentan hidup dan bekerja di jalanan mengalami kenaikan menjadi 18 anak dibandingkan dengan anak jalanan yang hidup dan bekerja di jalanan yang mengalami stagnansi. Justru yang mengalami penurunan adalah jumlah anak jalanan yang bekerja di jalanan yakni menjadi 46 anak.

Penurunan jumlah anak jalanan binaan ini disebabkan oleh anak jalanan lepas dari program pembinaan dikarenakan usia mereka yang bukan kategori anak lagi yakni usia  $\geq 18$  tahun, adanya pemikiran dari anak jalanan binaan yang telah bosan menjadi anak jalanan dan ingin mencari pekerjaan yang sewajarnya dan mendapatkan penghasilan yang selayaknya. Hal tersebut bahkan disebabkan oleh anak jalanan itu sendiri yang telah meninggalkan rumah singgah atau dengan kata lain ia sudah tidak pernah berkunjung lagi ke rumah singgah yang mendampinginya.

#### 4.1.4.2 Wilayah/Lokasi/Kantong Anak Jalanan

Wilayah kerja anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang tersebar di wilayah Kota Malang atau di tempat-tempat umum. Wilayah kerja anak jalanan yang biasa untuk mengais rejeki atau tempat mangkal kerja mereka dalam beroperasi sehari-hari meliputi wilayah: Pasar Besar Kota Malang, Alun-Alun Kota Malang, Pertokoan (Mitra I, Siswa, Gajah Mada, Plasa Malang), Perempatan Kawi, Perempatan Rampal, dan Muharto. Berikut ini merupakan tabel keterangan jumlah anak jalanan pada tiap-tiap wilayah kerja mereka serta jenis pekerjaan yang digeluti:

**Tabel 4**  
**Wilayah/Lokasi/Kantong Anak Jalanan**

No	Lokasi/Kantong Anak Jalanan	Jumlah	Aktifitas yang dilakukan
1	Pasar Besar Kota Malang	8 anak	Pengamen, pengemis
2	Alun-alun Kota Malang	17 anak	Pengamen, pengemis
3	Pertokoan (Mitra I, Siswa, Gajah Mada, Plasa Malang)	26 anak	Jual Koran, semir sepatu, asongan, pengemis, pengamen
4	Perempatan Kawi	2 anak	Pengamen
5	Perempatan Rempal	5 anak	Pengamen
6	Muharto	2 anak	Pemulung

**Sumber:** Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa anak jalanan binaan Rumah singgah flamboyan kota malang yang beraktifitas di Pertokoan (Mitra I, Siswa, Gajah Mada, Plasa Malang) lebih banyak daripada lokasi lainnya yakni terdapat 26 anak jalanan. Hal ini dikarenakan oleh adanya aktifitas yang dilakukan oleh banyaknya pengunjung pertokoan di tempat tersebut mengingat bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makin banyak yang berkunjung, makin banyak pula pendapatan para anak jalanan. Oleh karena itu, pusat pertokoan selalu ramai dengan anak jalanan yang mencari uang.

Peringkat kedua ditempati oleh wilayah operasi anak jalanan binaan di Alun-alun Kota Malang sebanyak 17 anak, dan selanjutnya di Pasar Besar Kota Malang berjumlah 8 anak. Jumlah anak jalanan binaan yang paling sedikit beroperasi di Perempatan Kawi, Perempatan Rempal, dan Muharto. Ketiga wilayah kantong anak jalanan ini masing-masing terdapat 2 anak jalanan yang beroperasi.

Jika dilihat dari jenis pekerjaan yang mereka geluti maka profesi sebagai pengamen menempati posisi tertinggi, karena secara otodidak mereka telah menguasai permainan alat musik gitar. Atau pengamen “icik-icik” yang memanfaatkan belas kasihan masyarakat, biasanya hanya menggunakan sebatang kayu kecil dan beberapa tumpukkan tutup botol (yang disusun seperti meniskus) sebagai alat musik mereka dan cukup menyanyi tidak karuan dengan nada

yang sumbang (atau malah tidak mengeluarkan suara sedikit pun) maka optimis mereka langsung mendapatkan uang dari masyarakat. Sebuah cara yang sangat mudah untuk mendapatkan uang.

Di samping mengamen, profesi pengemis juga bersaing di kalangan anak jalanan binaan terutama anak jalanan binaan yang masih berusia 7 tahun ke bawah dan anak jalanan perempuan. Biasanya profesi ini lebih banyak dilakukan oleh anak jalanan perempuan, karena anak perempuan mampu menarik simpati dan rasa kasihan dari masyarakat. Hal ini tidak lepas dari stigma masyarakat bahwa perempuan sudah seharusnya dilindungi karena kodratnya yang lemah apalagi jika ia berada di jalanan. Selanjutnya penjual koran, semir sepatu, pedagang asongan dan pemulung juga profesi anak jalanan yang masih digeluti meskipun tidak terlalu banyak jumlahnya.

#### 4.1.4.3 Usia Anak Jalanan

Data mengenai usia ini dikelompokkan menjadi empat golongan umur terakhir. Usia narasumber dapat diketahui dengan menanyakannya langsung saat penelitian dilakukan, yang dinyatakan dalam tahun dan usia ulang tahun terakhir. Kategori usia anak jalanan yang menjadi binaan yang dipakai mengikuti standar Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur yang berpedoman pada Konvensi Hak Anak yakni yang berusia 18 tahun ke bawah.

Lebih jelas untuk mengetahui usia anak jalanan binaan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dapat dikaji dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Usia Anak Jalanan**

No	Usia Anak	Jumlah	Prosentase
1	< 12 tahun	26 anak	37,1 %
2	> 12 tahun - < 16 tahun	29 anak	41,4 %
3	16 – 18 tahun	13 anak	18,6 %
4	> 18 tahun	2 anak	2,9 %
<b>Jumlah</b>		<b>70 anak</b>	<b>100 %</b>

**Sumber:** Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang

Pada tabel yang tersaji pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang didominasi oleh umur >12 – < 16 tahun, yakni sebesar 41,4 %. Selanjutnya, pada umur < 12 tahun dan 16 tahun – 18 tahun yakni sebesar 37,1 % dan 18,6 %. Persentase yang paling kecil menunjukkan bahwa anak jalanan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang berumur lebih dari 18 tahun, yakni sebesar 2,9 %.

Pada tabel tersebut anak jalanan yang berusia 16 tahun ke bawah mempunyai jumlah sebesar 78,5%, dan sisanya sebesar 21,5% mereka berusia di atas 16 tahun. Lebih rendahnya golongan umur 16 tahun ke atas disebabkan pada umumnya mereka mulai meninggalkan pekerjaan informal di jalanan dan sangat dimungkinkan untuk mencari atau mendapatkan jenis pekerjaan yang lebih formal. Mereka yang berumur kurang dari 16 tahun mempunyai persentase terbesar dikarenakan mereka menganggap bahwa pada usia tersebut paling cocok untuk bekerja sebagai anak jalanan.

#### 4.1.4.4 Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan anak jalanan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang tidak berbeda dengan jenis pekerjaan anak jalanan pada umumnya seperti pengamen, penjual koran, pedagang asongan, pengemis dan pemulung. Untuk lebih jelasnya jenis pekerjaan anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dapat dikaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6**  
**Jenis Pekerjaan**

No	Pekerjaan Anak	Jumlah Anak	Jenis Kelamin
1	Asongan	10 anak	L = 8 anak P = 2 anak
2	Semir sepatu	9 anak	L = 19 anak
3	Pemulung	8 anak	L = 7 anak P = 1 anak
4	Pengamen	29 anak	L = 26 anak P = 14 anak
5	Pengemis	9 anak	L = 4 anak P = 5 anak
6	Polisi cepek	5 anak	L = 7 anak

**Sumber:** Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang

Berdasarkan hasil penyajian tabel 6, jenis pekerjaan anak jalanan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang sebagian besar sebagai pengamen jalanan, yakni sebanyak 29 anak. Selanjutnya pada urutan kedua, sebanyak 10 anak bekerja sebagai pedagang asongan, dan persentase yang paling kecil bekerja sebagai “polisi cepek”, yakni hanya berjumlah 5 anak.

Rendahnya jumlah anak jalanan yang menekuni jenis pekerjaan seperti “polisi cepek” disebabkan jenis pekerjaan ini hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu saja bahkan sudah lebih dahulu ditempati oleh orang-orang dewasa, tidak seperti jenis pekerjaan lainnya yang ladang usahanya lebih banyak.

#### 4.1.4.5 Pendidikan Anak Jalanan

Komposisi anak jalanan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang menurut tingkat pendidikan akan dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pendidikan anak jalanan, di samping dapat digunakan sebagai indikator tinggi kemajuan komunitas anak jalanan.

Hasil penelitian tingkat pendidikan anak jalanan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, pendidikan terendah adalah tidak sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau SMK. Hasil penelitian tingkat pendidikan anak jalanan secara lengkap di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
**Pendidikan Anak Jalanan**

No	Pendidian	Tingkatan	Jumlah Anak
1	Sekolah	SD/MI	29 anak
		SLTP	18 anak
		SMK/SLTA	7 anak
2	Tidak sekolah		16 anak

**Sumber:** Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang sebagian besar adalah se-tingkat Sekolah Dasar atau SD/MI yakni sebanyak 29 anak, disusul Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yakni sebanyak 18 anak. Kendati pun dalam jumlah kecil dijumpai anak jalanan yang tidak sekolah yakni sebanyak 16 anak.

Kondisi pendidikan ini jelas menunjukkan bahwa anak jalanan masuk pada kategori berpendidikan rendah.

Besarnya jumlah anak jalanan yang berpendidikan SD ini antara lain disebabkan karena sebagian dari mereka tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena merasa telah dapat mencari nafkah sendiri. Anak jalanan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang yang berpendidikan SLTA tergolong rendah, yakni hanya sebanyak 7 anak. Mereka yang berpendidikan SLTA ini tidak tertarik untuk masuk ke sektor pekerjaan anak jalanan, mereka memilih jenis-jenis pekerjaan sektor formal.

#### 4.1.4.6 Jam Kerja Anak (Lama Bekerja)

Lama jam bekerja anak jalanan dihitung mulai dari mereka melakukan usahanya sampai mereka selesai melakukan kegiatan usahanya. Lama jam kerja pada penelitian dikelompokkan menjadi 4 kelompok mulai dari lama bekerja kurang dari 1-6 jam per hari sampai lama jam kerja 16 jam ke atas setiap harinya. Untuk mengetahui lama jam kerja anak jalanan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Jam Kerja Anak (Lama Bekerja)**

No	Lama Bekerja	Jumlah Anak
1	1 – 6 jam	11 anak
2	> 6 - < 8 jam	28 anak
3	> 8 - < 12 jam	25 anak
4	> 16 jam	6 anak

**Sumber:** Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang

Tabel di atas menunjukkan bahwa lama bekerja anak jalanan yang berada di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang sebagian besar antara > 6 - < 8 jam per hari, yakni sebanyak 28 anak. Persentase terkecil berada pada jam kerja > 16 jam per hari yakni sebanyak 6 anak. Menarik untuk dikaji cukup banyak persentase anak jalanan yang bekerja > 8 - < 12 jam per hari, yakni sebanyak 25 anak. Ini membuktikan mereka sebagai anak jalanan hampir seharian berada di jalanan. Hal tersebut berarti semakin lama anak menghabiskan waktu di jalanan semakin banyak anak mendapat pengaruh dari luar dan semakin sulit pula untuk

diajak pada perubahan yang lebih baik karena sudah melekat pada jiwanya. Jikalau berubah menjadi lebih baik, itu pun harus muncul sendiri dari anak tersebut, yakni rasa jenuh dan lelah hidup di jalanan sehingga setidaknya dapat membantu proses pembinaan yang dilakukan walau itu tidak mudah dan semuanya membutuhkan proses panjang.

#### 4.1.4.7 Jenis Kelamin Anak Jalanan

Pada umumnya pekerjaan anak jalanan lebih banyak dilakukan oleh anak laki-laki, sebagaimana pelaku-pelaku ekonomi lain yang mempunyai resiko besar dipastikan banyak dilakukan oleh kaum laki-laki dan hanya pada pekerjaan dengan resiko ringan cenderung didominasi oleh kaum perempuan.

Untuk mengetahui hasil penelitian anak jalanan berdasarkan jenis kelamin di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 9**  
**Jenis Kelamin Anak Jalanan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	46 anak
2	Perempuan	24 anak

**Sumber:** Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa anak jalanan yang berada di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang sebagian besar atau tiga perempatnya adalah laki-laki, tepatnya sebanyak 46 anak. Sisanya atau seperempatnya berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 24 anak.

Besarnya jumlah anak jalanan laki-laki ini sama dengan hasil-hasil penelitian tentang anak jalanan yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menyimpulkan bahwa jumlah anak jalanan laki-laki lebih banyak dibanding jumlah anak jalanan perempuan, bahkan ada yang menyebutkan perbandingan 7:3 artinya setiap tujuh anak jalanan laki-laki terdapat tiga anak jalanan perempuan. Anak jalanan perempuan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang pada umumnya bekerja sebagai pengemis dan sebagian lagi sebagai pengamen.

#### 4.1.4.8 Penyebab Utama dan Penyebab Lain Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang

- **Penyebab Utama**

Situasi krisis yang melanda di Indonesia merupakan penyebab utama turunnya anak ke jalan pada anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang. Terjadinya pemutusan hubungan kerja alias PHK berakibat pengangguran bagi para orang tua. Kondisi ini semakin terpuruk saat krisis moral dan ekonomi terjadi dan berkepanjangan. Kondisi seperti ini akan berakibat fatal, salah satu kasus: banyak terjadi percekocokan dalam keluarga karena sang ayah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akibat lebih jauh, banyak lahir anak-anak di jalanan untuk mencari keasyikan tersendiri daripada mendengarkan percekocokan orangtuanya. Selain itu, dengan terjadinya PHK menuntut orang tua untuk mencari alternatif sumber pendapatan lain. Bahkan terjadi pengerahan SDM yang ada di keluarga, sehingga anak harus turut serta dalam bekerja membantu orang tua. Salah satu alternatif yang paling mudah bagi anak adalah bekerja *part time* (kerja paruh waktu) di saat mereka tidak sekolah maupun *full time* sehingga mereka meninggalkan sekolah.

Dorongan orang tua untuk mengeksploitasi tenaga anak untuk kegiatan ekonomi, merupakan alternatif yang paling mudah dari orang tua untuk memaksa anak bekerja di jalanan, baik sebagai pengemis, pengamen dan lain-lain. Di samping itu, situasi pembelajaran di sekolah yang tak selalu kondusif untuk meningkatkan minat belajar anak, sehingga banyak anak yang putus sekolah dan mencari kegiatan lain di jalanan, baik sebagai aktifitas ekonomi (membantu orang tua) maupun aktifitas lainnya. Hal ini dikarenakan oleh adanya pola pikir anak jalanan yang beranggapan bahwa dengan belajar toh tidak bisa mendapatkan uang dengan cepat ketimbang mengamen di jalanan, seperti yang diungkapkan oleh Si Mbok (nama panggilan salah satu anak jalanan perempuan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang), “Aku yo seneng jadi anak jalanan mbak. Soalnya kalau ngemis atau ngamen bisa dapet duit (uang) untuk jajanku sendiri dan bisa mengurangi beban orang tuaku” (Wawancara tanggal 14 Juli 2007, pukul 12.08 WIB di Villa Bimasakti Batu). Si Mbok yang DO (*Drop Out*) kelas IV SD ini mengaku tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah oleh karena ia telah

menikmati profesinya sebagai anak jalanan seharian yang menghasilkan uang lebih cepat daripada harus belajar di sekolah yang menurutnya tidak menghasilkan apa-apa.

- **Penyebab Lain**

Di samping penyebab utama di atas, ada juga penyebab lain yang mendorong anak menjadi anak jalanan, yaitu:

1. Pengaruh dari lingkungan seperti: teman sebaya, tetangga (yang berprofesi sebagai penggemar, pemulung, pengamen, dll)
2. Kegiatan iseng untuk mengisi waktu luang dan memperoleh uang jajan.
3. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga kesadaran terhadap tumbuh kembang anak sangat rendah. Berikut kutipan wawancara dengan pimpinan rumah singgah:

“Tingkat pendidikan orang tua anak jalanan binaan kami kebanyakan hanya tamatan SD, bahkan yang tidak sekolah menempati peringkat kedua. Sehingga sangat sulit bagi kami untuk menyadarkan mereka bahwa pendidikan anak adalah yang terpenting. Namun, bagi kebanyakan mereka (para orang tua) berprinsip bahwa bisa baca dan tulis saja sudah cukup bagi anak mereka”. (Wawancara tanggal 5 Maret 2007, pukul 10.45 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

4. Lingkungan yang memberi rasa bangga jika seorang anak ikut bekerja.
5. Perasaan malas dan jenuh anak terhadap pendidikan di sekolah sehingga anak memilih bekerja di jalanan.

#### **4.1.4.9 Sikap (Karakter) Kelompok Anak Jalanan**

Seperti yang telah dikaji pada sub bab sebelumnya, bahwa jumlah anak jalanan laki-laki berada pada ranking teratas. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki jika terjadi suatu masalah mayoritas cenderung memutuskan diri untuk mencari solusi di luar rumah, bahkan lebih menjurus pada *broken home* dan mencari kebebasan diri. Selain itu kehidupan di jalanan adalah kehidupan yang cukup menantang dan kekerasanlah yang sangat mendominasi, sehingga hal ini membuat para perempuan akan berpikir seribu kali jika mau melangkah memasuki dunia jalanan. Kalaupun ada anak jalanan perempuan itu pun tidak sebanyak anak jalanan laki-laki.

Ketika kebebasan itu telah didapat, maka mulai mengarah pada hal-hal yang negatif misalnya: mulai mabuk-mabukan, mengadakan sex bebas baik

dilakukan sesama jenis atau lawan jenis anak jalanan, *ngepil* atau penggunaan obat terlarang). Hal ini diakui sendiri oleh anak jalanan (yang ingin namanya dirahasiakan) melalui wawancara: “Jangan bilang siapa-siapa ya mbak, aku ini memang pemakai narkoba tapi yang murah-murah aja mbak. Aku juga sudah merokok dari SD. Pertama karena coba-coba ditawari teman akhirnya ketagihan. Meskipun sekarang aku masih pakai narkoba, tapi tidak sesering dulu mbak”. (Wawancara tanggal 21 Juli 2007, pukul 16.00 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

Karakteristik anak jalanan juga diwarnai oleh beberapa budaya yang secara tidak sadar telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan ini juga patut dicermati sebagai tambahan pertimbangan dalam menentukan segala macam solusi dalam upaya pembinaan terhadap masalah anak jalanan. Diantara budaya tersebut adalah jika mempunyai uang hari ini sedikit atau pun besar jumlahnya tetap akan dihabiskan dalam sesaat/hari ini pula. Untuk keesokan harinya, orang tua dan anak jalanan memiliki keyakinan pasti ada uang di tangan. Tanpa ada istilah menabung, apalagi memikirkan tentang hari esok yang perlu dipikirkan untuk melangkah ke depan. Dari hasil wawancara, semuanya menghabiskan uang dalam tempo sesaat.

Budaya lain yang biasa dilakukan oleh anak jalanan, diantaranya:

1. Menganggap bahwa cacian, umpatan dan mencuri adalah kebiasaan yang wajar bagi komunitas anak jalanan.
2. Acuh terhadap norma sosial yang ada di sekitar.
3. Ada kecenderungan membentuk norma sendiri dengan basis komunitasnya. Misalnya sok duluan, siapa yang dating duluan dalam suatu lokasi dialah yang berkuasa, apalagi kalau postur tubuh lebih besar dan kuat maka sifat yang muncul adalah sok jagoan/sok menang sendiri. Hukum rimba berlaku bagi mereka.
4. Acuh terhadap kepentingan pihak lain, bahkan ada kecenderungan negatif
5. Kurang bisa menjaga kesehatan dan kebersihan.

Masih banyak budaya yang lainnya yang tumbuh dan secara tidak sengaja diciptakan serta berlaku pada kehidupan keseharian yang dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, wajar atau semestinya. Walau oleh orang-orang yang berada

dalam kehidupan wajar menganggap bahwa budaya tersebut adalah budaya yang tumbuh pada masyarakat pinggiran, kelas rendah yang tidak berpendidikan dan lain sebagainya.

#### **4.1.4.10 Masalah yang Mereka Hadapi**

Dalam menjalani kehidupannya sebagai anak jalanan, seringkali mereka dihadapkan pada masalah-masalah yang tidak mampu mereka atasi sendiri. Beberapa diantaranya adalah:

1. Berhadapan dengan pihak Satpol PP (Dinas penertiban dan keindahan kota) sehingga terjadilah pengusiran, penyitaan barang milik anak jalanan, penggarukan, kejar-kejaran. “Kalau alat ngamen kita diambil, berarti kita tidak bisa ngamen mbak. Kalau tidak ngamen, saya tidak bisa bawa uang untuk diberikan ke orang tua”, merupakan curahan hati Tini, anak jalanan pengamen perempuan yang berperan sebagai vokalis saat diwawancarai di Villa Bimasakti Batu.
2. Mendapat tekanan dari geng atau kelompok mereka.
3. Mendapat kekerasan fisik, psikologis dari sebagian masyarakat.
4. Sulit mencari pekerjaan ke sektor yang formal karena stigma masyarakat yang terlampau negatif.
5. Tidak memiliki masa depan yang dapat diharapkan mereka.
6. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dan komunikasi dari orang tua
7. Eksploitasi orang tua mereka untuk setoran uang.
8. Beresiko terhadap tertularnya penyakit kelamin akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak jalanan.
9. Pertengkaran dan perkelahian antarsesama anak jalanan baik di dalam atau pun luar kelompok anak jalanan.

#### **4.1.4.11 Akibat yang Timbul Bila Mereka Tidak Ditangani**

Masalah anak jalanan sangat penting untuk diketahui dan sesegera mungkin harus ditangani. Apabila mereka tidak segera ditangani, maka akibat yang timbul antara lain:

1. Anak tidak dapat menikmati haknya sebagai seorang anak (kehilangan haknya) serta tidak dapat menempatkan anak jalanan pada posisi yang tepat sesuai Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).

2. Terciptanya calon-calon penjahat mengingat adanya pergaulan bebas di jalanan sehingga anak berperilaku negatif seperti mencuri.
3. Bertambahnya angka DO sekolah akibat bekerja seharian di jalanan.
4. Kurangnya kesadaran mereka tentang hari depan dan menumbuhkan upaya-upaya untuk mencari solusi masalah yang mereka hadapi secara positif.
5. Sulitnya membentuk sikap-sikap positif dan tumbuhnya semangat hidup positif pada anak.
6. Terbentuknya opini masyarakat yang tidak proporsional terhadap anak jalanan.
7. Kurang ditematkannya anak pada posisi yang tepat dalam kehidupan keluarga.
8. Anak rentan terhadap kekerasan fisik (kekerasan dari orang tua, sesama anak jalanan, orang yang lebih dewasa dan aparat) karena tidak adanya perlindungan dari orang dewasa.

## **4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi Pembinaan Anak Jalanan ala Rumah Singgah Pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**

#### **4.2.1.1 Bentuk Pembinaan yang Selama Ini Dilakukan oleh Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**

Bentuk pembinaan pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang terfokus pada program pemberdayaan. Program ini diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan masa depan anak jalanan dengan mengutamakan faktor perbaikan mental dan moralitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan rumah singgah, program ini direalisasikan melalui beberapa pentahapan, yakni:

1. Penjangkauan dan pendampingan di jalanan

Penjangkauan adalah suatu kegiatan melakukan pendekatan dan memulai perkawanan sekaligus memperoleh data-data untuk anak jalanan yang akan didampingi sebagai pengganti anak jalanan yang sudah mandiri (terminasi). Selanjutnya memberikan layanan berupa pendampingan dan pemeliharaan hubungan baik antara orang tua dengan anak, konseling dan

advokasi. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan *Open House* di kantong-kantong anak jalanan untuk penyaringan anak jalanan. Terdapat tempat berkumpulnya anak-anak di lokasi keramaian. Hal ini merupakan keuntungan sendiri bagi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang untuk melakukan pendampingan awal yang nantinya akan dilakukan penyaringan terhadap anak yang mau dibina selanjutnya. Tempat bagi anak-anak jalanan tanpa dipungut biaya atau menyewa dari masyarakat setempat. Upaya penyaringan ini dilakukan dengan hati-hati tanpa adanya paksaan.

2. Identifikasi Anak (*Problem Assessment*)

Anak masuk rumah singgah, kemudian dilakukan pengisian file anak dan monitoring kemajuan anak.

3. Resosialisasi

Kondisi anak dengan sikap dan perilaku normatif. Kemudian melakukan resosialisasi, bimbingan sosial, penyuluhan, rekreasi dan reunifikasi.

4. Pemberdayaan

Selanjutnya dengan mengetahui kebutuhan dan masalah-masalah anak jalanan, pihak rumah singgah menentukan arah pembinaan yakni melalui pemberdayaan yang bertujuan untuk memandirikan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri anak jalanan akan masa depan mereka. Pemberdayaan anak jalanan dilakukan melalui dua bidang, yakni:

- Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan formal dilaksanakan melalui pemberian beasiswa dan bimbingan belajar bagi anak jalanan yang masih bersekolah baik di tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Hal ini bertujuan agar anak jalanan tetap bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depan anak.

- Bidang Pelatihan Keterampilan (*life skills*)

Pelatihan keterampilan merupakan kegiatan pemberian bantuan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak jalanan yang putus sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk

membekali keterampilan tertentu agar mereka siap bekerja dan mendidik anak jalanan menjadi warga masyarakat yang profesional dan produktif. Kegiatan ini berlangsung di lembaga kursus/*home industry*/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR).

Berikut ini adalah kegiatan pelatihan keterampilan yang selama ini dilaksanakan pada periode tahun 2005-2006:

JENIS	JUMLAH	LEMBAGA	PESERTA LATIHAN
Sablon yang Dikelola Rumah singgah flamboyan kota malang	10 Anjal	Iwan Sablon and Advertising	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tri Agus Sutrisno</li> <li>2. Sunaryo</li> <li>3. Agus Sunarko</li> <li>4. Slamet Arifin</li> <li>5. Nur Atim</li> <li>6. Ilal Mukminin</li> <li>7. Paidi</li> <li>8. Suwandi</li> <li>9. Akhmad Jaenal</li> <li>10. Erik Edi Santoso</li> </ol>
Sablon yang Diselenggarakan di PSBR Karya Taruna Jombang	2	PSBR JOMBANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iwan Ribowo</li> <li>2. Arip Purbowantoro</li> </ol>
Keterampilan Service Sepeda Motor Di SKB Kota Malang	5	VEDC Malang, Bengkel GONG 2000, Wahana Usaha Bersama, Teknik Mesin Universitas Negeri Malang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ismail Wahyu</li> <li>2. Wibowo</li> <li>3. Slamet, Harianto</li> <li>4. Andik Setiawan</li> <li>5. Khusnul</li> </ol>
Keterampilan Menjahit Di SKB Kota Malang	2	SKB Kota Malang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umbar Prastiwi</li> <li>2. Subaida</li> </ol>
Keterampilan Menjahit dikelola Oleh Rumah Singgah Flamboyan	10	Rumah Singgah Flamboyan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fera Yuliani</li> <li>2. Sulastri (A)</li> <li>3. Sulastri (B)</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Puji Astutik</li> <li>5. Sri Wijayanti</li> <li>6. Estiana</li> <li>7. Sunarti</li> <li>8. Puji Rahayu</li> <li>9. Eli Kulsum</li> <li>10. Baida</li> </ol>
Otomotif Sepeda Motor yang Diselenggarakan di PSBR Mardi Utomo Blitar	3	PSBR Blitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moh Harianto</li> <li>2. Iwan Setiabudi</li> <li>3. Ismail</li> </ol>
Pertukangan (Kriya Kayu Yang diselenggarakan di PSBR Mardi Waluyo	2	PSBR Bojonegoro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwi Hadi</li> <li>2. Imam Bukhori</li> </ol>
Ketrampilan Elektro Di SKB Kota Malang	1	Sanggar Kegiatan Belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nurul Huda</li> </ol>
Keterampilan Pertukangan Di SKB Kota Malang	2	Sanggar Kegiatan Belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Widiyanto</li> <li>2. Agus Sunarko</li> </ol>

Paket Keterampilan di PSBR Karya Taruna Jombang Jangka Waktu 6 Bulan  
(Januari s/d Juni 2006)

JENIS	JUMLAH	LEMBAGA	PESERTA LATIHAN
Keterampilan Menjahit Diselenggarakan di PSBR	2	PSBR KARYA TARUNA BLITAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siska Palupi</li> <li>2. Anik Wijati</li> </ol>
Ketrampilan Otomotif Sepeda Motor Diselenggarakan di PSBR	2	PSBR KARYA TARUNA BLITAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khusnul</li> <li>2. Andik Setiawan</li> </ol>
Keterampilan Elektro	2	PSBR KARYA TARUNA BLITAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nurul Huda</li> <li>2. Slamet Arifin</li> </ol>

Selain pemberdayaan anak jalanan, Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang juga melakukan pemberdayaan bagi orang tua anak jalanan dengan memberikan bantuan modal usaha. Modal diberikan secara langsung maupun kelompok dengan skema atau teknik simpan pinjam berdasarkan musyawarah dengan orang tua. Modal tersebut berasal dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, seperti yang diungkapkan oleh pekerja sosial Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang saat diwawancarai di Rumah Singgah tersebut: “Bagi orang tua anak jalanan ada bantuan modal usaha tiap 1 tahun berdasarkan jatah dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur untuk membantu mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka alami”. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pelatihan pengelolaan usaha, pembukaan akses terhadap lembaga perekonomian seperti perbankan, dan pemasaran hasil produksi.

Untuk dapat meningkatkan perhatian dan kepedulian orang tua terhadap anak mereka, maka Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang mengadakan kegiatan bimbingan langsung seperti konseling, dan penyuluhan kelompok. Cara-cara lain yang digunakan melalui radio, diskusi antar orang tua, materi-materi tercetak dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali yakni pada Minggu, pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Singgah Flamboyan Paramitra Lembaga Jawa Timur.

#### 5. Terminasi

Pada tahap terminasi, yang merupakan tahap akhir dari pelayanan, yaitu anak keluar dari rumah singgah. Kriteria anak yang sudah dapat keluar dari rumah singgah adalah apabila usianya bukan termasuk kategori anak lagi, yakni  $\geq 18$  tahun. Pada posisi ini anak diharapkan dapat beralih profesi untuk mandiri, produktif, dan menyatu dengan keluarga.

Pada tahap ke-3, 4, dan 5 ini menurut pekerja sosial Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang:

“Menuntut ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan serta tetap terarah pada komitmen pelayanan untuk kebaikan anak jalanan, karena yang kami hadapi adalah orang-orang yang perilaku, budaya dan gaya berpikarnya sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Sehingga untuk mengarah kepada perubahan perilaku yang lebih baik jelas sangat sulit atau tidak mudah karena yang kita bina adalah manusia dengan perilaku-perilaku tadi yang sudah membudaya sehingga membutuhkan waktu lama untuk berproses menuju perubahan perilaku yang semestinya”.

Lebih lanjut dikatakan:

“Misalnya saja ya mbak, ada pola pikir anak yang begini: *“Ngapain aku malu ngemis, sementara orang tua dan tetanggaku juga ngemis”*. Pemikiran inilah yang sangat sulit untuk diubah. Karena kami adalah orang baru dalam dunia mereka, maka tidaklah mudah memasuki nilai-nilai pada anak jalanan. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai orang tua yang salah telah memasuki pola pikir anak dan terpatni pada diri mereka. Oleh karena itu, kita juga tidak mau terlalu kaku dalam menangani anak jalanan. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan kekeluargaan, psikososial yakni penguatan motivasi, dan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan baik bagi orang tua dan anak jalanan serta masyarakat”. (Wawancara Tanggal 21 Juli 2007, pukul 15.20 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

Selain kegiatan pemberdayaan yang telah diuraikan di atas, Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang juga memberikan bantuan makanan dan kesehatan, pembuatan akte kelahiran anak jalanan, bimbingan kerohanian untuk anak jalanan dan orang tua oleh pihak-pihak terkait yang berasal dari Kapolresta Malang dan para penceramah keagamaan, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak dan orang tua anak jalanan yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam hal pengembangan usaha, pimpinan rumah singgah menjelaskan bahwa dari sekitar 5 keluarga anak jalanan yang dibantu, hanya 1 keluarga saja yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya kesadaran akan kerja keras dan tidak putus asa dalam menjalani usahanya. Sedangkan sisanya, mengaku tidak sabar dalam memperoleh hasil usaha mereka. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah tentang bagaimana uang bisa didapatkan dengan cepat tanpa perlu menghabiskan tenaga. Pemikiran seperti inilah yang masih menggerogoti sebagian besar anak jalanan. Belum terdapatnya kesadaran akan perjuangan hidup menuju masa depan yang cerah.

Contoh lain adalah ketika di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang diadakan konsep *café* kecil-kecilan dan bengkel. Pekerja sosial menuturkan bahwa dibukanya bengkel dan usaha *café* kecil-kecilan merupakan sarana penunjang kegiatan pelatihan keterampilan yang selama ini dilaksanakan. Jadi, anak-anak bisa mempraktekkan langsung keterampilan yang mereka peroleh selama ini. Namun, lagi-lagi oleh karena ketidaksabaran anak-anak jalanan dalam menantikan buah pekerjaannya, maka satu persatu mereka menghilang dan kembali ke jalanan untuk mendapatkan uang. Yang ada di pikiran anak-anak hanyalah mendapatkan uang dengan cepat. Sehingga, bengkel dan *café* tersebut akhirnya tidak diadakan lagi. Hal ini dibenarkan oleh Tini (salah seorang anak jalanan perempuan binaan rumah singgah), yang mengungkapkan bahwa teman-temannya tidak sabar dalam menantikan hasil usaha mereka:

“Teman-teman rajin cuma 1 minggu saja, malah kurang dari 1 minggu, setelah itu mereka meninggalkan *café* dan bengkel seenaknya. Katanya sudah capek-capek kerja, tapi uangnya kok lama sekali kumpulnya. Makanya mereka ngamen lagi di jalanan karena mereka langsung bisa dapat uang”. Ya, mau gimana lagi mbak, karena mereka teman-teman saya jadinya saya ikut mereka ke jalanan. Karena saya senang kumpul-kumpul bersama mereka”. (Wawancara Tanggal 14 Juli 2007, pukul 12.20 WIB di Villa Bimasakti Batu)

#### **4.2.1.2 Kendala yang selama ini dihadapi oleh Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**

Dalam melaksanakan programnya, tentu saja Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang tidak pernah lepas dari adanya kendala-kendala yang berpotensi untuk menghambat jalannya program pembinaan anak jalanan. Berikut ini disampaikan kendala-kendala yang selama ini dihadapi yaitu:

- Kurangnya tenaga pendamping/pekerja sosial/sukarelawan. Sulit sekali mencari tenaga yang sanggup menangani permasalahan di atas dan SDM yang sesuai dengan program tersebut.
- Minimnya anggaran tambahan yang dapat mendukung program tersebut terutama dari masyarakat (dermawan/donator). Karena selama ini bantuan yang diterima sangat kecil dan bukan berupa sumbangan uang yang dipakai untuk menunjang program pembinaan, karena belum adanya

pemahaman yang mendalam terhadap keberadaan anak jalanan/anak terlantar yang betul-betul membutuhkan perhatian khusus.

- Kurangnya dukungan dari para orang tua anak jalanan, sehingga program pengentasan anak jalanan ini sangat sulit diatasi. Terutama dari orang tua yang mengeksploitasi anak mereka untuk memberikan setoran/sejumlah uang dari hasil kerja di jalanan. Hal ini dituturkan oleh pimpinan rumah singgah berikut ini:

“Selama ini, kendala yang kami hadapi dari pihak orang tua adalah bahwa mereka kurang memiliki kesadaran untuk memperlakukan anak sebagaimana mestinya. Anak-anak itu butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, akan tetapi mereka malah dieksploitasi oleh orang tua mereka untuk bekerja dan membawa sejumlah uang ketika mereka pulang ke rumah. Apabila tidak membawa uang, banyak anak yang tidak mau pulang ke rumah karena takut dimarahi. Mereka lebih memilih tidur di jalanan atau menginap sementara di rumah singgah”.  
(Wawancara tanggal 5 Maret 2007, pukul 11.03 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

- Kurangnya dukungan dari berbagai pihak dalam upaya pengentasan anak jalanan, termasuk dunia usaha dan pers. Sedikit sekali pengusaha yang peduli dengan potensi anak jalanan yang sudah mendapat binaan. Mereka masih memandang sebelah mata terhadap keberadaan anak jalanan dan potensi mereka sebagai manusia yang juga dapat dibangun dan dikembangkan menjadi SDM yang berkualitas. Berkenaan dengan pers/media massa yang betul-betul melaksanakan kode etik yang semestinya. Dikatakan demikian karena keberhasilan pembinaan anak jalanan juga bisa didukung melalui pers. Malah program pembinaan terhadap anak jalanan akan cepat dirasakan hasilnya. Selama ini, pers hanya meliput berita tentang anak jalanan yang berkelahi dan berujung kematian. Berita tersebut tentu saja lebih “menjual” daripada berita tentang keberhasilan rumah singgah dalam menangani anak jalanan. Tanpa dukungan pers, maka masyarakat tidak akan pernah tahu bahwa ada suatu konsep rumah singgah yang diselenggarakan untuk membina anak jalanan baik mental, moralitas dan potensi mereka sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas. Karena ketidaktahuan masyarakat akan hal tersebut, maka stigma negatif terhadap anak jalanan tidak akan pernah

berubah dan masa depan anak jalanan tidak akan pernah lebih baik. Hal ini berarti fenomena anak jalanan akan terus ditemukan di Kota Malang.

- Mayoritas anak-anak belum memiliki kartu kependudukan, sehingga jika ada keperluan yang membutuhkan KTP selalu dihadapkan pada posisi sulit. Contoh rencana akan menikah karena tidak memiliki KTP maka gagal nikah. Akibatnya mereka akhirnya melakukan hubungan di luar nikah alias “kumpul kebo”. Kesulitan pun terjadi ketika anak jalanan mengalami musibah kematian. Karena tidak memiliki KTP pada saat terjadi musibah kematian, maka pada saat dikubur di salah satu lokasi pemakaman jenazah tidak diterima. Akhirnya kahidupan bagi anak jalanan tidak ubahnya seperti “hidup susah mati pun susah”.

- **Kuatnya Solidaritas Anak Jalanan**

Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, anak jalanan mempunyai solidaritas yang kuat dengan anggota kelompoknya. Jika salah satu anggota kelompok mengalami kesusahan, maka kesusahan tersebut harus dirasakan bersama. Begitu pula jika salah satu anggota kelompok mendapatkan sebuah kesempatan, maka kesempatan tersebut harus dirasakan pula oleh anggota yang lain. Akan tetapi solidaritas yang kuat dari anak jalanan ini telah menjadi salah satu kendala bagi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan binaannya. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan pimpinan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang:

“Solidaritas antar anak jalanan itu dapat dikatakan cukup tinggi. Akan tetapi ini menjadi kendala bagi kami untuk memberikan pembinaan. Dalam memberikan pembinaan tentunya tidak semua anak jalanan yang mendapatkannya. Ada kriteria tertentu untuk mendapatkan pembinaan dan terbatasnya dana yang kami miliki. Hal yang menyulitkan kami adalah apabila seorang anggota kelompok anak jalanan ini termasuk dalam kriteria mereka yang berhak mendapatkan pembinaan, sering dia tidak mau lantaran karena anggota kelompoknya yang lain tidak mendapatkan pembinaan juga. Bahkan sering ketika pelaksanaan tidak sedikit dari mereka yang tidak hadir di tempat”. (Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2007 pukul 17.00 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

- Terbatasnya lapangan pekerjaan bagi anak jalanan setelah mendapatkan pelatihan

Permasalahan pelik bagi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang dalam pembinaan anak jalanan adalah tindak lanjut dari pasca pemberian pelatihan keterampilan kerja dalam artian penyaluran anak jalanan ke lembaga atau perusahaan yang dapat menampung anak jalanan untuk bekerja. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan pimpinan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang yang mengatakan bahwa:

“Memang dilema bagi kami dan anak jalanan adalah pasca pemberian pelatihan kerja. Anak jalanan yang telah mendapatkan pelatihan kerja tidak serta merta mendapat pekerjaan. Lebih banyak dari mereka yang tidak dapat pekerjaan. Mungkin hanya 15 – 20% yang mendapatkan pekerjaan. Sehingga pilihannya adalah mandiri atau kembali lagi ke jalanan. Jika mandiri masalahnya adalah seputar modal. Kembali ke jalanan itu lebih mudah. Tetapi saya sebagai pengelola tidak begitu saja membiarkan anak-anak kembali ke jalanan. Sambil mereka kembali ke jalanan, kami dan anak-anak aktif mencari informasi lowongan pekerjaan untuk menyalurkan tenaga mereka”. (Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2007 pukul 17.25 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

Selain itu, pimpinan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang juga mengungkapkan bahwa selama ini masih saja terdapat keengganan dari perusahaan atau lembaga kerja untuk menerima mantan anak jalanan sebagai pegawai mereka. Lebih lanjut hal ini dituturkan lebih lengkap oleh pimpinan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang sebagai berikut:

“Dari banyaknya anak jalanan yang tidak mendapatkan pekerjaan tadi disebabkan oleh masih terdapatnya perusahaan yang enggan untuk menerima mantan anak jalanan bekerja di perusahaannya, begitu juga dengan lembaga mitra kerja yang memberikan latihan keterampilan kerja kepada anak jalanan masih ada keengganan untuk menerima mereka sebagai pekerja. Jika keadaannya demikian, maka terkadang tidak ada pilihan lain bagi anak jalanan, kalau tidak bekerja mandiri maka mereka kembali lagi ke jalanan. Hal ini tentunya menjadi pelik bagi kami”. (Wawancara pada Tanggal 20 Juli 2007 pukul 17.28 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

- Sarana dan Prasarana Pembinaan Anak Jalanan masih Kurang  
Sarana dan prasarana peningkatan kualitas sumberdaya manusia anak jalanan mempunyai peranan yang tidak dapat diabaikan. Khususnya dalam pemberian pelatihan keterampilan kepada anak jalanan, kelengkapan sarana dan prasarana menjadi sebuah hal yang mutlak. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat-alat perbengkelan dan kendaraan yang dijadikan sebagai obyek pelatihan, mesin jahit yang memadai, alat musik gitar, dan lain-lain. Minimnya fasilitas ini dapat dilihat pada lampiran 1.

Alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang:

1. Dalam mengatasi kekurangan pekerja sosial, baik pimpinan rumah singgah, tenaga administrasi dan pekerja sosial bahu membahu membina anak jalanan disamping menunaikan tugas dan tanggung jawab utama mereka. Jadi, bukan hanya pekerja sosial saja yang melayani anak jalanan binaan rumah singgah.
2. Mencukupkan diri dengan dana yang berasal dari Dinas Propinsi Jawa Timur dengan penyusunan program pelayanan yang tidak memakan terlalu banyak biaya dan melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di Kota Malang.
3. Melakukan pendekatan personal dan forum diskusi kepada para orang tua anak jalanan binaan mengenai aktivitas-aktivitas positif yang bermanfaat bagi masa depan anak di rumah singgah.
4. Apabila anak jalanan binaan terpaksa kembali lagi ke jalanan, maka pihak rumah singgah tetap aktif mencari lowongan pekerjaan untuk mereka baik melalui radio, koran, dan lain-lain.

#### 4.2.2 Evaluasi Kritis Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang Terhadap Pembinaan ala Rumah Singgah yang Cocok Diterapkan Bagi Mereka (Anak Jalanan)

Untuk mengetahui kebutuhan anak jalanan, peneliti melakukan wawancara mendalam bersama anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang. Wawancara dilakukan di tempat para anak jalanan melakukan aktifitasnya. Kebutuhan anak jalanan merupakan hal yang paling penting dalam mengetahui arah pembinaan. Tanpa mengetahui kebutuhan anak jalanan terlebih dahulu, maka kegagalanlah yang akan terjadi. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat mengetahui kebutuhan anak jalanan ini. Salah satu diantaranya adalah melalui forum diskusi. Dalam forum diskusi, anak-anak jalanan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan aspirasi mereka. Dengan bercerita/*sharing*, maka otomatis para pengelola rumah singgah mengetahui dan peka akan kebutuhan anak jalanan. Seperti yang diungkapkan oleh pekerja sosial Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, bahwa:

“Dengan mengetahui cerita mereka pertama kali memasuki dunia jalanan, sudah seharusnya kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka tanpa langsung bertanya pada anaknya. Ternyata yang mereka butuhkan tidak jauh berbeda dari 3 hal, yaitu: pekerjaan, uang, dan sekolah dan kebanyakan anak jalanan membutuhkan uang. Hal ini tidak terlepas dari alasan mereka ke jalanan yakni untuk membantu perekonomian keluarga bahkan sampai dieksploitasi oleh orang tua mereka”. (Wawancara Tanggal 14 Juli 2007, pukul 13.00 di Villa Bimasakti Batu)

Setelah mengetahui pernyataan pekerja sosial ini kemudian peneliti mengkonfirmasi kepada beberapa anak jalanan. Ketika ditanya mengenai kebutuhan mereka, maka secara spontan mereka langsung menjawab uang. Berikut cuplikan wawancara peneliti dengan Tini (16 tahun):

“Kalau ditanya butuhnya apa, ya sudah jelas saya membutuhkan uang mbak. Kalau tidak ada uang, saya tidak bisa beli makan dan keperluan sehari hari. Karena saya tidak dapat uang jajan dari orang tua, kadang makanan di rumah tidak cukup untuk semua keluarga. Apalagi saudara saya ada empat, makanya saya ngamen biar dapat uang”. (Wawancara Tanggal 14 Juli 2007, Pukul 13.20 WIB di Villa Bimasakti Batu)

Tini berprofesi sebagai pengamen. Anak jalanan lulusan SMP ini mendapat bagian sebagai vokalis mengamen bersama-sama dengan temannya. Ia mulai bekerja dari jam 13.00 – 21.00. Tini tidak capek karena ia senang kumpul-

kumpul bersama teman-teman sesama anak jalanan. Ketika ditanya apakah pernah diganggu oleh preman-preman selama di lokasi kerjanya, ia menjawab pernah digoda. Tapi Tini acuh saja, “*yang penting aku ndak ngapa-ngapain*”. Namun itu dulu dan sekarang sudah tidak lagi. Penghasilannya per hari tidak tentu. Tergantung ramai atau tidaknya Alun-alun. Kadang Tini mendapat Rp. 10.000,00/hari, malah kalau Alun-alun sedang sepi hanya mendapat Rp. 3.000,00/hari. Penghasilannya semakin berkurang apabila kondisi cuaca yang tidak memungkinkan misalnya jika hujan deras datang otomatis ia tidak jadi mengamen karena takut sakit kalau kehujanan. Pada kondisi ini Tini hanya membawa pulang Rp. 1.000,00 saja.

Yang menjadi masalahnya di jalan, ia justru dikejar-kejar Satpol PP terutama apabila ada peristiwa-peristiwa penting tertentu, misalnya tiap Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Karena setiap tanggal tersebut, Satpol PP melakukan operasi pembersihan kota dari anak-anak jalanan, gembel dan pengemis (gepeng). “Kalau digarap, ya aku tidak bisa ngamen. Kalau mau makan, dapet uang dari mana?”. Ia turun ke jalan merupakan keinginannya sendiri, ketika ditanya alasannya, ia menjawab: “*lapo aku ndek umah?! Wis ga oleh metu, ga oleh ngamen mbak*”. Kedua orang tuanya sebenarnya melarang ia bekerja di jalanan, namun ia tetap saja turun ke jalan. Bapaknya tidak kerja sementara ibunya bekerja menjajakan roti. Ketika ditanya kenapa tidak bantu ibu saja? Ia menjawab tidak mau. Kadang ia menginap di rumah singgah dan jarang pulang ke rumah. Bahkan ia tidak pernah tahu dan tidak berani menanyakan tentang pendidikan kedua orang tuanya.

“Aku seneng mbak di rumah singgah, dikasih kegiatan keterampilan menjahit”. Ketika ditanya apakah ingin melanjutkan ke tingkat SMA, Tini menjawab, “saya kepingin lanjut SMA, tapi yo males mikir mbak”. Hal tersebut ia katakan karena ia sudah terlanjur betah dengan dunia jalanan dimana ia bisa kumpul-kumpul bersama teman-teman seperjuangannya, jadi tidak ada waktu untuk berpikir meneruskan sekolah. Hal ini juga didukung oleh nilai orang tua dalam dirinya yaitu, bisa baca dan tulis saja sudah cukup bagi seorang anak perempuan.

Ketika ditanya tentang model pembinaan yang diterapkan selama ini di rumah singgah, Tini menjawab cocok, namun dengan alasan yang tidak ia ketahui. Dan pertanyaan berlanjut tentang apakah keinginan-keinginan/harapan-harapannya sudah tercapai selama mengikuti pembinaan di rumah singgah, Tini menjawab tercapai. Ketika ditanya hal apa saja yang sudah tercapai, dengan santai Tini menjawab “*Yo emboh, gak wero*”. Sebuah jawaban spontan dan apa adanya karena memang seperti itulah Tini yang mengaku malas berpikir. Pada intinya ia senang kalau kumpul-kumpul bertemu orang-orang baru ketika kegiatan itu dilaksanakan, misalnya saja kegiatan di Villa Bimasakti Batu pada 14 Juli 2007 yang merupakan bentuk kerjasama Pemerintah Kota Malang (Bappeko Malang) dan rumah singgah-rumah singgah dengan bantuan dana dari UNICEF berupa *outbond* tentang Penghapusan Tindak Kekerasan pada Anak. Oleh karena anak-anak jalanan dari dua rumah singgah berkumpul dalam kegiatan tersebut, maka Tini merasa senang karena punya teman-teman baru sesama anak jalanan dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap mereka. Lebih lanjut peneliti menanyakan sarannya untuk rumah singgah, dan Tini menjawab, “saran saya supaya rumah singgah itu memberi kami duit atau setidaknya menyediakan tempat bagi kami untuk bekerja”.

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa pernah ada *café* yang diadakan di rumah singgah, namun oleh karena ketidaksabaran usaha itu menjadi gagal. Jadi, ketika usia mereka pada akhirnya bukan terkategori sebagai anak dan lepas dari binaan rumah singgah, mereka tetap saja turun ke jalan karena faktor mental yakni ketidaksabaran dalam menuai hasil kerja yang tidak lain adalah uang. Selain uang, ada pula anak jalanan yang membutuhkan pekerjaan yang layak. Hal ini dikarenakan usia mereka yang sudah memasuki usia mandiri, yakni 18 tahun: “Saya jelas butuh pekerjaan, karena usia saya sudah 18 tahun dan saya jenuh hidup dan ngamen di jalanan. Pokoknya kerja apa saja saya mau mbak, asalkan kerja”, ungkap Agus (nama panggilan salah seorang anak jalanan laki-laki) ketika diwawancarai di Alun-Alun Kota Malang.

Agus hidup dengan kedua orang tua serta lima saudara kandungnya dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Ayahnya adalah tukang becak, dan adik-adiknya masih duduk di Sekolah Dasar. Kehidupan dengan keluarganya

relatif tidak bermasalah. Agus hidup di jalan karena kondisi ekonomi keluarganya tadi. Kedua orang tuanya tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya. Pernah Agus dengan teman-teman sekampungnya berjualan koran di Perempatan Rampal dan Mitra 2 Malang, dan sekarang berprofesi sebagai pengamen di Pasar Besar Malang. Rumahnya yang berlokasi di Muharto memungkinkan Agus untuk mengetahui keberadaan Rumah Singgah. Ia masuk menjadi anak binaan rumah singgah sejak duduk di kelas V SD.

Agus memulai kegiatan menjual koran jam 18.00 – 21.30. Setiap harinya di Perempatan Rampal dan Mitra 2 Malang. Seperti di jalan-jalan yang lain, mereka yang berjualan di situ pun mempunyai resiko yang cukup besar terhadap keselamatannya dari derasnya arus lalu lintas. Hal itu tidak dihiraukannya karena mengingat penghasilan bersihnya yang cukup besar ( $\pm$  Rp.7.000,00), dari penghasilan tersebut ia memberikan ke orang tuanya sebesar Rp. 5.000,00 setiap harinya dan sisanya untuk jajan serta ditabung. Gangguan yang paling dirasakannya ketika berjualan adalah barang dagangannya disita oleh Satpol PP. Pada saat itu ia tidak membawa uang sepeser pun untuk diberikan pada kedua orang tuanya.

Ia tidak mempunyai kelompok khusus (semacam *gank*). Yang dimilikinya adalah kelompok sekampungnya. Beberapa kali ia terkena razia oleh Satpol PP. Tidak salah ketika ditanyakan kepadanya tentang siapa yang paling ia dendami, dijawabnya petugas tibum/Satpol PP. Setengah tahun terakhir ini, ia bekerja sebagai pengamen di kawasan Pasar Besar dan Alun-alun Malang. Kegiatannya dimulai dari jam 10.00 s/d 14.00, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 8.000,00. s/d Rp. 12.000,00 setiap harinya. Hasil dari mengamen selain diberikan kepada orang tuanya, juga ia gunakan untuk keperluan dirinya sendiri. Dalam setahun terakhir belum pernah terkena penyakit yang dianggapnya berat. Paling sering dialaminya adalah sakit kepala, itu pun sudah bisa sembuh dengan obat yang dijual di warung. Air untuk keperluan mandi serta cuci bisa didapatkannya dari sumber air umum yang tersedia di kampung tempat dia tinggal, begitu pula halnya dengan air untuk minum. Agus biasa mandi 2 kali sehari. Ia tahu sedikit tentang narkoba dan HIV - AIDS dari Rumah singgah flamboyan kota malang.

Agus juga telah mendapatkan pembinaan dari Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, salah satunya mendapatkan pelatihan keterampilan bengkel otomotif di PSBR Jombang, tapi di sana ia merasa seperti hidup di penjara. Yang ia butuhkan saat ini adalah tempat yang mau menerimanya sebagai tenaga kerja dan menghilangkan stigma buruk terhadapnya dan anak-anak jalanan lain yang selama ini diberikan oleh masyarakat. Setidaknya, ia tidak merasa sia-sia telah hidup seperti dalam penjara selama pelatihan ketika ia mendapatkan pekerjaan tetap. Agus menjadi pesimis ketika sudah waktunya lepas dari binaan tetap rumah singgah, karena tidak ada satu pun tempat usaha yang memberikan kesempatan kepadanya untuk berkarya. Bahkan ia dan teman-temannya merasa bahwa pihak rumah singgah bertindak setengah hati dalam menangani masalah ini. Rumah singgah dianggap tidak peduli pada mereka (anak jalanan) karena mereka merasa tidak dicarikan tempat untuk magang kerja. Hal inilah yang menyebabkan Agus kembali mengamen di jalanan. Berikut ini ungkapan Agus yang merasa tidak diperhatikan oleh pihak rumah singgah:

“Saya itu mbak sebenarnya mau kerja, karena saya juga sudah mendapatkan pelatihan keterampilan bengkel dari rumah singgah berlokasi di PSBR Jombang. Tapi, sekarang saya tidak diperhatikan lagi. Sampai saat ini saya tidak dicarikan tempat untuk kerja. Kalau ada anak baru yang masuk (ke rumah singgah) pihak rumah singgah malah lebih memperhatikan mereka dan melupakan saya. Makanya saya kembali lagi ke jalan. Lagipula, katanya anak jalanan binaan rumah singgah mendapat uang saku. Namun, sampai sekarang saya dan teman-teman tidak pernah menerimanya. Saya curiga mereka (pengelola rumah singgah) korupsi uang saku untuk kami”. (Wawancara Tanggal 27 Juli 2007, pukul 14.00 WIB di Alun-alun Kota Malang)

Ketika lebih lanjut ditanyakan kesediaannya meninggalkan profesinya sebagai anak jalanan apabila ia mendapatkan pekerjaan, maka Agus menjawab dengan spontan, “Ya tentu mau mbak, apalagi saya adalah anak yang paling tua. Jadi, saya juga harus bertanggung jawab membantu orang tua membiayai sekolah adik-adik saya”. Kata “tanggung jawab” inilah yang menurut penulis sangat langka dikeluarkan dari pemikiran seorang anak jalanan. Agus mengaku mengalami perubahan yang lebih baik sejak ia masuk rumah singgah dan dibina disana. Budaya menabung ia lakukan sejak diberikan arahan oleh pekerja sosial akan betapa pentingnya tabungan supaya uang yang ia peroleh tidak habis begitu

saja namun bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lain dalam keluarganya.

Kemudian, ketika diminta kesediaannya memberikan saran kepada pihak rumah singgah atas pembinaan dan perlakuan yang selama ini ia dapatkan, Agus menjawab dengan santai, “Ngapain juga aku kasih saran, sementara mereka melupakan aku. Sebenarnya aku kecewa karena ‘dibuang’ begitu saja”. Hal tersebut bisa jadi merupakan ungkapan kekecewaan Agus terhadap ketidakadilan yang ia rasakan selama menjadi anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang.

Berbeda halnya dengan Si Mbok (17 tahun). Ia rutin mengunjungi rumah singgah, bahkan bisa dikatakan ia sebagai penghuni tetap rumah singgah. Anak jalanan perempuan yang DO Kelas IV SD ini memulai profesinya sebagai pengemis. Anak jalanan *tomboy* ini bangga menjadi anak jalanan. Justru ia tidak ingin disebut sebagai anak rumahan. Berikut cuplikan wawancara “Saya tidak mau disebut sebagai anak rumahan mbak. Saya bangga jadi anak jalanan, bisa punya duit sendiri, membiayai makan sendiri tanpa harus merepoti orang tua”. Si Mbok menjadi anak jalanan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Ayahnya hanya berprofesi sebagai tukang becak sementara ibunya tidak bekerja (sebagai ibu rumah tangga), sementara ia masih memiliki 3 orang saudara lagi. Dia tidak pernah tahu latar belakang pendidikan orang tuanya, karena ia tidak berani menanyakannya.

Dalam wawancara, Si Mbok mengungkapkan bahwa sebenarnya ia jenuh dengan profesinya sebagai pengamen. Dulu ia menjadi pengemis, karena menurutnya dengan mengemis ia lebih mudah mendapatkan uang. Pada awalnya, orang tua Si Mbok melarangnya kerja di jalanan. Namun, ia merasa bosan kalau hanya diam di rumah seperti anak perempuan biasanya. Tiap kali ia ke jalanan, orang tuanya selalu memarahinya. Oleh karena kekerasan hati Si Mbok sendiri maka ia kabur dari rumah dan tetap mengemis untuk mendapatkan uang: “Saya bosan di rumah karena tidak bisa dapat uang. Selain itu, saya juga bosan terus-terusan dimarahi ibu apabila tidak membantunya membersihkan rumah. Makanya, saya kabur ke jalan meskipun tetap dimarahi. Tapi akhirnya ibu sudah tidak memarahi saya lagi dan membiarkan saya kerja di jalanan”. Profesinya sebagai

pengamen digelutinya sejak berusia 12 tahun. Jadi, tiap selesai ngamen, Si Mbok mesti menginap di rumah singgah dan jarang pulang ke rumah.

Ketika di jalanan, masalah yang ia hadapi hampir serupa dengan anak jalanan lainnya, yakni ketika di razia oleh petugas Satpol PP. Pernah suatu kali ia tertangkap Satpol PP sewaktu ia mengemis. Saat itu ada razia PSK (Pekerja Seks Komersial). Ia sempat lari, namun akhirnya tertangkap juga oleh petugas Satpol PP dan dibawa ke Kantor Satpol PP. Di kantor itu ia didata dan dipaksa mengaku sebagai PSK. Berikut pengakuan Si Mbok selanjutnya: “Kenapa saya harus ngaku jadi PSK kalau saya memang bukan PSK?! Saya bilang kalau saya anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan yang sedang mengemis. Kemudian mereka menghubungi Rumah Singgah untuk menanyakan kebenarannya. Lalu, saya dikembalikan ke rumah singgah setelah mendapatkan penyuluhan dari sana”. (Wawancara Tanggal 20 Juli 2007, pukul 16.32 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

Selama di rumah singgah, Si Mbok mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit. Mengenai model pembinaan yang diterapkan selama ini, Si Mbok mengaku cocok dengan pembinaan yang diberikan kepadanya. Meskipun *tomboy*, ia mengaku tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelatihan keterampilan menjahit. Akan tetapi, ia merasa keterampilan yang diperolehnya selama ini tidak bisa mendatangkan uang begitu saja. Dengan menguasai keterampilan menjahit, tidak serta merta menjadikan segalanya menjadi lebih mulus. Ia membutuhkan modal untuk mempraktekkan keahliannya. Berikut penuturannya kepada penulis:

“Saya bingung mbak setelah ini mau ngapain. Apalagi usia saya sudah bukan anak-anak lagi. Kepinginnya sih punya usaha menjahit kecil-kecilan dulu, tapi saya tidak punya modal. Jangankan uang, mesin jahitnya saja saya tidak punya. Mau tidak mau saya terpaksa kembali ke jalanan, lagipula tidak ada perusahaan yang mau menerima anak jalanan bekerja di sana”. (Wawancara Tanggal 20 Juli 2007, pukul 16.54 WIB di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang)

Setelah masuk dan dibina di rumah singgah sampai sekarang ini, Si Mbok merasa bahwa ia telah jenuh mengamen di jalanan. Ia berpikir sudah saatnya ia bekerja di sektor formal dan memperoleh penghasilan tetap. Namun sama seperti lainnya, ia mengaku tidak ada orang yang mau memberikan pekerjaan kepadanya, karena ia pernah menjadi anak jalanan. Meskipun kejenuhan itu tetap ada, namun

mau tidak mau ia kembali ke jalanan. Si Mbok juga sangat berterima kasih pada pimpinan rumah singgah yang masih membolehkannya mengunjungi dan menginap di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang meskipun ia sudah memasuki kategori tahap terminasi (akhir pelayanan).

### 4.3 PEMBAHASAN

#### 4.3.1 Analisis Data

##### 4.3.1.1 Model Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan ala Rumah Singgah

Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan ala Rumah Singgah merupakan kebijakan pemerintah pusat yang secara umum bertujuan untuk membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalah dan menentukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dan keluarganya. Melihat bagaimana kebijakan ini dirumuskan dimana pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Sosial Republik Indonesia (selanjutnya ditulis: Depsos RI) sebagai perumus kebijakan (*policy maker*), maka dikatakan bahwa Pembinaan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah merupakan kebijakan yang bersifat *top-down*.

#### 1. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

Rumusan kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah menetapkan standar pelayanan didalamnya. Sebagai pemerintah pusat, Depsos RI bertugas menetapkan standar pelayanan dalam suatu prosedur penyelenggaraan pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah bagi tiap-tiap rumah singgah. Mengenai pengembangan serta metode pelayanan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah dan rumah singgah yang bersangkutan.

Kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang bersifat *top-down* melibatkan sejumlah birokrasi terkait dengan Depsos RI sebagai *policy maker*. Kelebihan dari kebijakan yang bersifat *top-down* adalah pemerintah dapat memberikan *monitoring* melalui jalur birokrasi yang terlibat dalam proses implementasi sehingga masalah-masalah implementasi dapat dikendalikan. Kesukaran-kesukaran teknis dalam proses implementasi dapat dikendalikan

melalui perumusan kebijakan yang terstruktur pada masing-masing jenjang birokrasi, yaitu Depsos RI, Dinas Sosial Propinsi dan Bagian Sosial Kota hingga implementasi sampai pada Rumah Singgah sebagai kelompok sasaran. Depsos RI sebagai *policy maker* dapat mendelegasikan implementasi kebijakan kepada dinas-dinas terkait yang berada di daerah, yaitu Dinas Sosial Propinsi dan Bagian Sosial Kota. Didukung oleh hubungan koordinasi yang bersifat pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan di daerah kepada Depsos RI maka masalah-masalah yang dihadapi dapat diketahui dan dikendalikan. Kesulitan-kesulitan implementasi yang bersifat teknis dapat diminimalisir melalui model implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang bertahap dan berkelanjutan serta pemberian sosialisasi terhadap kalangan akademisi baik secara terpusat maupun di daerah.

## **2. Kemampuan Kebijakan untuk Menstrukturkan Proses Implementasi**

Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang melibatkan jenjang birokrasi sosial mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah memunculkan adanya prosedur tahap-tahap implementasi yang harus dilalui untuk dapat menyentuh pelaksanaan di lapangan yaitu tingkat rumah singgah. Keberadaan prosedur dan tahap implementasi juga didukung oleh garis kewenangan yang jelas mempermudah kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah untuk menstrukturkan secara tepat pada setiap jenjang birokrasi yang dilewati.

Secara khusus, tujuan dilaksanakannya pembinaan anak jalanan ala rumah singgah adalah sebagai berikut:

1. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Mengupayakan anak-anak jalanan kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
3. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif

Oleh karena itulah perlu diadakan pembinaan yang benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak jalanan. Materi pembinaan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi anak serta menyesuaikan dengan tuntutan riil di lapangan, agar potensi setiap anak dapat digali dan dikembangkan menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesesuaian antara tujuan dengan misi pembinaan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas anak-anak yang kurang beruntung (buruh anak/pekerja anak, anak jalanan, anak tereksplorasi, anak *marginal*, anak miskin dan terlantar) untuk mendapatkan hak-haknya.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pemberdayaan anak.

Oleh karena itu, upaya-upaya konkret perlu dilakukan untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan yang kian merebak di perkotaan. Untuk merealisasikan tujuan pembinaan ini, dalam pedoman penyelenggaraan pembinaan anak jalanan, pemerintah telah memberikan alokasi anggaran pembinaan yang berasal dari dana APBN/APBD. Ketentuan yang sama berlaku pada rumah singgah yang dikelola oleh pemerintah. Sumber pembiayaan tambahan untuk rumah singgah juga dapat diperoleh melalui kerjasama proyek dengan lembaga dunia atau nasional.

### **3. Faktor di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi**

Saat anak memutuskan diri menjadi anak jalanan, faktor utama penyebabnya adalah berawal dari masalah orang tua. Baik pada posisi pendidikannya yang rendah, akhirnya berefek pada penghasilannya yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, akibatnya anak dieksplorasi untuk dapat membantu mencari tambahan penghasilan keluarga. Juga berefek pada ketidapahaman memaknai anak sebagai amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang betul-betul harus dilaksanakan. Sehingga menelantarkan anak adalah suatu hal yang biasa bagi orang tua anak jalanan. Dampak dari semua inilah yang semakin memperburuk kondisi anak karena selalu berada di luar rumah yang mudah sekali mendapat pengaruh. Ajakan teman merupakan satu-satunya solusi bagi anak

untuk mengatasi segala permasalahan yang dialaminya, sehingga memutuskan diri menjadi anak jalanan.

Keberadaan rumah singgah, dengan segala program pembinaannya, terkonsentrasi pada persoalan perbaikan mental dan moral. Persoalan perbaikan mental dan moral ini menjadi faktor utama dalam penanganan masalah anak jalanan karena gejala yang ada adalah perilaku yang buruk, mental yang rendah. Gejala ini melekat pada anak karena adanya pengaruh yang cukup kuat ketika anak berada pada lingkungan jalanan yang keras, semuanya serba bebas tanpa pengontrol dan filterisasi yang jelas.

Melalui rumah singgah diharapkan dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap anak jalanan. Namun, hal tersebut menjadi suatu kesia-siaan apabila anak jalanan yang dibina tidak mau berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki citra buruk mereka selama ini. Pada kenyataannya, mereka lebih senang dipanggil anak jalanan bahkan mereka bangga menjadi anak jalanan. Faktor lingkungan tidak dapat dipungkiri menjadi penghambat proses implementasi pembinaan. Selama anak jalanan masih hidup dan menghabiskan waktu lebih banyak di jalanan, maka dapat dipastikan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Oleh karena itu, kesadaran diri dari anak jalanan untuk menjadi lebih baik sangat penting dan harus muncul terlebih dahulu agar dapat mencapai keberhasilan dalam implementasi pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah.

Selain hal tersebut di atas, instansi-instansi terkait juga sangat penting untuk dikaji peranannya, terutama Bagian Sosial Kota bidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Bagian Sosial Kota bidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bertanggung jawab terhadap kelangsungan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di wilayah kota. Dalam konteks tersebut, Bagian Sosial Kota bertugas mendampingi rumah singgah dalam proses implementasi kebijakan termasuk memberikan fasilitas pendukung implementasi kebijakan. Namun, realitas di lapangan mengungkapkan bahwa Bagian Sosial Kota belum mampu bertindak sebagai fasilitator implementasi seperti yang dibutuhkan. Terbukti dengan tindakan yang diambil dalam rangka implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang. Bagian Sosial Kota Malang hanya berfungsi sebatas pada

penyelenggaraan pelatihan, sedangkan fungsi pendampingan tidak dapat berjalan sempurna dan cenderung mengutamakan kepentingan poyeknya sendiri. Apabila diminta untuk mendampingi anak-anak jalanan dalam kegiatan rumah singgah, petugas yang bersangkutan hampir tidak pernah mengunjungi rumah singgah. Padahal ada anggaran yang dialokasikan untuk itu.

#### **4. Proses Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Ala Rumah Singgah pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang**

Di Kota Malang, implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah dimulai pada tahun 1999. Sesuai dengan prosedur implementasinya maka pada tahun 1998 telah diadakan sosialisasi melalui program kerjasama Depsos RI dengan UNDP dan dilaksanakan di tujuh propinsi di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan).

Dalam implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah di Kota Malang, Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur menunjuk Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang sebagai *pilot project*. Hal tersebut disebabkan olah karena saat itu juga adalah awal pendirian Rumah Singgah Flamboyan di Kota Malang. Jadi, sukses tidaknya kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah dapat diketahui dan apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam implementasi masih dapat dideteksi sejak dini. Sehingga membantu pemerintah pusat dalam mengembangkan kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah selanjutnya.

Pada penyajian data sebelumnya telah disajikan data mengenai sumber daya pendukung implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang dimiliki oleh Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang yang meliputi sarana dan prasarana pendukung pembinaan di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang. Secara kuantitas, sarana dan prasarana yang ada dapat dikatakan belum memadai. Hal ini dapat diketahui dari minimnya jumlah prasarana pendukung pembinaan seperti buku-buku bacaan, mesin jahit yang hanya berjumlah 1 unit, perlengkapan sablon sederhana, ketiadaan peralatan bengkel, alat musik gitar. Secara kualitas sarana dan prasarana tersebut juga belum mampu mendukung kegiatan pembinaan

anak jalanan. Contohnya saja keberadaan mesin jahit dan ketiadaan peralatan bengkel. Berdasarkan perbandingan antara jumlah anak yang dibina dengan sarana yang ada dapat dilihat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan rumah singgah dalam memfasilitasinya. Dalam menunjang proses administrasi, Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang memiliki 1 unit perangkat komputer. Hal ini sudah dirasa memadai karena dapat memudahkan petugas administrasi dalam memasukkan data-data anak jalanan, membuat laporan keuangan serta menuliskan laporan pelaksanaan pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan dalam proses pembinaan anak jalanan di rumah singgah tersebut.

Kualitas sumber daya anak jalanan binaan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang kurang mendukung terhadap keberhasilan pembinaan. Apabila anak jalanan tidak mendapatkan uang saku, maka mereka malas mengikuti pembinaan di rumah singgah dan lebih memilih bekerja di jalanan. Selain itu, jumlah pekerja sosial yang memadai juga mempunyai andil dalam keberhasilan pembinaan ini. Namun pada kenyataannya, jumlah pekerja sosial di Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang hanya ada 1 orang. Hal ini tentu saja kurang mendukung terhadap keberhasilan implementasi, karena anak jalanan yang harus dibina terdapat 70 anak jalanan, sehingga pekerja sosial menjadi kewalahan dalam membina mereka.

Oleh karena itu, pimpinan rumah singgah menggunakan strategi, yaitu bahwa pimpinan, petugas administrasi, dan pekerja sosial bersama-sama melakukan pelayanan terhadap 70 orang anak jalanan binaan dan masing-masing melayani 23 sampai 24 anak jalanan binaan. Hal ini pun dirasakan masih belum optimal, karena dengan jumlah anak jalanan binaan yang terlalu besar pengawasan pekerja sosial menjadi kurang efektif, sehingga pekerja sosial hanya mampu memberikan perhatian pada segelintir anak jalanan yang dianggap memerlukan bantuan lebih besar serta anak jalanan yang menunjukkan prestasi yang menonjol. Padahal, dalam pedoman penyelenggaraan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah dituliskan bahwa rasio perbandingan antara anak jalanan yang dibina dengan pekerja sosial adalah 15 : 1. Oleh karena itu, apabila jumlah anak jalanan binaan bertambah seharusnya diikuti dengan penambahan jumlah pekerja sosial. Kelemahan tersebut berdampak pada hasil pembinaan yang

menjadi kurang terlihat dan beresiko tidak berhasil. Kurangnya tenaga profesional serta fasilitas rumah singgah yang belum mencukupi membuat kebijakan ini dipandang lemah dalam memberikan kontribusi terbaik terhadap komitmen dalam mengatasi permasalahan anak jalanan.

Model rumah singgah menuntut pihak rumah singgah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang informasi yang dibutuhkan oleh para anak jalanan binaannya. Hal tersebut bisa dilakukan melalui kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli terhadap masalah anak jalanan. Bentuk kerjasama bisa berupa pengadaan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan HIV AIDS, menentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak, pelatihan keterampilan dan pemberian bimbingan belajar serta penyediaan buku-buku bacaan bagi anak jalanan binaan rumah singgah.

Sarana pendukung lain yang juga tidak dapat lepas dari implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah dan merupakan elemen penting bagi kesuksesan implementasi adalah sumber dana bagi operasional rumah singgah. Sejak tahun 1999 pemerintah propinsi (Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur) memberikan sejumlah dana yang bertujuan untuk membantu rumah singgah dalam bidang keuangan. Dana tersebut diberikan per paket untuk 70 anak selama 10 bulan. Paket bantuan tersebut digunakan secara proporsional dialokasikan untuk menggaji pimpinan rumah singgah, petugas administrasi dan pekerja sosial. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk membantu anak jalanan dan orang tua mereka. Bagi anak jalanan binaan, dana dialokasikan untuk biaya makan anak, rekreasi, biaya kesehatan serta pemberian beasiswa biaya sekolah bagi mereka yang masih bersekolah dan berniat melanjutkan pendidikannya. Sedangkan bagi anak jalanan yang sudah tidak bersekolah lagi (DO) dan yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya, dana dialokasikan untuk kegiatan pelatihan keterampilan. Untuk orang tua anak jalanan binaan, dana dialokasikan untuk bantuan modal usaha.

Kebutuhan implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang semakin besar membawa dampak pada semakin besarnya kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja rumah singgah. Tampaknya hal inilah yang membuat Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang berusaha mencari bantuan dari

masyarakat (para dermawan) baik berupa uang maupun barang/makanan. Namun, sayangnya bantuan yang selama ini didapatkan dari masyarakat kebanyakan berupa barang/makanan dan itu pun jarang didapatkan. Bantuan berupa uang sangat diharapkan oleh pihak rumah singgah guna mendukung proses implementasi pelayanan pembinaan anak jalanan dan menutupi kekurangan dana dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Namun, sayangnya pihak Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang hanya berpangku tangan. Selama penulis melakukan penelitian pada rumah singgah ini, upaya-upaya yang dilakukan untuk menggalang dana masyarakat hampir tidak terlihat atau bahkan tidak dilakukan. Entah karena malas dan rasa pesimis atau bisa jadi kurangnya kerjasama antar orang-orang rumah singgah dengan pihak LSM yang menaungi rumah singgah tersebut. Sepertinya, terjadi penyusutan semangat komitmen dalam mengatasi masalah anak jalanan ini.

Kendala keterbatasan sumber daya implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah yang berakibat pada tidak maksimalnya implementasi kebijakan di lapangan merupakan kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan secara *top-down*. Rumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak mampu mencapai kondisi sempurna di lapangan. Kebijakan *top-down* menggunakan *forward mapping* sehingga fakta-fakta yang ada di lapangan tidak dapat didefinisikan secara sempurna oleh *policy maker* di tingkat pusat karena tidak adanya pengamatan langsung mengenai kondisi riil di lapangan. Akibatnya hambatan-hambatan serta kebijakan-kebijakan teknis implementor di lapangan seringkali memunculkan dampak yang tidak terdefinisi pada proses perumusan kebijakan di tingkat pusat.

#### **4.3.1.2 Dampak Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan ala Rumah Singgah**

Pemilihan model pembinaan anak jalanan ala rumah singgah digunakan sebagai alternatif pilihan dalam upaya pengentasan anak jalanan di perkotaan. Pembinaan anak jalanan ala rumah singgah dianggap mampu membantu anak jalanan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar mereka. Karakteristik model pembinaan ini adalah adanya tahap-tahap pelayanan kepada anak jalanan mulai

dari pendampingan awal di jalanan hingga akhirnya menjadi anak jalanan binaan yang kemudian mendapatkan pembinaan dari rumah singgah. Pembinaan yang diberikan diupayakan dapat membentuk pribadi anak jalanan dengan moral dan mental yang lebih baik serta menjadikan anak jalanan lebih berkualitas dan produktif.

Selama delapan tahun masa implementasinya, kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah telah membawa perubahan-perubahan yang lebih baik dalam menangani masalah anak jalanan. Perubahan-perubahan baik itu tampak dari tidak adanya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak jalanan, adanya kesadaran dari anak jalanan tentang sopan santun berbicara, meningkatnya keimanan dan ketakwaan anak jalanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa tanggung jawab akan masa depannya serta adanya perbaikan kondisi ekonomi keluarga anak jalanan binaan. Melalui perubahan ini diharapkan dapat mengurangi bahkan mengentaskan jumlah anak jalanan khususnya di perkotaan.

Perubahan yang terjadi juga dapat dilihat dari sikap orang tua anak jalanan binaan yang semakin lama semakin terbuka terhadap pembinaan yang diberikan selama ini. Di samping anak jalanan dibina, para orang tua juga merasa diuntungkan dengan pemberian bantuan modal usaha dari rumah singgah. Pembinaan mental dan spiritual yang diberikan kepada orang tua anak jalanan mulai menyadarkan orang tua akan tanggung jawab mereka terhadap kelangsungan hidup anak. Yang tadinya ada beberapa anak jalanan yang dilarang ke rumah singgah, saat ini mereka memperbolehkan anak jalanan berkunjung ke rumah singgah meskipun tidak untuk waktu kunjungan yang lama. Apabila ada pembinaan untuk anak jalanan, orang tua tidak segan-segan mengizinkan anaknya mengikuti acara tersebut.

Kebijakan pembinaan anak jalanan dapat berjalan sempurna apabila terdapat elemen-elemen implementasi tersedia di lapangan. Ketika elemen itu tidak terpenuhi, maka kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah tidak dapat berjalan dengan sempurna bahkan akan memberikan alternatif penyelesaian yang dapat berakibat pada dampak yang tidak diinginkan. Dalam konteks implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah, tujuan pembinaan akan tercapai jika sumber daya pendukung implementasinya, terutama masalah sumber

dana pembinaan, dapat terpenuhi oleh rumah singgah yang bersangkutan. Namun ketika sumber daya implementasi itu tidak terpenuhi maka pihak rumah singgah akan mencari sumber dana lain. Pencarian sumber dana pada akhirnya akan melibatkan peran serta masyarakat terutama lembaga-lembaga nasional maupun internasional sebagai alternatifnya. Peran serta masyarakat ini diwujudkan melalui kerja sama yang mendukung implementasi pembinaan yang diterapkan selama ini.

Upaya pembinaan anak jalanan ini juga tidak terlepas dari peran serta implementor kebijakan. Rumah singgah merupakan *mini society* bagi perbaikan dan pengembangan kualitas anak jalanan. Melalui rumah singgah jugalah tujuan peningkatan potensi diri anak jalanan dapat terrealisasi. Namun, pihak rumah singgah tidak dapat melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan ini apabila pemerintah sebagai *policy maker* tidak memberikan fasilitas pendukung bagi implementasi di lapangan. Karena keberadaan fasilitas sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, evaluasi kritis anak jalanan terhadap pembinaan selama ini juga menentukan keberhasilan implementasi. Anak jalanan bukanlah robot yang hanya mampu mengikuti perintah tuannya tanpa mengeluarkan pendapatnya. Anak jalanan adalah manusia yang memiliki hak asasi yang sama yang dimiliki oleh manusia lainnya. Teori evaluasi kritis menyatakan bahwa sudah saatnya manusia itu membuka cara pandangya terhadap ketidakrasionalan yang terjadi di dalam masyarakat selama ini. Kejanggalan-kejanggalan yang ada bukanlah untuk dibiarkan begitu saja, melainkan untuk dikritisi dan kemudian dicarikan jalan keluarnya demi kebaikan bersama. Begitu juga halnya dengan anak jalanan. Sudah saatnya anak jalanan memberikan suara mereka terhadap hal-hal yang mereka anggap janggal selama implementasi.

Aspirasi anak jalanan sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pengembangan pembinaan yang dilakukan. Aspirasi inilah yang menjadi acuan implementor kebijakan dalam menentukan arah pembinaan. Karena, para implementor program seharusnya menganggap anak jalanan bukan sebagai obyek melainkan subyek dari kebijakan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah dimana kepentingannya harus diutamakan. Sehingga, dapat diyakini bahwa tujuan pembinaan anak jalanan ala rumah singgah dapat terwujud. Namun, bukan berarti

para implementor kebijakan menuruti begitu saja keinginan-keinginan anak jalanan. Pertimbangan yang matang terhadap aspirasi yang masuk sangat diperlukan dalam upaya *mental building* bagi anak jalanan binaan rumah singgah. Misalnya adanya aspirasi anak jalanan yang ingin diberikan uang saku selama mengikuti pembinaan. Apabila aspirasi tersebut direalisasikan tanpa pertimbangan yang matang, tentu saja dapat menimbulkan masalah baru. Bukannya mengalami perubahan yang lebih baik, mental anak jalanan binaan rumah singgah justru akan semakin bobrok ketika yang ada di pikirannya hanyalah uang dan dapat dipastikan upaya pengentasan anak jalanan tidak akan berhasil.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis tentang Pembinaan Anak Jalanan ala Rumah Singgah pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, maka penulis menghasilkan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi pembinaan anak jalanan ala rumah singgah pada Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perubahan sikap, moral, mental dan spiritual anak jalanan binaan menjadi lebih baik, tidak terdapatnya anak jalanan yang memiliki masalah kriminal, tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam diri anak. Namun, keberhasilan pembinaan ala rumah singgah ini akan lebih terasa apabila pihak rumah singgah mampu memberikan jaminan pekerjaan formal bagi anak jalanan yang berusia mandiri.
2. Menurut anak jalanan, model pembinaan anak jalanan ala rumah singgah selama ini dapat dikatakan cocok bagi mereka, dimana didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan positif yang disukai anak jalanan dan bermanfaat bagi mereka. Dan upaya mereka untuk merasa nyaman di rumah singgah adalah dengan membawa teman-teman sesama anak jalanan untuk singgah dan melatih nyanyian-nyanyian terbaru yang akan dibawakan sewaktu mengamen. Kecocokan model pembinaan ini akan terasa lengkap bagi anak jalanan binaan apabila mereka diberikan uang saku tiap singgah dan mengikuti pembinaan di rumah singgah.
3. Model pembinaan ala rumah singgah yang cocok diterapkan bagi anak jalanan dalam penelitian ini tidak terlepas dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - Adanya anggaran dana yang cukup untuk merealisasikan kebijakan.
  - Harus memiliki fasilitas termasuk kualitas SDM untuk memenuhi segala kebutuhan dari kebijakan yang direncanakan dan diperlukan pengelolaan rumah singgah yang baik.
  - Kerjasama antar instansi terkait, LSM, para pengusaha, pers dan masyarakat dalam upaya mengentaskan anak jalanan (*networking*).

- Harus menggali segala kebutuhan dan apa yang diharapkan dari anak jalanan untuk menjawab kebutuhan kebijakan agar tepat sasaran dengan ketepatan konsep dan pendekatan agar kebijakan dapat terwujud.
4. Yang sering menjadi permasalahan adalah pada tahap terminasi/akhir pelayanan. Kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan seakan menjadi sia-sia karena mereka tidak dapat terus mengasah keterampilan-keterampilan yang telah mereka dapatkan. Hal itu dikarenakan oleh tidak tersedianya modal yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan mereka. Jadi anak-anak yang telah dibina selama ini pada akhirnya kembali lagi ke jalanan oleh karena tidak ada lowongan pekerjaan atau perusahaan/lembaga kerja yang mau menerima mereka karena dianggap tidak memiliki kemampuan di samping dicap sebagai mantan anak jalanan.

## 5.2 Saran

Untuk membenahi secara signifikan model pembinaan anak jalanan ala rumah singgah ini diperlukan perbaikan menyeluruh terutama peran serta pemerintah, LSM/LSK dan rumah singgah itu sendiri, pengusaha/pers serta masyarakat.

- Peran Pemerintah
  1. Sebagai *policy maker*, pemerintah seharusnya melakukan upaya untuk menggali kebutuhan dan aspirasi/harapan anak jalanan sebelum akhirnya menyusun suatu kebijakan. Hal ini dilakukan agar pembinaan anak jalanan ala rumah singgah lebih tepat sasaran dan cocok bagi anak jalanan. Karena konsep dan pendekatan yang ada selama ini merupakan kebutuhan hasil pemikiran para *policy maker* dan *policy executive* bukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi/harapan yang digali dari anak jalanan sebagai sasaran program.
  2. Bagi pemerintah mulai dari unsur kebijakan – praktisi (Dinas) perlu ada jaringan yang kuat, komitmen menangani permasalahan anak jalanan. Jangan hanya sekedar proyek sesaat, terhadap program yang ada terkesan berjalan sendiri-sendiri.

- Peran LSM Paramitra dan Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang
  1. Sebagai sebuah lembaga yang menaungi Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang, yang memiliki nilai dasar: perjuangan dan pengabdian pada masyarakat dengan penuh keikhlasan dengan tidak terlepas dari profesionalisme yang tinggi, sudah seharusnya LSM Paramitra melakukan suatu upaya penggalangan dana untuk mendukung implementasi pembinaan anak jalanan di rumah singgah. Sehingga pembinaan anak jalanan dapat dilakukan dengan serius, terfokus dan berkelanjutan serta cocok bagi anak jalanan.
  2. Sebagai pendamping anak jalanan, penting sekali bagi pengelola Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang mengetahui adanya kekuatan dan kelemahan baik dari sasaran kebijakan maupun dari Rumah Singgah Flamboyan Kota Malang itu sendiri.
- Peran Pengusaha dan Pers
  1. Pers haruslah berperan sebagai media yang jujur dan berkualitas sesuai dengan kode etik yang berlaku akan informasi tentang keberadaan kebijakan pembinaan anak jalanan, baik berkenaan dengan keseriusan pemerintah/LSM atau niat yang muncul dari anak jalanan itu sendiri dengan mau merubah diri berbuat sesuatu yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Dukungan media massa dapat dilakukan dengan kampanye penanganan anak jalanan dengan solusi yang benar. Jangan lupa bahwa anak jalanan juga generasi bangsa yang punya hak untuk hidup, berkembang secara normal, janganlah didiskriminasi dengan mengistilahkan anak jalanan dengan sampah masyarakat dan sebagainya.
  2. Hendaknya para pengusaha tidak hanya berperan sebagai penyedia tempat untuk mengadakan pelatihan akan tetapi juga menyediakan tempat untuk mempekerjakan mereka (anak jalanan yang mau meninggalkan duina jalanan dan bertekad untuk bekerja yang lebih layak).

- Peran Masyarakat

Karena anak jalanan adalah generasi penerus bangsa yang juga mempunyai hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya, masyarakat seharusnya berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan anak jalanan ini dengan menghilangkan *image* negatif yang selama ini diberikan kepada anak jalanan. Berilah hak-hak yang sama sesuai dengan anak yang lain dengan tumbuh dan berkembang sewajarnya di lingkungannya. Dengan memberikan perhatian dan kepercayaan pada anak jalanan untuk dapat berbuat sesuatu yang lebih baik atas dirinya dan yang lainnya.

Oleh karena itu, diharapkan adanya komitmen bersama/jaringan kerja dalam menangani permasalahan anak jalanan terutama di Kota Malang ini, yang diawali dengan menghapus stigma negatif bahwa anak jalanan merupakan sampah masyarakat, mulai dari instansi pemerintah terkait mulai dari unsur kebijakan sampai pada instansi teknis operasional, kepolisian, pariwisata, LSM/LSK pemerhati anak jalanan, dunia usaha, pers dan masyarakat luas. Tentunya keberhasilan kebijakan pembinaan anak jalanan dapat diraih apabila anak jalanan itu sendiri yang memiliki tekad kuat untuk memperbaiki moral dan mentalnya serta kehidupan ekonomi keluarganya.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Abdul Wahab, Solichin. 1999. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT. Dinar Wijaya – Brawijaya University Press.

\_\_\_\_\_. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik: Konsep, Tipologi Penelitian dan Strategi Pemanfaatannya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya bekerja sama dengan Penerbit Universitas Negeri Malang.

\_\_\_\_\_. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara ed. 2*. Jakarta: Bumi Aksara.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang. 2005. *Pemetaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan Kota Malang*. Malang: Pemkot Malang.

Bayo Ala. A. 1993. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Liberty.

Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Social (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya: Airlangga University Press.

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial. 2000. ***Anak Jalanan di Indonesia: Permasalahan dan Penanganannya***. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI).

Frederickson, George H. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.

Moloeng, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Popper, Karl L. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sanituti, S. & Suyanto, B., dkk, 1999, *Anak Jalanan di Jawa Timur (Masalah dan Upaya Penanganannya)*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sindhunata. 1983. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*. Jakarta: PT. Gramedia.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang

Suyanto, B. 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press.

### **Artikel dan Makalah**

Yayasan Setara Semarang. 2000. Situasi anak jalanan perempuan di Semarang. 15 Desember 2000.

### **Koran, Majalah, dan Jurnal**

Scanlon et. al. 1998. *Education and Debate: Street Children in Latin America*, diakses pada Tanggal 16 April 2007 dari <http://www.bmj.com/cgi/content/full/316/7144/1596?eaf>

Suyatna, H. 2006. Mewujudkan model penanganan anak jalanan ideal. *Jurnal PKS*, 5 (16): 30-39.

UNICEF. 2001. *A Study on Street Children in Zimbabwe*, diakses pada Tanggal 23 April 2007 dari [http://www.unicef.org/evaldatabase/files/ZIM\\_01-805.pdf](http://www.unicef.org/evaldatabase/files/ZIM_01-805.pdf)

Waters, Gisele A. 1998. *Critical Evaluation for Educational Reform*, diakses pada Tanggal 20 Juni 2007 dari <http://epaa.asu.edu>.

